Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Jakarta

2019

Telp. (021) 80889566 ext. 3303 fax. (021) 80889596 email: dit.jasn@gmail.com

DAFTAR ISI

JABATAN FUNGSIONAL	HAL
Administrator Database Kependudukan	1
Administrator Kesehatan	2
Agen	3
Analis Anggaran	4
Analis Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara	5
Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	6
Analis Kebakaran	7
Analis Kebijakan	8
Analis Keimigrasian	9
Analis Kepegawaian	10
Analis Ketahanan Pangan	11
Analis Keuangan Pusat dan Daerah	12
Analis Pasar Hasil Perikanan	13
Analis Pasar Hasil Pertanian	14
Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	15
Analis Pengelolaan Keuangan APBN	16
Analis Perbendaharaan Negara	17
Analis Perkarantinaan Tumbuhan	18
Analis Perkebunrayaan	19
Analis Pertahanan Negara	20
Analis Transaksi Keuangan	21
Apoteker	22
Arsiparis	23
Asesor Manajemen Mutu Industri	24
Asisten Apoteker	25
Asisten Inspektur Angkutan Udara	26
Asisten Inspektur Bandar Udara	27
Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan	28
Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	29
Asisten Konselor Adiksi	30
Asisten Pelatih Olahraga	31
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	32
Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	33

Asisten Penata Anestesi						
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap						
Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	36					
Asisten Penilai Pajak	37					
Asisten Perisalah Legislatif	38					
Asisten Pranata Siaran	39					
Asisten Teknisi Siaran	40					
Assessor SDM Aparatur	41					
Auditor	42					
Auditor Kepegawaian	43					
Bidan	44					
Diplomat	45					
Dokter	46					
Dokter Gigi	47					
Dokter Hewan Karantina	48					
Dokter Pendidik Klinis	49					
Dosen (Akademik Dosen)	50					
Entomolog Kesehatan	51					
Epidemiolog Kesehatan	52					
Fisikawan Medis	53					
Fisioterapis	54					
Guru	55					
Inspektur Angkatan Udara	56					
Inspektur Bandar Udara	57					
Inspektur Keamanan Penerbangan	58					
Inspektur Ketenagalistrikan	59					
Inspektur Minyak dan Gas Bumi	60					
Inspektur Tambang	61					
Instruktur	62					
Instruktur Mutu Hasil Perikanan	63					
Jaksa	64					
Kataloger	65					
Konselor Adiksi	66					
Mediator Hubungan Industrial	67					
Medik Veterinir	68					

Nutrisionis	69
Okupasi Teknis	70
Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)	71
Ortholis Prostetis	72
Pamong Belajar	73
Pamong Budaya	74
Paramedik Karantina Hewan	<i>7</i> 5
Paramedik Veteriner	76
Pekerja Sosial	77
Pelatih Olahraga	7 8
Pelelang	79
Pemadam Kebakaran	80
Pembimbing Kemasyarakatan	81
Pembimbing Kesehatan Kerja	82
Pembina Jasa Konstruksi	83
Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	84
Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	85
Pemeriksa	86
Pemeriksa Bea dan Cukai	87
Pemeriksa Desain Industri	88
Pemeriksa Karantina Tumbuhan	89
Pemeriksa Keimigrasian	90
Pemeriksa Merek	91
Pemeriksa Pajak	92
Pemeriksa Paten	93
Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	94
Penata Anestasi	95
Penata Kanselerai	96
Penata Kelola Pemilihan Umum	97
Penata Laksana Barang	98
Penata Ruang	99
Peneliti	100
Penera	101
Penerjemah	102
Pengamat Gunung Api	103
Pengamat Metereologi dan Geofisika	104

Pengamat Tera	105
Pengantar Kerja	106
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	107
Pengawas Benih Tanaman	108
Pengawas Bibit Ternak	109
Pengawas Farmasi dan Makanan	110
Pengawas Kemetrologian	111
Pengawas Keselamatan Pelayaran	112
Pengawas Ketenagakerjaan	113
Pengawas Koperasi	114
Pengawas Lingkungan Hidup	115
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	116
Pengawas Mutu Pakan	117
Pengawas Perikanan	118
Pengawas Radiasi	119
Pengawas Sekolah	120
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)	121
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	122
Pengelola Kesehatan Ikan	123
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	124
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	125
Pengembang Teknologi Pembelajaran	126
Pengendali Dampak Lingkungan	127
Pengendali Ekosistem Hutan	128
Pengendali Frekuensi Radio	129
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	130
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	131
Penggerak Swadya Masyarakat	132
Penggerak Swadya Masyarakat Penghulu	132 133
Penghulu	133
Penghulu Penguji Kendaraan Bermotor	133 134

Penilai Pajak	138
Penilai Pemerintah	139
Penilik	140
Pentashih Mushaf Al-qur'an	141
Penyelidik Bumi	142
Penyidik BNN	143
Penyuluh Agama	144
Penyuluh Hukum	145
Penyuluh Kehutanan	146
Penyuluh Keluarga Berencana	147
Penyuluh Kesehatan Masyarakat	148
Penyuluh Narkoba	149
Penyuluh Pajak	150
Penyuluh Perikanan	151
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	152
Penyuluh Pertanian	153
Penyuluh Sosial	154
Perancang Peraturan Perundang-undangan	155
Perawat	156
Perawat Gigi	156 157
Perawat Gigi	157
Perawat Gigi Perekam Medis	157 158
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa	157 158 159
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana	157 158 159 160
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif	157 158 159 160 161
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif Polisi Kehutanan	157 158 159 160 161 162
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif Polisi Kehutanan Polisi Pamong Praja (Pol PP)	157 158 159 160 161 162 163
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif Polisi Kehutanan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pranata Hubungan Masyarakat	157 158 159 160 161 162 163 164
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif Polisi Kehutanan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Informasi Diplomatik	157 158 159 160 161 162 163 164 165
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif Polisi Kehutanan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Informasi Diplomatik Pranata Keuangan APBN	157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif Polisi Kehutanan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Informasi Diplomatik Pranata Keuangan APBN Pranata Komputer	157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif Polisi Kehutanan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Informasi Diplomatik Pranata Keuangan APBN Pranata Komputer Pranata Laboratorium Kemetrologian	157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif Polisi Kehutanan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Informasi Diplomatik Pranata Keuangan APBN Pranata Komputer Pranata Laboratorium Kemetrologian Pranata Laboratorium Kesehatan	157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Perawat Gigi Perekam Medis Perekayasa Perencana Perisalah Legislatif Polisi Kehutanan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Informasi Diplomatik Pranata Keuangan APBN Pranata Komputer Pranata Laboratorium Kemetrologian Pranata Laboratorium Kesehatan Pranta Laboratorium Pendidikan	157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

·-	
Pustakawan	174
Radiografer	1 7 5
Refraksionis Optisien	176
Rescuer	177
Sandiman	17 8
Sanitarian	17 9
Statistisi	180
Surveyor Pemetaan	181
Teknik Jalan dan Jembatan	182
Teknik Pengairan	183
Teknik Penyehatan Lingkungan	184
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	185
Teknisi Elektromedis	186
Teknisi Gigi	187
Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	188
Teknik Penerbangan	189
Teknisi Perkebunrayaan	190
Teknisi Siaran	191
Teknisi Transfusi Darah	192
Terapis Wicara	193
Widyaiprada	194
Widyaiswara	195

Administrator Database Kependudukan

PERMENPAN-RB : Nomor 35 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017
 PERATURAN BKN : Nomor 16 Tahun 2018, Tanggal 27 September 2018

 Jabatan fungsional Administrator Database Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak utk megelola database kependudukan, jaringan komunikasi dan data kependudukan, aplikasi SIAK,

dan data warehouse

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi

dan data kependudukan, aplikasi SIAK, dan data warehouse

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor...

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUN JABATAN : Kekomputeran

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Dalam Negeri / Daerah Kabupaten/Kota

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Dukcapil utk angka kredit ADB Kependudukan Ahli Madya dibantu Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Bina Aparatur Dukcapil utk angka kredit ADB Kependudukan Ahli Pertama dan Ali Muda dilingkungan Kemendagri dibantu Tim Penilai Instansi

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Kepegawaian utk angka kredit ADB Kependudukan Ahli Pertama dan Ali Muda dilingkungan Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI :

ADB Kependudukan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

ADB Kependudukan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan ADB Kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Ahli	III/a	100		58 thn	1. berstatus PNS;	
	Pertama	III/b 150			 sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ DIVbidang komputer; 		
	Ahli Muda	III/c	200		58 thn	mengikuti dan lulus uji kompetensi; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam	
	Ami Pidda	III/d	300			1 (satu) tahun terakhir	
Keahlian		IV/a	400		60 thn	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama	
	Ahli	IV/b	/b 550 2. memiliki pengalaman di b teknologi informasi paling	teknologi informasi paling singkat 2 tahun;			
	Madya	IV/c	700			 nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2tahunterakhir berusia paling tinggi: 53tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda 	
						b. 55tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya	

Administrator Kesehatan

: Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000, Tanggal 22 Desember 2000 **KEPMENPAN-RB**

KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001, Tgl 30 Maret 2001

PENGERTIAN : Administrator Kesehatan adalah PNS yang diberi tugas, wewenang dan tanggung

jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi

program-program pembangunan kesehatan.

TUGAS POKOK : Melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan,

akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP 11 Tahun 2017 : Kementerian Kesehatan 7. INSTANSI PEMBINA

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat dan Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekjen Dep. Kesehatan dan Kesos bagi Administrator Kesehatan Madya dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pimpinan Unit/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes Provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota bagi Administrator Kesehatan Pertama dan Muda pada Dinkes Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Administrator Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli	III/a	100	Rp. 300.000	58 thn	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/DIV bidang kesehatan;
	Pertama	III/b	150			2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a;
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 thn	3. Diklat fungsional tk ahli; 4. Tersedia formasi; 5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
	Am Flada	III/d	300			sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
Keahlian	Ahli Madya	IV/a	400		60 thn	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
		IV/b	550			Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
		IV/c	700	Rp. 850.000		Memiliki pengalaman dalam pelayanan administrasi kesehatan paling kurang 2tahun; Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

Agen

: Nomor 31/KEP/M.PAN/5/2002, tql 31 Mei 2002 jo Permenpan-RB Nomor 5 Tahun 2016 PERMENPAN-RB

KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor KEP-027/1/2003 dan Nomor 03 Tahun 2003, Tanggal 31 Januari 2003

PENGERTIAN : Agen adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjwb, wewenang dan hak secara penuh

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan/atau operasi intelijen. : Melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta analisis produk

intelijen untuk memperoleh komponen - komponen strategis sebagai bahan kebijakan pemerintah serta mengamankan dan mensukseskan pelaksanaannya

: Nomor 48 Tahun 2007, Per ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 5. PERPRES TUNJANGAN

: PP 11 Tahun 2017 PERATURAN BKN 7. INSTANSI PEMBINA : Badan Intelijen Negara 8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan detektif

: PNS BIN 9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

4. TUGAS POKOK

a. Kepala BINatau Pejabat lain yang ditunjuk bagi Agen Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Kepala

b. Sekretaris Utama atau Pejabat lain yg ditunjuk bagi Agen Pelaksana-Penyelia dan Agen Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sesma

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:

Agen Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Agen Ahli dengan syarat:

a. Ijazah yang dimiliki sesuai tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan untuk Agen Ahli;

b. Paling kurang telah 1th dalam pangkat terakhir; c. Telah memiliki sertifikat keahlian untuk Agen Ahli;

d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan utk pangkat Penata Muda, golru III/a.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PEGANGKATAN KEMBALI:

Agen yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
		II/b	40	Rp. 240.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat		
	Pelaksana	II/c	60			Terampil: 1. Berijazah paling rendah DIIsesuai dgn		
		II/d	80			kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda		
Terampil	Pelaksana	III/a	100			Tingkat İ,Golru II/b;		
	Lanjutan	Ш/b	150	Rp. 300.000	58 th	3. Diklat fungsional Tkterampil; 4. Job training agen;		
	Penyelia	III/C	200			5. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam		
		III/d	300	Rp. 550.000	Rp. 550.000 58 th	satu tahun terakhir.		
	_	III/a 100		Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:				
	Pertama	Ш/b	150	Rp. 300.000	58 th	Berijazah paling rendah S.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan;		
		Ш/с	200	Rp. 750.000				Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol.Ruang III/a;
	Muda	III/d	300		58 th	3. Diklat fungsional Tk. Ahli;		
		IV/a	400			4. Job training agen; 5. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-		
Ahli	Madya	IV/b	550	Rp. 1.100.000	60 th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun		
Ailli	Madya	—	700	. 	oo ui	terakhir.		
		IV/c	700					
	Utama	IV/d	850		65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang inteligen paling singkat 3 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir		
		IV/e	1050					

Analis Anggaran

PERMENPAN-RB : Nomor 21 Tahun 2016, Tanggal 3 Nopember 2016 1. 2.

PERKA BKN : Nomor 14 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017

: Jabatan Fungsional Analis Anggaran adalah jabatan yang mempunyai ruang 3. **PENGERTIAN** lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan

analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN

: Melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan 4. TUGAS JABATAN

APBN

5. PERPRES TUNJANGAN

: PP Nomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP : Kementerian Keuangan **INSTANSI PEMBINA** 7. : Akuntan dan Anggaran **RUMPUN JABATAN** 8.

: PNS Kementerian Keuangan / Pusat LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analis Anggaran Madya/Ahli Madya dan Analis Anggaran Utama/Ahli Utama di lingkungan Kementerian Keuangan dan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Pusat.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analis Anggaran Pertama/Āhli Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda di ling Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penganggaran untuk angka kredit bagi Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Instansi.

11. UJI KOMPETENSI:

Analis Anggaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Anggaran yang diberhentikan karena point b s.d point de dapat diangkat kembali dalam jabatannya

menu	rut ketentuán y	ang ber	laku		•	, ,
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama/ Ahli Pertama	III/a III/b	100 150		58 th	Syarat pengangkatan peryama : 1. berstatus PNS 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
	Muda/Ahli Muda	III/c III/d	200 300		58 th	sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi, Administrasi, Hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan
Keahlian	Madya/Ahli Madya	IV/a IV/b	400 550 700		60 th	oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penganggaran; 6. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan 7. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
	IV/d 850 Utama/Ahli Utama IV/e 1050 Syarat penga 1. memenul pertama; 2. memiliki pengang paling sin 3. berusia pa a. 53tahi Pertam Muda; b. 55tahi Madya 4. Syarat laii	dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN paling singkat 2 (dua) tahun; 3. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki jenjang Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli				
		IV/e	1050			Muda; b. 55 tahun untuk menduduki jenjang Madya/Ahli Madya dan Utama; dan 4. Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina

Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Analis APBN)

PERMENPAN-RB : Nomor 39 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
 PERATURAN BERSAMA : Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,

tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN

dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RL

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis di bidang APBN.

5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20176. INSTANSI PEMBINA : Sekretariat Jenderal DPR RI

7. RUMPUN JABATAN : Manajemen

8. LINGKUP BERLAKU : PNS Sekretariat Jenderal DPRRI

9. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- c. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

10. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

- a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis APBN;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Ekonomi;
- c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Analis APBN;
- e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Analis APBN;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis APBN paling kurang 2 tahun;
- g. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
- h. usia paling tinggi:
 - 1) 53 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 55 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.

11. UJI KOMPETENSI:

Analis APBN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis APBN yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal / tahun	Batas Usia Pensiun
	Ahli Pertama	Ш/а	50	12,5	58 th
		Ш/b	50	12,5	
Ahli Muda Keahlian Ahli Madya	Ahli Muda	Ш/с	100	25	58 th
		Ⅲ /d	100	25	
		IV/a	150	37,5	
	Ahli Madya	IV/b	150	37,5	60 th
		IV/c	150	37,5	
	Ahli Utama	IV/d	200	50	65 th
	A III Juliu	IV/e	200	50	35 di

Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 33 Tahun 2018, Tanggal 9 Agustus 2018 jo Permenpan –RB Nomor 01 Tahun

2019, Tanggal 11 Februari 2019

2. PERATURAN BKN : Nomor 47 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung

jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis penyelidikan dan pembelaan

dalam rangka perlindungan dan pengamanan perdagangan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan analisis di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk

perlindungan dan pengamanan perdagangan

5. PERPRESTUNJANGAN :

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan
8. RUMPUN JABATAN : Hukum dan Peradilan

9. LINGKUP BERLAKU: Kementerian Perdagangan dan lembaga non struktural

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi pengamanan Perdagangan pada unit kerja JPT Madya yg membidangi pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan untuk Angka Kredit bagi Ahli Madya

b. Pejabat Administrator yg membidangi kepegawaian pada Unit Kerja JPT Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yg membidangi Perdagangan Luar Negeri kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan untuk Ahli Pertama dan Ahli Muda

11. KENAIKAN JABATAN

AIPP yang akan naik jabatan setiingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- 12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

AIPP yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
		III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik;
	Pertama	III/b	150		58 th	3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Hukum, Ekonomi, dan Hubungan Internasional; 5. mangilati dan lukus di kampatani talmia
	Muda III/c 200 S8 th kompetensi manajerial,dan i kultural sesuai dengan stand yang disusun oleh Instansi P 6. nilai prestasi kerja paling rer dalam 1 (satu) tahun terakhi IV/a 400 Madya IV/b 550 Madya IV/b 550 Syarat pengangkatan perpindah 1. memenuhi syarat pengangka 2. memiliki pengalaman di bida pengamanan perdagangan patahun; 3. nilai prestasi kerja paling kur dalam 2 (dua) tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki J AIPP Ahli Pertama dan Ah	5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi				
Keahlian		6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir				
		Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua)				
		IV/b	550		60 th	3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
		IV/c	700		60 th	AIPP Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional

PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2019, Tanggal 02 September 2019

2. PERATURAN BKN : Nomor

3. PENGERTIAN : Analis Kebakaran, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk

melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan

penyelamatan

5. PERPRESTUNJANGAN:.....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

11. KENAIKAN JABATAN

Analis Kebakaran yang akan naik jabatan setiingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Analis Kebakaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Neter It.	ian yang bena	aku.		1		,
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Pertama Muda Keahlian	III/a	50		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik;	
	Pertama	III/b	50		58 th	 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang Teknik/Rekayasa Keselamatan (Safety
		III/c	100		58 th	Engineering), Teknologi Rekayasa Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Engineering Technology), Planologi atau Geografi;
	Muda	III/d	100		58 th	5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
		IV/a	150		60 th	disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Madya	IV/b	150		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penyelamatan paling singkat 3 (tiga) tahunnilai prestasi kerja paling
		IV/c	150		60 th	kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 3. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya.
\						

Analis Kebijakan

: Nomor 45 Tahun 2013, Tanggal 4 Nopember 2013 **PERMENPAN-RB**

PERATURAN BERSAMA: Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014, Tanggal 21 Mei 2014

: Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yg PENGERTIAN

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk

melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat

dan Daerah. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 68 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Lembaga Administrasi Negara

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

: PNS Pusat / Daerah 9. LINGKUP BERLAKU

110. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Kepala LAN / Pejabat Eselon Iyg ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/as.d Utama, Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan LAN dan bagi Analis Kebijakan Madya, Pembina Tingkat I, golru IV/b s.d Utama, Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan instansi pusat dan instansi Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pimpinan Instansi Pusat atau Pejabat Eselon Ilyang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/a s.d Madya, Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi masing-masing dibantu Tim PenilaiInstansi

c. Sekda Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

 d. Sekda Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon IIyg ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Penata golongan ruang III/c.

- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Kebijakan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ D.IV 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
	Pertama	Ш/b	150			ruang III/a;
	Muda	III /c	200	Rp. 920.000	58 th	 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
	- Trada	III/d	300	кр. 920.000	50 (1)	dalam 1(satu) tahun terakhir.
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B;
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.150.000	60 th	 pangkat paling rendah Penata, golru III/ç lulus uji kompetensi; memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif;
Ahli		IV/c	700			 5. tersedia formasi utk jabatan Analis Kebijakan; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 7. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.685.000	65 th	Keterangan: 1. Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Magister (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golru III/b. 2. Bagi PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Muda, pangkat
		IV/e	1050	141 - 1333.000		

Analis Keimigrasian

1. PERMENPAN-RB : Nomor 47 Tahun 2018 Tanggal 10 Oktober 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 46 Tahun 2019 Tanggal

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis

dan ajudikasi di bidang keimigrasian.

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis keimigrasian.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 26 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

8. RUMPUN JABATAN : Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Angka Kredit bagi Analis Keimigrasian Ahli Utama;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk AK Analis Keimigrasian Ahli Pertama sampai dengan Analis Keimigrasian Ahli Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keimigrasian pada Kantor Wilayah Kemenkumham untuk AK Analis Keimigrasian Ahli Pertama sampai dengan Analis Keimigrasian Ahli Madya/Madya

11. UJI KOMPETENSI:

Analis Keimigrasian yang akan naik jenjang jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Keimigrasian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan

Analis Keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.

Analis	Inalis Keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku.									
l	Jenjang	Golru	Angka	Tunjangan	BUP	Pengangkatan Dalam				
Tingkat	Jabatan	Goil u	Kredit	Jabatan		Jabatan				
	Doubours	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;				
	Pertama	III/b	150	Rp. 540.000		memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani;				
	_	III/c	200			4. berijazah paling rendah S-1 (Strata- satu)/D4(Diploma-				
	Muda	III/d	300	Rp. 960.000	58 th	Empat) bidang keimigrasian, bidang sosial, atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;				
		IV/a	400			5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi				
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000		Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan				
		IV/c	700		60 th	6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari				
Ahli						jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di				
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.500.000		bidang penganalisisan dan pemeriksaan keimigrasian paling singkat 3 (tiga) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2				
				14. 1.500.000	65 th	(dua) tahun terakhir;				
					35 G .	4. berusia paling tinggi:				
		IV/e	1050			a. 53 thn untuk JF Analis Keimigrasian Ahli Pertama dan Ahli Muda:				
		,-				b. 55 thn untuk JF Analis Keimigrasian Ahli Muda; dan				
_						c. 60 thn untuk JF Analis Keimigrasian Ahli Utama				
)						bagi PNS yang menduduki JPT.				

Analis Kepegawaian

: Nomor PER/36/M.PAN/11/2006, Tgl 5 Mei 2014, jo PER/14/M.PAN/6/2008, Tgl 2 Juni 2008 : Nomor 67 Tahun 2006, Tanggal 29 Nopember 2006 jo Perka Nomor 34 Tahun 2014 PERMENPAN-RB

PEERATURAN BKN

: Analis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS. **PENGERTIAN**

: Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 17 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA** : Badan Kepegawaian Negara

RUMPUN JABATAN LINGKUP BERLAKU : Manajemen : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

TUGAS POKOK

a. Kepala BKN/Eselon Iyang ditunjuk bagi Madya pada BKN dan luar BKN dibantu TimPenilai Pusat

b. Sesma BKN/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon IIbagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Utama BKN

c. Kepala Kanreg BKN bagi Pertama dan Muda pada Kanreg masing-masing dibantu Tim Penilai Kanreg

d. Pimpinan Instansi Pusat / Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon IIbagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi

e. Sekda Provinsi/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon IIbagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama- Muda di Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

f. Sekda Kabupaten/Kota/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon IIbagi Pelaksana-Penyelia dan Pertama-Muda di Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

a. Analis Kepegawaian Keterampilan dapat diangkat menjadi Analis Kepegawaian Keahlian dengan syarat:

berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/ Diploma IV (D-IV) Ilmu Kepegawaian, Ilmu Manajemen, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, dan Ilmu Sosiologi.
 telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian Keahlian;

3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang disyaratkan; dan

4) tersedia formasi untuk jabatan fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.

b. Analis Kepegawaian Keterampilan yang akan diangkat menjadi Analis Kepegawaian Keahlian berikan angka kredit dari ijazah S1/DJV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65%dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan "pengembangan profesi dengan tidak pemperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

 b. diberhentikan sementara sebagai PNS; menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Kepegawaian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

j japatan	nya menurut	, ketentua	an yang i	репаки.	ı	1	
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 330.000	58th	Pengangkatan pertama kategori keterampilan:	
1	reiaksaila	II/d	80	кр. 550.000		1. berijazah paling rendah Diploma II(D-III): Ilmu Kepegawaian, Ekonomi Manajemen SDM,	
Matara manilan	Pelaksana	Ш/а	100	Rp. 420.000	58th	Manaiemen Administrasi, Administrasi	
Keterampilan	Lanjutan	Ш/b	150	кр. 420.000		Perkantoran, dan Kesekretariatan. 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c; 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling	
l	Demissis	Ш/с	200	D= 600,000	58th	rendah bernilai baik dalam 1th terakhir; dan 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional	
Penyelia	III/d	300	Rp. 600.000	36 01	Analis Kepegawaian Keterampilan.		
	Pertama	Ш/а	100	Rp. 480.000	58th	Pengangkatan pertama kategori keahlian: 1. berijazah paling rendah S1/DIVIlmu	
	reitama	III/b	150	Тф. 400.000		Kepegawaian, Manajemen, Politik, Administrasi Negara, Administrasi Publik, Hukum, Pemerintahan, Sosial Politik, Kebijakan Publik, Ekonomi Manajemen SDM, dan Sosiologi. 2. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1th terakhir; dan 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian	
		ш/с	200		58th		
Keahlian	Muda	III/d	300	Rp. 840.000			
l		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:	
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.080.000	60th	Memenuhi syarat pengangkatanpertama; Memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/pengembangan sistem	
5		IV/c	700			manajemen PNS paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir	

Analis Ketahanan Pangan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 38 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 47/Permentan/Kp.240/8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015, Tgl 18 Agustus 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan fungsional yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk

melaksanakan analisis ketahanan pangan dim lingkungan instansi Pusat dan Daerah

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis dibidang ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan,

dan pemanfaatan pangan.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 7 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUNJABATAN : IlmuHayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian / Daerah

10. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Ilmu Gizi/Teknologi Pangan;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Ketahanan Pangan; dan
- d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

11. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

- a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis Ketahanan Pangan;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/ Ilmu Gizi/Teknologi Pangan;
- c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Ketahanan Pangan;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis ketahanan pangan paling kurang 2th;
- f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; dan
- g. usia paling tinggi:
 - 1) 53 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2) 55 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya.

12. UII KOMPETENSI:

Analis Ketahanan Pangan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Jenjang Golru Angka Jumlah AK Jabatan Kredit Minimal per-tahun			Tunjangan	Batas Usia Pensiun	
	Alali Dartama	III/a	50	12,5	D., 540,000	FO# ₅	
Ahli Pertama	III/b	50	12,5	Rp. 540.000	58 th		
Ahli Muda Keahlian Ahli Madya	ALE M d.	Ш/с	100	25	D 050 000	58th	
	Anii Muda	III/d	100	25	Rp. 960.000	56 U1	
		IV/a	150	37,5			
	Ahli Madya	IV/b 150		37,5	Rp. 1.260.000		
		IV/c	150	37,5			

Analis Keuangan Pusat dan Daerah

: Nomor 42 Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober 2014 **PERMENPAN-RB**

PERATURAN BERSAMA: Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015, Tanggal 9 April 2015

: Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah jabatan fungsional PENGERTIAN yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk

melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat

dan Daerah

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 8 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. : PPNomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP : Kementerian Keuangan 7. **INSTANSI PEMBINA** : Akuntan dan Anggaran RUMPUNJABATAN

LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan / Daerah

10. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/ keuangan/hukum/administrasi atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
- d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

11. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

- a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ekonomi/ keuangan/hukum/ administrasi atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis keyangan pusat dan daerah paling kurang 2th:
- g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2th terakhir; dan
- h. usia paling tinggi:
 - 1) 53 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 - 2) 55 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;

Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali

<u>l</u> dalan	dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku										
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun					
	Ahli Pertama	III/a	50	12,5	Rp. 540.000	58th					
		III/b	50	12,5	кр. 5-ю.ооо	35ti					
	Ahli Muda	III/c	100	25	Rp. 960.000	58th					
	Amrida	III/d	100	25	кр. 900.000						
Keahlian		IV/a	150	37,5							
	Ahli Madya	IV/b	150	37,5	Rp. 1.260.000	60 th					
		IV/c	150	37,5							
	Ahli Utama	IV/d	200	50	Pn 1 500 000	65 th					
	Anii Utama		200	50 Rp. 1.500.000							

Analis Pasar Hasil Perikanan

PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2013 Tanggal 24 Juli 2013

Nomor 1/PERBER-MKP/2014dan Nomor 7 Tahun 2014, Tanggal 27 Maret 2014 PERATURAN BERSAMA

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup **PENGERTIAN** tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan

pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan

PERPRESTUNJANGAN

PERATURAN BUP 6.

PPNomor 11 Tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan INSTANSI PEMBINA

RUMPUN JABATAN Ilmu Hayat

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Pejabat eselon Iyang membidangi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi APHP Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kementerian KP, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
- b. Sekdirien Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagi APHP Pemula s.d Penyelia dan APHPi Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golru III/as.d Ahli Madya pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
- c. Pejabat eselon Ilyang membidangi perikanan Provinsi bagi APHPi Pemula s.d Penyelia dan APHPi Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- d. Pejabat eselon Ilyang membidangi perikanan Kabupaten/Kota bagi APHPi Pemula s.d Penyelia, dan APHPi Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kab/Kota

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN:

- a. Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang memperoleh ijasah S1/D.IV dapat diangkat dalam jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
 - 2) ljazah yang dimiliki sesuai dengan kualilikasi yang ditentukan untuk jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli;
 - telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang analisis pasar hasil perikanan keahlian; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- b. Analis Pasar Hasil Perikanan Keterampilan yang akan beralih menjadi Analis Pasar Hasil Perikanan Keahlian diberikan angka kredit sebesar 69% angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ljazah sarjana (S1)/Diploma IVyang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

12. UJI KOMPETENSI:

Analis Pasar Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Pasar Hasil Perikanan yang diberhentikan karena poin e s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

ketentuan ya	ketentuan yang berlaku										
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan					
	Pelaksana Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama kategori keterampilan: 1. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan					
		II/b	40		58th	Menengah (SUPM)/atauSekolah Menengah					
	Pelaksana	II/c	60			Kejuruan (SMK) di bidang perikanan dan/atau					
Keterampilan		II/d	80			kelautan;					
	Pelaksana	III/a	100		58th	pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan					
	Lanjutan	III/b	150		36 01	ruang II/a;					
	D	Ш/с	200		58th	3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik					
	Penyelia	III/d	300		58 tn	dalam 1 (satu) tahun terakhir					
	Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama kategori keahlian: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IVdi bidang perikanan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Menteri KP					
	Pertama	Ш/b	150) Soui						
	Muda	Ш/с	200		58th	2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik					
	Piuua	III/d	300			dalam 1 (satu) tahun terakhir					
Keahlian		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatanpertama;					
	Madya	IV/b	550		60th	memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil perikanan paling kurang 2 (dua) tahun; telah mengikuti dan lulus pendidikan dan					
		IV/c	700			pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasi perikanan; 4. usia paling tinggi 50 tahun					

7.

Analis Pasar Hasil Pertanian

PERMENPAN-RB

PENGERTIAN

PERATURAN BERSAMA

Nomor 6 Tahun 2012, Tanggal 21 Pebruari 2012 Nomor 59/PERMENTAN/OT.140/9/2012 dan Nomor 10 Tahun 2012, Tgl 21 September 2012 Jabatan

fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yg diduduki oleh PNS

TUGAS POKOK

Menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang

analisis pasar hasil pertanian Nomor 6 Tahun 2014, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERPRESTUNJANGAN 5

PERATURAN BUP 6.

PPNomor 11 Tahun 2017 : Kementerian Pertanian

INSTANSI PEMBINA 8. **RUMPUN JABATAN**

: Ilmu Hayat

LINGKUP BERLAKU 9

PNS Kementerian Pertanian / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi APHP Madya pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

- Pejabat eselon IIyang membidangi pemasaran domestik di Kementerian Pertanian, bagi APHP Pelaksana s.d Penyelia, dan APHP Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian dibantu Tim Penilai
- c. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana s.d Penyelia, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- d. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana s.d Penyelia, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKATAHLI:

- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang memperoleh ijazah S1/DJV dapat diangkat dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
 - 2) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
 - 3) telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian; dan

4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

b. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang akan beralih menjadi Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli diberikan angka kredit sebesar 69% angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit liazah sarjana (S1)/Diploma IVyang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

UJI KOMPETENSI:

Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN: 13.

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Pasar Hasil Pertanian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam iabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Javatai	<u>IIIya IIIEHULULN</u>	sterituari y	<u>rang benar</u>	<u>,u</u>		
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat terampil:
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 300.000	58th	Berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (STR) / dan atau Sekolah
		II/d	80	1		Pembangunan (SPP)/ dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
Terampil	Pelaksana	III/a	100	Rp. 350.000	58th	2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I,
	Lanjutan	III/b	150	кр. 530.000	36 U 1	golongan ruang II/b; 3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 450.000	58th	dalam 1(satu) tahun terakhir;
	renyena	III/d	300	, Kp. 430.000	35 U	
	Pertama	III/a	100	Rp. 400.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat ahli: 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV
	retaina	III/b	150	кр. 400.000	,	di bidang pertanian
	Muda	Ш/с	200	Rp. 650.000		Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
	Muud	III/d	300	, kh. 030.000	58th	dalam 1 tahun terakhir
Ahli		IV/a 400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:	
,	Madya	IV/b	550	Rp. 900.000	60 th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil pertanian paling kurang 2tahun; Telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian; Usia paling tinggi 50 tahun.
		IV/c	700			

Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan

PERMENPAN-RB : Nomor 50 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
 PERATURAN BKN : Nomor 14 Tahun 2019, Tanggal 10 September 2019

3. PENGERTIAN : Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko Keuangan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis di Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan

5. PERPRESTUNJANGAN:

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Ahli Madya dan Ahli Utama
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kesekretariatan pad Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi madya yang membidangi Unit Pengelolaan Unit Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk Angka Kredit bagi Ahli Pertama dan Ahli Muda.

11. KENAIKAN JABATAN

Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;
returna	III/b	150		58 th	memiliki integritas dan moral yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi, Administrasi Hukum Teknik dan MTPA:	
	Muda	III/c	200		58 th	Administrasi, Hukum, Teknik, dan MIPA; mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh
_	Fluud	III/d	300		Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah be	Instansi Pembina; dan
Keahlian		IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
	Madya	IV/b	550		60 th	 memiliki pengalaman di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
l Hrs	Utama	IV/c	700		60 th	berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Pertama dan Ahli Muda;
	Cama	IV/d	850		65 th	 b. 55 tahun utk menduduki JF Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Madya; dan c. 60 tahun untuk JF Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan yg telah menduduki Jabatan Pimpinan
		IV/e	1050		65 th	Tinggi

Analis Pengelolaan Keuangan APBN

PERMENPAN-RB : Nomor 53 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
 PERATURAN BKN : Nomor 19 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019

3. PENGERTIAN : Analis Pengelolaan Keuangan APBN adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan analisis Pengelolaan Keuangan APBN pada satuan kerja kementerian/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN yg meliputi perikatan dan

penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran dan analisi aporan keuangan instansi.

5. PERPRESTUNJANGAN :

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Madya di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Pusat; dan
- c. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di Instansi Vertikall.

11. KENAIKAN JABATAN

Analis Pengelolaan Keuangan APBN yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Analis Pengelolaan Keuangan APBN yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik;
		III/b	150		58 th	sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi, Keuangan,
Keahlian	Muda	III/c	200		58 th	Akuntansi, Manajemen, Administrasi, Hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yg relevan dan ditentukan oleh instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
		III/d	300		58 th	manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	.	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang Pengelolaan APBN paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua)
	Madya	IV/b	550		60 th	tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analis Pengelolaan Keuangan
		IV/c	700		60 th	APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahl Madya

Analis Perbendaharaan Negara

PERMENPAN-RB : Nomor 52 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
 PERATURAN BKN : Nomor 13 Tahun 2019, Tanggal 10 September 2019

3. PENGERTIAN : Analis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak untuk melakukan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dan pembinaan

pengelola perbendaharaan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara,

sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, analisis

laporan keuangan BUN, dan pembinaan pengelola perbendaharaan.

5. PERPRESTUNJANGAN:

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

 a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJPB Kementerian Keuangan;

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kesekratariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat DJPB Kementerian Keuangan; dan

c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pertama dan Ahli Muda di Kantor Wilayah DJPB Kementerian keuangan.

11. KENAIKAN JABATAN

Analis Perbendaharaan Negara yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Analis Perbendaharaan Negara yang diberhentikan karena point b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
		III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik;
	Pertama	III/b	150		58 th	Trei miki integritas dari moral yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ekonomi, Administrasi,
	Muda -	III/c	200		58 th	Hukum, Teknik, dan MIPA; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi
	Muda	III/d	300		58 th	manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
Keahlian	nn	IV/a	400		60 th	terakhir Syarat pengangkatan perpindahan jabatan:
	Madya	IV/b	550		60 th	memenuhi syarat pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara , sistem manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU,
		IV/c	700		60 th	analisis laporan keuangan BLU,dan/atau pembinaan pengelola erbendaharaan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
	Litama	IV/d	850		65 th	Third presents regarded painty security bernial baix datam I (sadi) datam let aki iii, berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama Ahli Muda
	Utama	IV/e	1050		65 th	b. 55 tahun utk menduduki JF Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan c. 60 tahun untuk JF Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama untuk PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi

Analis Perkarantinaan Tumbuhan

: Nomor 15 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018 : Nomor 42 Tahun 2019, Tanggal ... **PERMENPAN-RB**

PERATURAN BKN

: Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki **PENGERTIAN** PNSdan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melaksanakan tugas analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan

keamanan hayati nabati

TUGAS JABATAN Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan

keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERPRESTUNJANGAN

: PP Nomor 11 Tahun 2017

PERATURAN BUP : Kementerian Pertanian **INSTANSI PEMBINA**

: Ilmu Hayat **RUMPUN JABATAN**

LINGKUP BERLAKU PNS Kementerian Pertanian

10. PEJABAT YG MENETAPKAN PAK:

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama; dan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama s.d Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya

11. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/proteksi tanaman, mikrobiologi dan patologi tumbuhan;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
- nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

12. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik; b.
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang Pertanian bidang hama penyakit tumbuhan/ proteksi tanaman,
- mikrobiologi, dan patologi tumbùhan; mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling sedikit 2 (dua) tahun; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- berusia paling tinggi:
 - 53 th bagi PNSyg akan menduduki Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Madya; dan
 55 th bagi PNSyg akan menduduki Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama bagi [53th bagi PNSyg akan menduduki Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama dan Ahli Muda;

 - 3) 60th bagi PNSyg akan menduduki Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Utama bagi PNSyg telah menduduki JPT

13. UJI KOMPETENSI:

Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

- 14. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

15. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM: JABATAN

Analis Perkarantinaan Tumbuhan yang diberhentikan karena poin b sd point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit setiap tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	
	ALE Davidance		50	12,5		Foul	
Ahli Pertama	III/b	50	12,5]	58th		
Al	Ahli Muda	Ш/с	100	25		58th	
	Ariii Muda	III/d	100	25		36 U 1	
Keahlian		IV/ 150		37,5			
	Ahli Madya	ladya IV/b		37,5]	60th	
		IV/c	150	37,5]		
Ī	Ahli Utama	IV/d	200	50		65 46	
	Ailii Utama	IV/e	200	50	1	65th	

Analis Perkebunrayaan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 32 Tahun 2018, Tanggal 09 Agustus 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 45 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Analis Perkebunrayaan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan analisis

perkebunrayaan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan analisis perkebunrayaan ya meliputi perencanaan dan

pengembangan koleksi tumbuhan, perawatan koleksi, pembuatan desain lanskap taman dan

pengembangan kawasan konservasi tumbuhan

5. PERPRESTUNJANGAN: Nomor......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : LIPI

8. RUMPUNJABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Pusat dan Instansi Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Tim Penilai Pusat Kepala LIPI atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg ditunjuk pada LIPI untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli
 Madya di lingkungan LIPI, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi

- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pada LIPIuntuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Muda di lingkungan Lmebaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- c. Tim penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Provinsi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- d. Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama dan Ahli Muda di Iingkungan Perguruan Tinggi

11. KENAIKAN JABATAN

Analis Perkebunrayaan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Analis Perkebunrayaan yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100 150		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang kehutanan, pertanian,
Keahlian	Muda	III/c	200	200 58 th biologi dan arsitektur oleh instansi Pembin 5. mengikuti dan lulus d	biologi dan arsitektur lanskap atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi	
	Pidda	III/d	300		58 th	manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang Perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 2 (dua)
		IV/b	550		60 th	tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Analis Perkebunrayaan Ahli
		IV/c	700		60 th	Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki JF Analis Perkebunrayaan Ahlil Madya.

Analis Pertahanan Negara

PERMENPAN-RB : Nomor 7 Tahun 2016, Tanggal 30 Juni 2016

2. PERATURAN BKN : Nomor 19 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan analisis

kegiatan analisis pertahanan negara

4. TUGAS JABATAN : Melakukan analisis pertahanan negara untuk mendukung sistem keamanan negara

5. PERPRES TUNJANGAN:

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertahanan

8. RUMPUN JABATAN: Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertahanan / Pusat

10. PENETAP PAK ANALIS PERTAHANAN NEGARA

a. Tim Penilai Kementerian bagi Analis Pertahanan Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan.

b. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Analis Pertahanan Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan.

c. Tim Penilai Instansi bagi Analis Pertahanan Negara di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Pertahanan.

11. UJI KOMPETENSI:

Analis Pertahanan Negara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan iabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Pertahanan Negara yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam JF Analis Pertahanan Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Pertama/Ahli	III/a	100		58 th	Syarat Pengangkatan Pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang
	Pertama	Ш/ь	150			 baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) dgn kualifikasi pendidikan yg ditentukan oleh Instansi Pembina; mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pertahanan negara; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: memenuhi syarat pengangkatan pertama angka 1, 2, 3, 4 dan angka 6; memiliki pengalaman di bidang pertahanan negara paling singkat 2 th; Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan berusia paling tinggi: 53 tahun untuk Analis Pertahanan Negara Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda; 55 tahun untuk Analis Pertahanan Negara Madya/Ahli Madya;
	Muda/Ahli	III/c	200		58th	
	Muda	III/d	300		36 U1	
	Madya/Ahli Madya	IV/a	400		60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Analis Transaksi Keuangan

PERMENPAN-RB : Nomor 2 Tahun 2018, Tanggal 3 Januari 2018
 PERATURAN BKN : Nomor 6 Tahun 2018, Tanggal 19 April 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan analisis

transaksi keuangan

4. PERPRESTUNJANGAN :

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : PPATK

8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan Detektif

9. LINGKUP BERLAKU : PNS PPATK

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Kepala PPATK atau JPT Madya untuk angka kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Utama di lingkungan PPATK dibantu Tim Penilai PPATK.

 Sekretaris Utama PPATK untuk angka kredit bagi Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama sd Ahli Madya di lingkungan PPATK dibantu Tim Penilai PPATK.

11. UJI KOMPETENSI:

Analis Transaksi Keuangan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Analis Transaksi Keuangan yg diberhentikan karena point b s.d point e dapat diangkat kembali dlm jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;
	74III Ci Cairic	III/b	150			2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;
	Ahli Muda	III/c	200		58 th	3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana
	Ailli Muda	III/d	300		5501	(S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi,
	Ahli Madya	IV/a	400			keuangan, akutansi dan hukum atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
		IV/b	550	60 th	5. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan	
		T//c	700			6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Keahlian		IV/d	850		jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengertama; 2. memiliki pengalaman di bid transaksi keuangan paling s 3. berusia paling tinggi: a. 53 tahun untuk mendudu Ahli Pertama dan Ahli M b. 55 tahun untuk mendudu Ahli Madya; dan c. 60 th utk menduduki jenj	 memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang analisis transaksi keuangan paling singkat 2 th;
	Ahli Utama	IV/e	1050			 a. 53 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 tahun untuk menduduki jenjang Ahli Madya; dan c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki

Apoteker

PERMENPAN-RB : Nomor PER/07/M.PAN/4/2008, Tanggal 15 April 2008

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 1113/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 26 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008

PENGERTIAN : Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan

dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara

penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja

kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan

pelayanan farmasi khusus

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes atau pejabat eselon IIbagi Apoteker Utama dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan kefarmasian Depkes bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
- c. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi
- d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi
- e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Apoteker Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI ASISTENAPOTEKER KEAPOTEKER

a. Asisten Apoteker yang memperoleh Ijazah Apoteker dapat diangkat menjadi Apoteker dengan syarat:

1) Tersedia formasi dalam jabatan Apoteker;

- 2) Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir,
- 3) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jabatan/pangkat terakhir;
- 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 th terakhir.
- b. Asisten Apoteker yang akan beralih menjadi Apoteker diberikan angka kredit dari ijazah Apoteker ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Apoteker yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Apoteker sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	ш/ь	150	Rp. 325.000	58th	Svarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah Apoteker.
	Muda	Ш/с	200	Rp. 750.000	58th	 Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TKI,Golongan Ruang III/b Tersedianya formasi Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang kefarmasian paling kurang 2 tahun;
	Muua	III/d	300	кр. / 30:000	3501	
~		IV/a	400		60 th	
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.200.000		
		IV /c	700			
	Litama	IV/d	850	Pn 1 400 000	65 th	
_	Utama	Utama IV/e 1050	Rp. 1.400.000	3341	3. Berusia paling tinggi 50 tahun.	

Arsiparis

PERMENPAN-RB : Nomor 48 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014 jo Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2016

PERATURAN BKN Nomor 24 Tahun 2016, Tanggal 23 desember 2016

PENGERTIAN Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab,

dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatanpengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsipstatis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi

5 PERPRESTUNIANGAN : Nomor 15 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 6.

INSTANSI PEMBINA : Arsip Nasional Republik Indonesia 7

RUMPUN JABATAN : Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PNSPusat / Daerah

10. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

A. Kategori Keterampilan

1) berijazah Diploma III(DIII) bid.kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh instansi pembina;

2) pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c

nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

11. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

A. Kategori Keterampilan

1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional

Arsiparis Kategori Keterampilan; berijazah DIIIbid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh instansi pembina;

- 3) pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c
- 4) memiliki pengalaman dibidang kearsipan paling kurang 2 th; mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan

fungsional Arsiparis;

nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

B. Kategori Keahlian

- 1) berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh instansi pembina;
- pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- 3) nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terákhir

B. Kategori Keahlian

tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian;

berijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV (D.IV) bid. kearsipan atau bid. ilmu lain yg ditentukan oleh

instansi pembina; pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;

memiliki pengalaman dibidang kearsipan paling kurang 2th

5) mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan fungsional Arsiparis;

nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

7) Usia paling tinggi 3th sebelum mencapai BUP. 12. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN Arsiparis Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/DIV dapat diangkat dalam Arsiparis Keahlian dgn syarat:

a. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keahlian; b. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Arsiparis; dan

c. lulus sertifikasi kompetensi Penjenjangan Jabatan Arsiparis.

13. UJI KOMPETENSI

Arsiparis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

14. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP ɗan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

15. PENGANGKATAN KEMBALI

Arsiparis yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Arsiparis sesuai ketentuan yang

<u>berlaku</u> Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka	Jumlah	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
	Terampil/ Pelaksana	II/c	20	5	Rp. 350.000	58 th
	Pelaksana	II/d	20	5	Τφι 550.000	
Keterampilan	Mahir/ Pelaksana	III/a	50	12,5	Rp. 420.000	58th
Receiamplian	Lanjutan	III/b	50	12,5	- кр. +20.000	36 U1
	Penyelia	III/c	100	25	Rp. 700.000	58 th
		III/d	100	25	- Тф. 700.000	
	Ahli Pertama/ Pertama	III/a	50	12,5	Rp. 520.000	58 th 58 th
		III/b	50	12,5	- Ιφ. 320.000	
	Ahli Muda/	III/c	100	25	Rp. 800.000	
	Muda	III/d	100	25	Τφ. 000.000	
Keahlian		IV/a	150	37,5		
	Ahli Madya/ Madya	IV/b	150	37,5	Rp. 1.100.000	60 th
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama/	IV/d	200	50	Rp. 1.300.000	65 th
\	Utama	IV/e	200	50		3541 /

Asesor Manajemen Mutu Industri

PERMENPAN-RB : Nomor 45 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
 PERATURAN BKN : Nomor 20 Tahun 2016, Tanggal 26 Agustus 2016

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri adalah jabatan fungsional tertentu yg

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah

4. TUGAS JABATAN : Melakukan asesmen sistem manajemen mutu industri.

5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20176. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perindustrian

7. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan
 8. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perindustrian / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Kementerian Perindustrian untuk Asesor Manajemen Mutu IndustriAhli Pertama s.d Ahli Utama yang bekerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Instansi Pusat di luar Kementerian Perindustrian
- b. Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama s.d Ahli Utama yang bekerja di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota.

11. UII KOMPETENSI:

Asesor Manajemen Mutu Industri yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asesor Majanemen Mutu Industri yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asesor Manajemen Mutu Industri sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal/thn	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli	III/a	50	12,5	58th	Syarat Pengangkatan Pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana
	Pertama	ш/ь	50	12,5	302.	(S1)/ Diploma IV (D-IV) bidang teknologi/ manajemen industri; 2. pangkat paling rendah Penata
	Ahli Muda	ш/с	100	25	58th	Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asesor Manajemen
		III/d	100	25		Mutu Industri; dan 4. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. tersedia lowongan formasi untuk
Keahlian		IV/b	150	37,5		jabatan Asesor Manajemen Mutu Industri; 2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (D-IV) bidang teknologi/manajemen industri; 3. pangkat paling rendah Penata TKI, golru III/d; 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri paling kurang 2 (dua) tahun; 5. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asesor Manajemen Mutu Industri; 6. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 7. usia paling tinggi 57 tahun.
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV/d	200	50	CF#	
		IV/e	200	50	65 th	

Asisten Apoteker

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/08/M.PAN/4/2008, Tanggal 15 April 2008

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008

3. PENGERTIAN : Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS

dgn hak dan kewajiban yg diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana

kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan

pelayanan farmasi klinik.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

: a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan kefarmasian bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal

b. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penvelia dibantu Tim Penilai Instansi

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan iabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Apoteker yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Apoteker sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah Asisten Apoteker	
		II/b	40			2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan	
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 240.000	58 th	Ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya	
Terampil		II/d	80			bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
Terampii	Pelaksana	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di	
	Lanjutan	Ш/ь	150	кр. 205.000	38 U		
	Penyelia	Ш/с	200	- Rp. 500.000	58 th	bidang penyiapan pekerjaan kefarmasian paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 th	
	. Syona	III/d	300	. 4. 230,000			

Asisten Inspektur Angkutan Udara

PERMENPAN-RB : Nomor 60 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018

PERATURAN BKN : Nomor 36 Tahun 2019, Tanggal...

3. PENGERTIAN : Asisten Inspektur Angkutan Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk

melakukan pengelolaan teknis di bidang angkutan udara.

: Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan **TUGAS POKOK**

pengawasan di bidang penyelenggaraan angkutan udara.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK

Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk AK bagi Asisten Inspektur Angkutan Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

11. KENAIKAN JABATAN

Asisten Inspektur Angkutan Udara ya akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DLAM JABATAN

Asisten Inspektur Angkutan Udara yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam iahatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

<u> </u>	iya sesuai k	<u>etentuan yang</u>	g beriaku.			
Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani;
	Terampil	II/d	80		58 th	berijazah paling rendah D-2 di bidang ekonomi, manajemen transportasi, statistik, komputer atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina;
Keterampilan		Ш/а	100		58 th	mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Mahir	Ш/ь	150		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. berijazah paling rendah D-3 di bidang ekonomi, manajemen transportasi,
	Penyelia	III /c	200		58 th	statistik, komputer atau kualifikasi lain yang ditetapkan oleh instansi Pembina; 3. memiliki pengalaman di bidang angkutan udara paling sedikit 2 (dua) tahun; 4. memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang angkutan udara;
		Ш/d	300		58 th	 5. Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 6. berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF Asisten Inspektur Angkutan Udara
	-			•		

Asisten Inspektur Bandar Udara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 58 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 35 Tahun 2019, Tanggal...

3. PENGERTIAN : Asisten Inspektur Bandar Üdara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan keselamatan operasi bandar

udara serta peningkatan pelayanan di bidang kebandarudaraan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian dan

pengawasan keselamatan operasi serta peningkatan pelayanan di bidang

Kebandarudaraan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK

Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil sampai Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

11. KENAIKAN JABATAN

Asisten Inspektur Bandar Udara yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- 12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Asisten Inspektur Bandar Udara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembal dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan		II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik;
	Terampil	II/d	80		58 th	3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi atau
	Mahir	Ш/а	100		58 th	manajemen transportasi; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		ш/ь	150		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik mesin,
	Penyelia	Ш/с	200		58 th	teknik geodesi, ekonomi akuntansi atau manajemen transportasi; 3. memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;
		Ⅲ/d	300		58 th	memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang angkutan udara; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF Asisten Inspektur Bandar Udara

Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 56 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 33 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengelolaan teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan teknis pengaturan, pengendalian, pengawasan

dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo

dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat.

5. PERPRESTUNJANGAN: Nomor....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK

Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan di lingkungan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

11. KENAIKAN JABATAN

AIKP yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat

1	kembali d	dalam jabat	annya sesuai	<u>ketentuan</u>	yang berlaku	l.	
	Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
		П/Ь	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik;	
	Terampil	II/c	60		58 th	3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah D-2 di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu	
l			II/d	80		58 th	pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK-
l	Keterampilan	Mahir	III/a	100		58 th	PPK); dan 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		ш/ь	150		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. berijazah paling rendah D-3 di bidang teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik kimia, komputer, matematika dan ilmu	
l		Penyelia	Ш/с	200		58 th	pengetahuan alam, ekonomi, manajemen transportasi, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PK- PPK);
			Ш/d	300		58 th	 memiliki pengalaman di bidang keamanan paling sedikit 2 (dua) tahun; memiliki sertifikat Inspector Training System (ITS) di bidang angkutan udara; Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berusia paling tinggi 53 tahun utk menduduki JF Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan

: Nomor 10 Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018 PERMENPAN -RB : Nomor 5 Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018 PERATURAN BKN

: Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang 3. PENGERTIAN mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian

mutu dan keamanan hasil perikanan.

: Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu **TUGAS JABATAN**

dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan.

PERPRES TUNJANGAN

: PP Nomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP

6. : Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. INSTANSI PEMBINA

: Ilmu Hayat 8. RUMPUN JABATAN

: PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Keria.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada badan yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Keria

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan:
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan iabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat

kembali	dalam jabat	annya se	esuai keté	ntuan yang berl	aku.	, , , ,
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;
	Terampil	II/c	60		58th	 memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani;
		II/d	80			4. berijazah paling rendah DII atau paling tinggi DIII bid perikanan atau kualifikasi
	Mahir	III/a	100		58 th	pendidikan lain yg ditentukan oleh Instansi Pembina;
Keterampilan		Ш/ь 150	150			5. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
	Penyelia	Ш/с	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang
				300		30 U I

Asisten Konselor Adiksi

PERMENPAN-RB : Nomor 45 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
 PERATURAN BERSAMA : Nomor 16 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019

3. PENGERTIAN : Asisten Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional

Asisten Konselor Adiksi

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi bagi pecandu,

penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan

zat adiktif lainnya.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Badan Narkotika Nasional

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan dan/atau Ilmu sosial

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat dan Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi jabatan fungsional Asisten Konselor Adiksi untuk Angka Kredit bagi Asisten Konselor Adiksi Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi jabatan fungsional Asisten Konselor Adiksi untuk Angka Kredit bagi Asisten Konselor Adiksi Terampil dan Mahir di lingkungannya.

11. KENAIKAN JABATAN

Asisten Konselor Adiksi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Asisten Konselor Adiksi yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang	Golru	Angka	Tunjangan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Jabatan		Kredit	Jabatan		
		II/b	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS; 2.Memiliki integritas dan moralitad yg
	Terampil	II/c	60		58 th	baik; 3. berijazah paling rendah D-3 bidang Ilmu Kesehatan dan/atau Ilmu Sosial;
		II/d	80		58 th	4.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
Keterampilan	Mahir	III/a	100		58 th	dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 5.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/b	150		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama:
		III/c	200		58 th	2.memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi paling sedikit 2 (dua) tahun; 3.nilai prestasi kerja paling kurang
	Penyelia	III/d	300		58 th	bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 4.berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki JF Asisten Konselor Adiksi Terampil dan Asisten Konselor Adiksi Mahir; dan b. 55 tahun utk menduduki JF Asisten Konselor Adiksi Penyelia.

Asisten Pelatih Olahraga

PERMENPAN-RB
 Nomor 41 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
 PERKA BKN
 Nomor 39 Tahun 2015, Tanggal 9 Oktober 2015

3. .PENGERTIAN : Jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab,

dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan

instansi Pusat dan Daerah

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLP,

PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga

setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki

4. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

5. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pemuda dan Olahraga

6. RUMPUN JABATAN : Rumpun Pendidikan lainnya

7. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat / Daerah

8. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

a. berijazah paling rendah SMA atau sederajat;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih Olahraga; dan

d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

9. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

- a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Asisten Pelatih Olahraga;
- b. berijazah paling rendah SMA atau sederajat;
- c. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Asisten Pelatih Olahraga;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5 tahun;
- f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2tahun terakhir; dan
- g. usia paling tinggi 45 tahun.

10. UJI KOMPETENSI:

Asisten Pelatih Olahraga yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Pelatih Olahraga yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Pelatih Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah **Batas Usia** Golonga Angk Kategori Jenjang Jabatan **Angka Kredit Minimal** Pensiun per-tahun Kredit Ruang II/a **15 Pemula** 3,75 58 th II/b 20 5 II/c 20 5 58 th **Terampil** II/d 5 20 III/a **50** 12,5 Keterampilan **Mahir** 58 th Ш/b **50** 12,5 III/c 100 25 58 th **Penyelia** Ш/d 100 25

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

PERMENPAN-RB
 Nomor 23 Tahun 2016, Tanggal 9 Nopember 2016
 PERKA BKN
 Nomor 6 Tahun 2017, Tanggal 12 April 2017

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melakukan

kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM
8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial dan yang berkaitan
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas IIKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk angka kredit bagi Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dlm jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. mempunyai minat, perhatian, dan
Keterampilan	Pelaksana/ Terampil	II/c	60		58 th	dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta pelindungan anak;
		II/d	80			 memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah SMU/SMK/ sederajat; telah mendapatkan kenaikan pangkat bagi yang berijasah SMU/SMK/sederajat; mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keterampilan di bidang bimbingan kemasyarakatan; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100			
		Ш/ь	150		58 th	
	Penyelia	Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
		Ш/d	300		58th	 memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling singkat 2 (dua) tahun; berusia paling tinggi 55 tahun

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

PERMENPAN-RB
 Nomor 7 Tahun 2018, tanggal 26 Januari 2018
 PERATURAN BKN
 Nomor 4 Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu

dan keamanan hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan.

5. PERPRES TUNJANGAN :

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. RUMOUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sd Penyelia, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Pusat
- Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sd Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil sd Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALÍ:

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d poind e, dpt diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

diangka	diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.										
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan					
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;					
	Terampil	П/с	60		58 th	 memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Diploma II(D II) 					
		II/d	80			atau paling tinggi Diploma III(D.III)di bdg perikanan dan kelautan, biologi, kimia,					
	Mahir	III/a	100		58 th	teknologi/ilmu pangan, dan ilmu gizi; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;					
Keterampilan		Ш/ь	150			6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir					
	Penyelia	Ш/с	200		58 th	 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; Memiliki pengalaman di bidang pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 th; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2tahun terakhir Berusia paling tinggi 53th 					
		III/d	300								

Asisten Penata Anestesi

PERMENPAN-RB
 Nomor 10 Tahun 2017, Tanggal 29 Maret 2017
 PERATURAN BKN
 Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan

anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan

4. TUGAS JABATAN : Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c s.d Asisten Penata Anestesi Penyelia pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat
- b. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Asisten Penata Anestesi Penyelia pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
- c. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi, bagi:
 - 1) Asisten Penata Anestesi Penyelia, pangkat Penata, golru III/cpada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.
 - 2) Asisten Penata Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Asisten Penata Anestesi Penyelia, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.
- d. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Asisten Penata Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Asisten Penata Anestesi Penyelia pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTDDaerah Provinsi
- e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Asisten Penata Anestesi Penyelia, di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
- f. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Asisten Penata Anestesi Terampil/Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Asisten Penata Anestesi Penyelia, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai UPTD Kab/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Penata Anestesi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Penata Anestesi yang diberhentikan dari jabatannya karena point b sd point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Penata Anestesi sesuai ketentuan yang berlaku.

Asisten Pen	Asisten Penata Anestesi sesuai ketentuan yang berlaku.										
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan					
	Pelaksana/	П/с	60		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;					
	Terampil	II/d	80			 sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Diploma III(D-III) keperawatan anestesi atau kepenataan anestesi; 					
	Pel Lanjutan/	Ш/а	100 5. mengikúti dan lulus pendidikan d (diklat) fungsional di bidang pela anestesi;	5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pelayanan anestesi;							
	Mahir	Ш/ь	150		36 U I	 memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); nilai prestasi kerja paling rendah bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 					
Keterampilan		Ш/с	200		58th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 7; 2. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) bagi PNS dengan pendidikan paling rendah Diploma III(D-III) bidang kesehatan; 3. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi; 4. memiliki pengalaman di bidang pelayanan anestesi paling singkat 1 (satu) tahun; 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan 6. berusia paling tinggi 53 tahun					
	Penyelia '	III/d	300								

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

PERMENPAN-RB
 Nomor 6 Tahun 2017, Tanggal 31 Januari 2017
 PERKA BKN
 Nomor 10 Tahun 2017, Tanggal 17 Juli 2017

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan tangkap

I. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengelolaan produksi perikanan

tangkap pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap bagi Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi perikanan tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Pusat
- Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pelaksana Pemula/Pemula sampai dengan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit Asisten

Perikanan Tangkap Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pel Pemula/ Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. sehat jasmani dan rohani;
		II/b	40			berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah
	Pelaksana/ Terampil	П/с	60		58th	Menengah Kejuruan (SMK) atau Diploma III(D.III) bidang Perikanan dan
		II/d	80			Kelautan atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi
	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100		58th	Pembina; dan 4. mengikuti dan lulus diklat fungsional;
Keterampilan		Ш/b	150		Jou i	5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
	Penyelia	Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;
		elia III/d			58th	 memiliki pengalaman di bidang perikanan tangkap paling singkat 2 th; mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan berusia paling tinggi 53 tahun

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

PERMENPAN-RB : Nomor 4 Tahun 2017, Tanggal 25 Januari 2017
 PERKA BKN : Nomor 20 Tahun 2017, Tanggal 3 Oktober 2017

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk

melakukan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas dan Kualitas Keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kominfo

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia dibantu Tim Penilai Balai

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjanga n Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang	
	Pelaksana / Terampil	П/с	60		58 th	baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sekolah	
	II/d 80 Menengal Telekomur Menengal	Menengah Kejuruan (SMK) Elektro Telekomunikasi atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat					
Keterampilan 	Pelaksana Lanjutan/ Mahir	III/a	100		58 th	serta kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi	
		III/b	150			alat ukur; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	
	Penyelia	Ш/с	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama;	
		Ш/d	300			 memiliki pengalaman di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 tahun; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 thterakhir; berusia paling tinggi 40 tahun 	

Asisten Penilai Pajak

PERMENPAN-RB
 Nomor 11 Tahun 2018, Tanggal 15 Februari 2018
 PERATURAN BKN
 Nomor 25 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,

tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penilaian dan/atau

pemetaan

4. TUGAS JABATAN : Melakukan penilaian dan/atau pemetaan

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUN JABATAN : Asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak Terampil sd Asisten Penilai Pajak Penyelia, di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Sekretariat
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penilai Pajak Terampil sd Asisten Penilai Pajak Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Penilai Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Penilai Pajak yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

	yang benakai					
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Terampil	II/c	60		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang
	Темпри	II/d	80			baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Diploma III
Keterampilan	Mahir	III/a	100			(D-III)bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, administrasi, atau bidang lainnya, sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
		ш/ь	150		58 th	 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
	Penyelia	ш/с	ш/с 200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan
		Ш/d	300			pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. memiliki pengalaman dlm pelaksanaan tugas di bidang penilaian paling singkat 2 tahun; 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2thterakhir; 4. berusia paling tinggi 53 tahun

Asisten Perisalah Legislatif

PERMENPAN-RB : Nomor 27 Tahun 2017, Tanggal 4 Oktober 2017

2. **PERATURAN BKN** : Nomor 25 Tahun 2019, Tanggal ...

Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang 3 PENGERTIAN

lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang

persiapan penyusunan risalah legislatif

melaksanakan kegiatan di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif, yang TUGAS JABATAN

meliputi perekaman, pembuatan transkrip, dan pelaporan hasil transkrip legislatif

PERPRES TUNJANGAN 5.

: PPNomor 11 Tahun 2017 6. PERATURAN BUP

7. **INSTANSI PEMBINA** : Sekjen DPR RI 8. **RUMPUN JABATAN** : Manajemen

: PNSDPRRI/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiauntuk menetapkan angka kredit bagiAsisten Perisalah Legislatif Penyeliadi lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh dibantu Tim Penilai Pusat

 b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalahpada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesiauntuk menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Penyelia di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibantu Tim Penilai Instansi Sekretaris Daerah Provinsiuntuk menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah Legislatif Terampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahirdi lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatPapua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatPapua Barat dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi Asisten Perisalah LegislatifTerampil sampai dengan Asisten Perisalah Legislatif Mahirdi lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Perisalah Legislatif yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Terampil	П/с	60		58th	berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani:
	rerampii	п/н	ន្តា			4. berijazah paling rendahDiploma Ⅲ(D-Ⅲ) bidang ekonomi, manajemen, ilmu
Keterampilan	Mahir	III/a	100		58 th	administrasi, dan sosial; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
		Ш/ь	150			Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Penyelia	Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. memiliki pengalaman di bidang persiapan penyusunan risalah legislatif paling singkat 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. berusia paling tinggi 53 tahun
		III/d	300		58 th	

Asisten Pranata Siaran

1. PERMENPAN-RB : Nomor 32 Tahun 2017, Tanggal 6 Nopember 2017

2. PERATURAN BKN : Nomor 28 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS

untuk melakukan kegiatan di bidang Produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru

pada Lembaga Penyiaran Publik RRIdan Lembaga Penyiaran Publik TVRI

4. TUGAS JABATAN : Melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru

5. PERPRESTUNJANGAN: Nomor....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo

8. RUMPUN JABATAN : Penerangan dan Seni Budaya

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kominfo (RRIdan TVRI)

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRIdan TVRI untuk angka kredit bagi Asisten Pranata Siaran Pemula, s.d Asisten Teknisi Siaran Penyelia lingkungan RRIdan TVRI dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Pranata Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Pranata Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

						,
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pemula	II/a	25		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS:
Keterampilan		II/b	40		58 th	memiliki integritas dan moralitas yang baik;
	Terampil	П/с	60			sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah SLTA/sederajat
		II/d	80			dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
	Mahir	Ш/а	100		Teknis, Kompetensi M Kompetensi Sosial Ku 58 th standar kompetensi v oleh Instansi Pembin 6. nilai prestasi kerja pa	5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
		III/b	150			standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Penyelia	Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru paling singkat 2 th; 3. berusia paling tinggi 53 tahun
		III/d	300		58 th	

Asisten Teknisi Siaran

1. PERMENPAN-RB : Nomor 31 Tahun 2017, Tanggal 6 Nopember 2017

2. PERATURAN BKN : Nomor 38 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran adalah adalah jabatan yang diduduki

oleh PNS untuk melakukan kegiatan di bidang teknik produksi, penyiaran

dan layanan media baru pada LPPRRIdan LPPTVRI

4. TUGAS JABATAN : Melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran

dan layanan media baru

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kominfo

8. RUMPUN JABATAN : Penerangan dan Seni Budaya 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kominfo (RRI dan TVRI)

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRIdan TVRI untuk angka kredit bagi Asisten Teknisi Siaran Pemula s.d Asisten Teknisi Siaran Penyelia di lingkungan RRIdan TVRI dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. UJI KOMPETENSI:

Asisten Teknisi Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Asisten Teknisi Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pemula	II/a	25		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;
Keterampilan		II/b	40		58 th	memiliki integritas dan moralitas yang baik:
	Terampil	П/с	60			3. sehat jasmani dan rohani;
		II/d	80			berijazah paling rendah SLTA/sederajat dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina;
	Mahir	III/a	100			 mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		Ш/ь	150		58th	
	Penyelia	Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. memiliki pengalaman di bidang teknis
		III/d	300		58 th	produksi, penyiaran dan layanan teknologi media baru paling singkat 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. berusia paling tinggi 53 tahun

Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (Assessor)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 41 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012

2. PERKA BKN : Nomor 16 Tahun 2012, Tanggal 17 Desember 2012

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Assessor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial Melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial, yang meliputi pelaksanaan penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan hasil penilaian, serta

pengembangan metode penilaian

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 111 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
 7. INSTANSI PEMBINA : Badan Kepegawaian Negara

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

TUGAS POKOK

- a. Kepala BKN atau pejabat eselon Iyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bs.d Assessor Utama pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan BKN, di instansi lainnya di luar BKN dibantu Tim Penilai Pusat
- b. Sekretaris Utama BKN atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I,golru III/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan BKN dibantu Tim Penilai Unit Kerja
- c. Pimpinan Instansiatau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda TkI,golru III/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
- d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda TkI,golru III/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi penilaian kompetensi manajerial bagi Assessor Pertama, pangkat Penata Muda TkI,golru III/bs.d Assessor Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJIKOMPETENSI DAN DIKLATPENJENJANGAN:

Assessor yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat penjenjangan

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Assesor SDM Aparatur yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Assesor SDM Aparatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang lahatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Iahatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/b	150	Rp. 450.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang
		Ш/с	200	Rp. 700.000	FOUL	Psikologi dan bidang ilmu lainnya yang berada pada rumpun bidang ilmu humaniora (Ilmu
	Muda	III/d	300		58 th	bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen Sumber Daya Manusia
		IV/a	400			dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik) yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB dengan pertimbangan Kepala BKN;
Mady	Madya	IV/b	550	Rp. 1.100.000	60 th	 Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golru III/h; Telah mengikuti diklat dan lulus uji kompetensi sebagai Assessor; nilai prestasi kerja, paling sedikit bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
Ahli		IV/c	700			
		IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabtn lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Mengikuti proses seleksi dan dinyatakan memenuhi persyaratan kompetensi sebagai Assessor:
	Utama	65 th	 Bagi yang memiliki latar belakang pendidikan lintas kualifikasi pendidikan yang ditetapkan sebelumnya akan ditetapkan oleh Menteri PAN-RBdgn pertimbangan instansi Pembina; Usia paling tinggi 50 tahun; Tersedia formasi Jabatan fungsional Assessor; 			

Auditor

: Nomor PER/220/M.PAN/7/2008, Tanggal 27 Agustus 2008 PERMENPAN-RB

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008, Tanggal 11 Nopember 2008

: Auditor adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup, tugas tanggugjawab dan wewenang untuk 3. PENGERTIAN

melakukan pengawasan intern pd instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yg didlmnya terdapat kepentingan negara sesuai dgn peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban yg diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian

dan evaluasi pengawasan.

: Nomor 5 Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 5 **PERPRESTUNJANGAN** : PPNomor 11 Tahun 2017

PERATURAN BUP 6. 7. **INSTANSI PEMBINA**

: Akuntan dan Anggaran 8. **RUMPUN JABATAN** : PNS Pusat / Daerah LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pembina bagi Auditor Madya s/d Utama dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat setingkat es. Ilbagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja

 Sekretaris Inspekturat Jenderal Departemen, Inspektur Kementerian Negara, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektur Utama/Inspektur LPND, Inspektur Utama/Inspektur/Ka.Unit Pengawasan Intem, pejabat setingkat eselon Ilbagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai

d. Inspektur Provinsi bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Inspektur Kab/Kota bagi Auditor Pelaksana s/d Penyelia dan Auditor Pertama s/d Madya dibantu Tim Penilai Kab/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KETINGKATAHLI

- a. Auditor Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Auditor Ahli dgn syarat:
 - 1) Ijazah yg dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan utk Jabatan Auditor Ahli.
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Auditor Keahlian;
 - 3) Telah memiliki sertifikasi alih jabatan dari Auditor Terampil ke Auditor Ahli; dan
 - 4) tersedia formasi untuk jabatan Auditor Keahlian;
 - 5) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
- b. Auditor Terampil yang akan diangkat menjadi Auditor Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sébesar 69%dari angka krédit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak pemperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Auditor yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil Pelaksana Lanjutan		II/b	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 300.000		Berijazah serendah-rendahnya DIIIsesuai dengan kualifikasi pendidikan
		II/d	80			Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
	Pelaksana	III/a	100	D 400 000	58th	Muda TKI, Golru II/b.
	Lanjutan	III/b	150	Rp. 400.000		Diklat fungsional tingkat terampil Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-
	Damielia	III/c	200	D. 500.000	58th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
	Penyelia	III/d	300	Rp. 500.000	3601	terakhir
		III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat ahli:
	Pertama	III/b	150	Rp. 450.000		 Berijazah serendah-rendahnya SI/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pangkat serendah-rendahnya penata Muda, golongan ruang III/a
		III/c	200	D., 700,000	FO.H.	
	Muda	III/d	300	Rp. 700.000	58th	
						3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-
Ahli	Madya	IV/b	550	Rp. 1.100.000	60th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
		IV/c	700	1		terakhir
		IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Utama	IV/e	1050	Rp. 1.400.000	65th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Telah lulus sertifikasi jabatan Auditor; Berusia paling tinggi 50 tahun.

Auditor Kepegawaian

PERMENPAN-RB : Nomor 40 Tahun 2012, Tanggal 17 Juli 2012
 PERKA BKN : Nomor 4 Tahun 2013, Tanggal 22 Januari 2013

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan wasdalpeg

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 12 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
 7. INSTANSI PEMBINA : Badan Kepegawaian Negara

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

- a. Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk paling rendah eselon Iyang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg bagi Audiwan Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bs.d golru IV/c pangkat Pembina Utama Muda, di lingkungan BKN dan di instansi lainnya di luar BKN dibantu Tim Penilai Pusat
- b. Deputi yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang Pengendalian Kepegawaian BKN atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon Ilyang secara fungsional bertanggungjawab di bidang wasdalpeg bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan BKN Pusat dibantu Tim Penilai Deputi
- c. Kepala Kantor Regional BKN bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan Kantor Regional BKN masing-masing dibantu Tim Penilai Regional
- d. Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian, Pejabat eselon Ilyang membidangi wasdalpeg pada Kementerian atau LPNK bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
- e. Inspektur Provinsi bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- f. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Audiwan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI DAN DIKLAT:

Auditor Kepegawaian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan diklat penjenjangan

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Auditor Kepegawaian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Auditor Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Auui	Additor Repegawaian sesdai Reterituan yang beriaku:									
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
	Pertama	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik; 2. paling rendah pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;				
		III/b	150							
	Muda	III/ c	200	. Rp. 840.000	58 th					
		III/d	300							
Ahli	Madya	IV/a	400	Rp. 1.080.000		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian; 3. Memiliki pengalaman kerja di bidang kepegawaian paling kurang 3 tahun; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun; dan 5. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang wasdalpeg				
		IV/b	550		60 th					
		IV/c	700							

Bi dan

: Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008, Tanggal 28 Januari 2008 **PERMENPAN-RB**

PERATURAN BERSAMA: Nomor 1110/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 25 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008

PENGERTIAN : Bidan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

kebidanan pada sarana pelayanan kebidanan.

: Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan KB, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat.

PERPRES TUNJANGAN: Nomor 9 Tahun 2010, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan

RUMPUN JABATAN : Kesehatan

LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

4. TUGAS POKOK

a. Direktur yang membina pelayanan Kebidanan Depkes bagi Bidan Madya dibantu Tim Penilai Departemen

b. Pimpinan Unit Kerja Pel kebidanan pd sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi Bidan P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Bidan Pertama-Muda yang bekerja pada sarana pelayanan

kesehatan di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provins

d. KepalaDinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Bidan P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda yang bekerja pada pelayanan kesehatan di lingkungan kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

e. Pimpinan Unit yang secara fungsional membawahi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes bagi Bidan P.Pemula s.d Penyelia dan Bidan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPILKE TINGKAT AHLI

Bidan Terampil yang memperoleh Ijazah S1 kebidanan dapat diangkat menjadi Bidan Ahli dgn syarat:

- a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan dalam DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
- c. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan dalam jenjang/pangkat yang didudukinya.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Bidan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Bidan sesuai

ketentuan yang berlaku.										
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil 1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah				
Terampil		II/b	40		58 th	Bidan/ D.I Kebidanan				
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 240.000		2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,				
		II/d	80			golongan ruang II/a.				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	- Rp. 265.000	58 th	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun				
		Ш/ь	150		3641					
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 500.000	58 th	terakhir				
		III/d	300		5521					
	Pertama	III/a	100	- Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S1/ D.IV kebidanan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir				
		Ш/b	150							
		Ш/с	200		- 0.1					
	Muda	III/d	300	Rp. 600.000	58 th					
Ahli		IV/a	400	Rp. 850.000		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:				
	Madya	IV/b	550		60 Th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang pelayanan kebidanan paling singkat 2 tahun; 				
	. iaaya	IV/c	700							

3. Berusia paling tinggi 50 tahun.

Diplomat

PERMENPAN-RB
 Nomor 4 Tahun 2018, Tanggal 16 Januari 2018
 PERATURAN BKN
 Nomor 20 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Diplomat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, dan wewenang utk melaksanakan kegiatan diplomasi

dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RL

1. TUGAS JABATAN : Melaksanakan diplomasi dalam pengelolaan hubungan antara negara dan

pemerintah RIdengan negara dan pemerintah asing dan/atau organisasi

internasional didalam dan diluar negeri.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 22 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Luar Negeri

8. RUMPUN JABATAN : Politik dan Hubungan Luar Negeri

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Luar Negeri

10. PEJABAT PENETAP PAK

 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kemenlu utkangka kredit bagi Diplomat Ahli Utama dilingkungan Kemenlu dan Perwakilan RIdibantu Tim Penilai Utama

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di lingkungan Kemenlu utk angka kredit bagi Diplomat Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI dibantu Tim Penilai Madya

11. UJI KOMPETENSI

Diplomat yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. Diplomat diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1) mengundurkan diri dari Jabatan;

2) diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan negara;

4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

5) ditugaskan secara penuh pada Jabàtan Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrasi; atau

6) tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- b. Selain pemberhentian pada hurufa, Diplomat diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) menduduki Jabatan Negara; dan
 - 2) menduduki Jabatan pada Organisasi Internasional.

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Diplomat yang diberhentikan karena ketentuan huruf a angka 2) s.d angka 5) dan huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku									
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan			
	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 400.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;			
		III/b	150	кр. 400.000	36 ui	memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani berijazah paling rendah S1 pd bid studi			
	Ahli Muda	III/c	200	D. 000 000	E0#	Ilmu HI, Hukum, Ekonomi, Pemerintahan, Politik, Media dan Komunikasi,			
	Ailli Muua	III/d	300	Rp. 800.000	58 th	Administrasi Negara, sosiologi, Budaya/ Sastra atau kualifikasi pendidikan lain			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000		yang ditetapkan oleh instansi pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan			
		IV/b	550		60 th	Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;			
Keahlian		IV/c	700			6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir			
		IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. memiliki pengalaman di bidang diplomasi paling singkat 2 th; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bemilai			
	Ahli Utama	IV/e	1050	Rp. 1.400.000	65 th	baik dalam 2 tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 tahun utk menduduki jenjang Ahli Madya; c. 60 tahun utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki JPT.			

Dokter

: Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003 **KEPMENPAN-RB**

: Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003 Tgl. 30 Des 2003 KEPUTUSAN BERSAMA 2

: Dokter adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak **PENGERTIAN**

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pelayanan.

TUGAS POKOK

: Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yg meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka

kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

: Nomor 54 Tahun 2007, Per ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 PERPRES TUNJANGAN

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 6. 7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan

RUMPUN JABATAN : Kesehatan

LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Menkes/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Dokter Utama di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai

b. Dirjen Pel.Medik Depkes bagi Dokter Pertama s.d Madya di ling.Depkes dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pel.Kesehatan serendahnya eselon IIIpd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Dokter Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Dokter vang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Pertama	Ш/ь	150	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah Dokter.	
Muda Mady	Muda	Ш/с	200	Rp. 750.000	58th	Pangkat serendah-rendahnya Penata muda TKI, Golongan Ruang III/b Tersedia Formasi Setiap unsur penilaian dalam	
	Pidda	III/d	300	кр. 730.000	3801		
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000			
		IV/b	550		60 th	DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun	
Ahli		IV/c	700			terakhir	
	Utama	IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kesehatan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir yang diduduki.	
		IV/e	1050	Rp. 1.400.000	65 th		

Dokter Gigi

L. KEPMENPAN-RB: Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 7 Nopember 2003

KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 Tgl 30 Desember 2003

3. PENGERTIAN : Dokter Gigi, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pd sarana pelayanan kesehatan.

kesenatai

4. TUGAS POKOK : Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan

yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka

PERPRES TUNJANGAN kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

5. PERATURAN BUP : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

7. INSTANSI PEMBINA : PP Nomor 11 Tahun 2017 : Kementerian Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : Kesehatan

10. PEJABAT PENETAP PAK : PNS Pusat / Daerah

a. Menkes/Pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Dokter Gigi Utama dibantu Tim Penilai Departemen

b. Dirjen Pel.Medik Dep.Kes/Pej.eselon IIbagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya yang bekerja pada sarana pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pelayanan Kesehatan serendahnya eselon IIIpd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Dokter Gigi Pertama s.d Madya pada unitnya masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

IV/e

1050

- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Dokter Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya

menurut ketentuan yang berlaku Golongan Angka Tunjangan **Batas Usia** Jenjang Tingkat Pengangkatan Dalam Jabatan Jabatan Ruang **Kredit** Jabatan **Pensiun** Syarat pengangkatan pertama: **150** Pertama Ш/b Rp. 325.000 58 th 1. Berijazah Dokter Gigi. III/c 200 2. Pangkat serendah-rendahnya Rp. 750.000 58 th Muda Penata Muda TKI, Golongan Ш/d 300 Ruang III/b Tersedia Formasi 400 IV/a 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya 60th **550** Rp. 1.200.000 Madya IV/b bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir Ahli 700 IV/c Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: IV/d 850 1. Memenuhi svarat pengangkatan pertama: 2. Memiliki pengalaman dalam 65th **Utama** Rp. 1.400.000 kegiatan pelayan kesehatan paling singkat 2 tahun;

3. Berusia paling tinggi 5 tahun

iabatan terakhir.

sebelum mencapai BUPdari

Dokter Hewan Karantina

PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018

PERATURAN BKN : Nomor 30 Tahun 2019, Tanggal ...

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNS dan

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani

: Melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan 4. TUGAS JABATAN

hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERPRES TUNJANGAN

PP Nomor 11 Tahun 2017 **PERATURAN BUP Kementerian Pertanian INSTANSI PEMBINA**

: Ilmu Hayat **RUMPUNJABATAN**

: PNSKementerian Pertanian LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT YG MENETAPKAN PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati untuk Angka Kredit Dokter Hewan Karantina Ahli Utama; dan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani untuk Angka Kredit Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama sampai dengan Dokter Hewan Karantina Ahli Madya

11. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

- a. berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Dokter Hewan; d.
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

12. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah Dokter Hewan;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan e. standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2(dua) tahun; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
- g.
- berusia paling tinggi:
 - 53 tahun bagi PNSyg akan menduduki Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama dan Ahli Muda;
 55 tahun bagi PNSyg akan menduduki Dokter Hewan Karantina Ahli Madya; dan

 - 60 tahun bagi PNSyg akan menduduki Dokter Hewan Karantina Ahli Utama bagi PNSyang telah menduduki JPT

13. UJI KOMPETENSI:

Dokter Hewan Karantina yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

14. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

15. PENGANGKATAN KEMBALI:

Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit setiap tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
	Ahli Pertama	III/a	50	12,5		58 th
Keahlian	Allii Pertama	III/b 50		12,5		Soul
	Ahli Muda	III/c		25		
	Ailii Muua	III/d	100	25		58 th
		IV/ 150 Ahli Madya IV/b 150		37,5		
	Ahli Madya			37,5		60th
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV/d 200		50		65 th
	Ailii Oldina	IV/e	200	50		³⁵ 41

Dokter Pendidik Klinis

PERMENPAN-RB : Nomor PER/17/M.PAN/9/2008, Tanggal 16 September 2008

PERATURAN BERSAMA : Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009, Tanggal 11 Desember 2009

PENGERTIAN 3.

: Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/ medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh PNSdengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh

pejabat yang berwenang.

: Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan **TUGAS POKOK**

dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu

kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan

: Nomor 42 Tahun 2009, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **PERPRES TUNJANGAN**

: PP Nomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP 6. : Kementerian Kesehatan INSTANSI PEMBINA

: Kesehatan **RUMPUN JABATAN** R

: PNS Pusat / Daerah LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Dirjen yang membina pelayanan Medik Depkes bagi Dokter Pendidik Klinis Utama yang bekerja pada RS Pendidikan di lingkungan Depkes dan Instansi lain dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

b. Sekretaris Drektorat Jendral yang membina pelayanan Medik depkes bagi Dokter Pendidik Klinis Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Kadinkes Provinsi bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja pd RSPendidikan di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Ka. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja pada RS Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

Pimpinan Unit pelayanan kesehatan Departemen selain Depkes (setingkat eselon II)bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama s.d Madya yang bekerja pada RSPendidikan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS:
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Dokter Pendidik Klinis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
	Pertama	III/b	150	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama:		
Ahli —	Muda	III /c	200	- Rp. 750.000	58th	Berijazah paling rendah Dokter Spesialis		
	Muda	III/d	300		36 ti	 Rekomendasi Direktur RS Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TKI, Golru III/b 		
		IV/a	400	Rp. 1.200.000				
	Madya	IV/b	550		60 th	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik		
		IV/c	700			dalam satu tahun terakhir		
	Utama	IV/d	850	D 1 400 000		 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; Tersedia Formasi; Berusia paling tinggi 55 tahun, kecuali bagi Dokter Spesialis yg menduduki jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi bid kesehatan dan menjalankan tugas di RSpendidikan yg ditetapkan Menteri Kesehatan. 		
		IV/e	1050	Rp. 1.400.000	65 th			

Dosen (Akademik Dosen)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 17 Tahun 2013, Tanggal 15 Maret 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013, Tgl 17 Des 2013

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 4/VIII/PB/2014dan Nomor 24 Tahun 2014, Tanggal 8 Desember 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 65 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 14 Tahun 20057. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ristek dan Dikti

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi Kemdikbud atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala dan profesor dibantu Tim Penilai Pusat

 Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi di lingkungan Kemdikbud dan instansi pusat lainnya bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor di lingkungannya masing-masing dibantu Tim Penilai Perguruan Tinggi

c. Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Koordinator Kopertis/Kopertais) bagi Dosen yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan Lektor pada perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Kopertis) masing-masing dibantu Tim Penilai Lembaga (Kopertis/Kopertais).

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Dosen yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan Akademik Dosen	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
	Asisten Ahli	III/b	150	Rp. 375.000	65 th	Syarat pengangkatan pertama:		
	Lektor	Ш/с	200	Rp. 700.000	65th	berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang andersiat dari pandidikan		
	LEXIO	III/d	300	тр. 700.000	- Wui	sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi; 2. pangkat paling rendah Penata		
		IV/a	400			Muda Tingkat I,golongan		
	Lektor Kepala	IV/b	550	Rp. 900.000	65 th	ruang III/b;dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.		
Ahli	_	IV/c	700					
	Duefrance	IV/d	850	Dr. 1.250,000	Dapat	Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman mengajar (magang) pada pendidikan tinggi paling kurang 2 (dua) tahun; dan 3. tersedia formasi untuk jabatan Akademik Dosen.		
	Profesor	IV/e	1050	Rp. 1.350.000	diperpanjang s.d 70 th			

Entomolog Kesehatan

: Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000 **KEPMENPAN-RB**

: Nomor 396/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan No. 20 Tahun 2001 Tql. 08 Mei 2001 KEPUTUSAN BERSAMA 2.

: Entomolog Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, PENGERTIAN wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap

vektor penyakit/serangga pengganggu.

: Melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap **TUGAS POKOK**

vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit, serta terhadap serangga

pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

: Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **PERPRESTUNJANGAN**

: PP Nomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP 6. : Kementerian Kesehatan **INSTANSI PEMBINA** 7.

: Kesehatan R **RUMPUN JABATAN**

: PN SPusat / Daerah 9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Dirjen yang membawahi bidang Entomolog Kesehatan bagi Entomolog Kesehatan Madya di lingkungan Depkes dan luar Depkes dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Dirjen yang membawahi bidang Entomolog Kesehatan bagi Entomolog Kesehatan Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda di lingkungan Dep. Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat

c. Kakanwil Dep.Kes/Kadinkes Provinsi bagi Entomolog Kesehatan Pel. Pemuda s.d Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama s.d Muda pada Instansi kesehatan tk provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi

d. Ka. Kantor Dep.Kes/Kadinkes Kabupaten/kota bagi Entomolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama s.d Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

e. Pimp.Instansi/Pejabat yang ditunjuk bagi Entomolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Entomolog Kesehatan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Entomolog Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil : 1. Berijazah paling rendah D.I bidang entomolog		
		II/b	40	Rp. 240.000	58 th	kesehatan		
	Pelaksana	П/с	60			2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.		
Terampil		II/d	80			3. Diklat fungsional tingkat terampil		
_	Pelaksana Lanjutan	Ш/а	100	Rp. 265.000	58th	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya paling kurang bernilai baik dalam		
		Ш/ь	150		35 ti	satu tahun terakhir		
	Penyelia	Ш/с	200	- Rp. 500.000	58th			
		III/d	300) Jour			
	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/ D.IV bidang Biologi, kedokteran hewan, kesehatan yang berhubungan dengan entomolog kesehatan 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,		
		III/b	150					
	Muda	Ш/с	200	Rp. 600.000	58th	golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli		
Ahli	11000	III/d	300	1,47,000,000	330.	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir		
		IV/a	400	Rp. 850.000		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:		
	Madya	IV/b	550		60 th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang entomologi kesehatan paling singkat 2 tahun; Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir 		
_		IV/c	700					

BUPdari jabatan terakhir

Epidemiolog Kesehatan

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000

2. KEPUTUSAN BERSAMA: Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2000 dan Nomor 19 Tahun 2001, Tanggal 8 Mei 2001

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah PNS yang diberi tugas, tangungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan dara, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan pengumpungan penyakit da

epidemiologi utk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh.

4. PERPRESTUNJANGAN: Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20176. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

7. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

8. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

9. TUGAS POKOK :

Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interprestasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda. Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh, secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interprestasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metoda.

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- Dirjen yang membawahi bidang Epidemiolog Kesehatan bagi Epidemiolog Kesehatan Madya di lingkungan Depkes dan luar Depkes dibantu Tim Penilai Pusat
- b. Sekretaris Dirjen yang membawahi bidang Epidemiolog Kesehatan bagi Epidemiolog Kesehatan P. Pemula s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama s.d Muda di lingkungan Dep.Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat
- Kakanwil Dep.Kes/Kadinkes Provinsi bagi Epidemiolog Kesehatan Pel. Pemuda s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama s.d Muda pada Instansi kesehatan tingkat provinsi dibantu Tim Penilai Propinsi
- d. Ka. Kantor Dep.Kes/Kadinkes Kab/kota bagi Epidemiolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama s.d Muda pada instansi kesehatan tk Kab/Kota.dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
- e. Pimp.Instansi/Pejabat yang ditnjuk bagi Epidemiolog Kesehatan Pel.Pemula s.d Penyelia dan Epidemiolog Kesehatan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai instansi.

11. PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Epidemiolog Kesehatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SLTA/DI sesuai
Terampil		II/b	40	Rp. 240.000	58th	dengan kualifikasi pendidikan
	Pelaksana	П/с	60			2. Pangkat paling rendah paling rendah Pengatur
		II/d	80			Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Diklat fungsional tingkat terampil
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58th	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling
		III/b	150	кр. 203.000	3501	kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 500.000	58th	
		III/d	300	тф. 500.000	3001	
	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang kesehatan. 2. Pangkat paling rendah paling rendah Penata Muda, Golru III/a
		Ш/b	150			
	Muda	Ш/с	200	D C00 000	EO#	3. Diklat fungsional tingkat ahli
Ahli	миаа	III/d	300	Rp. 600.000	58th	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Madya	IV/b	550	Rp. 850.000	60th	Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang epidemiolog
	,	IV/c	700			kesehatan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapa BUPdari jabatan terakhir.

Fisikawan Medis

PERMENPAN-RB : Nomor PER/12/M.PAN/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1111/MENKES/PB/XII/2008dan Nomor 29 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008

3. PENGERTIAN : Fisikawan Medis adalah iabatan vang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana

pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang

diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan medis yang meliputi pelayanan fisika medik, keselamatan

radiasi, radio diagnostik dan pencitraan medik, radio terapi, kedokteran nuklir,

pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 42 Tahun 2009, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Dirjen yg membidangi pelayanan fisika medik Depkes bagi Fisikawan Medis Madya dibantu Tim Penilai Departemen

b. Pimpinan unit kerja pelayanan fisika medik pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Depkes bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pimpinan unit kerja yang secara fungsional membidangi pelayanan kesehatan instansi pusat di luar Depkes (paling rendah eselon II)bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi

d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Fisikawan Medis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Fisikawan Medis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Muda Ahli	_	III/a	100	D= 200,000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S1 Fisika Medik 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol Ruang III/a 3. Tersedia formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pertama	ш/ь	150	Rp. 300.000	50 41	
	Muda	Ш/с	200	D ₁₁ C00 000	58 th	
		Ⅲ/d	300	Rp. 600.000	33.1	
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat
	Madya	IV/b	550	Rp. 850.000	60 th	pengangkatan pertama 2. Memiliki pengalaman di bdg pelayanan fisika medik paling
		IV/c	700			singkat 2 tahun 3. Berusia paling tinggi 50 tahun

Fisioterapis

: Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004, Tanggal 19 Januari 2004 **KEPMENPAN-RB**

2 KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 209/MENKES/SKB/III/2004dan Nomor 07 Tahun 2004, Tanggal 2 Maret 2004

PENGERTIAN : Fisioterapis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada

unit pelavanan kesehatan.

: Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak **TUGAS POKOK**

dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara

manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, eletroterapeutis dan mekanis), pelatihan

fungsi dan komunikasi.

: Nomor 34 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 PERPRESTUNJANGAN

Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

: PP Nomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP 6. : Kementerian Kesehatan

INSTANSI PEMBINA 7. Kesehatan **RUMPUN JABATAN** : PNSPusat / Daerah LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Dep.Kes bagi Fisioterapis Madya di lingkungan Depkes dan instansi luar Depkes dibantu Tim Penilai Diréktorat Jenderal

b. Kepala Rumah Sakit/Pejabat lain yang membidangi Fisioterapi bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama dan Muda di lingkungan Depkes dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan

c. Kepala RSUD Provinsi bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama dan Muda yang bekerja pd unit pelayanan kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala RSUDKabupaten/Kota bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama dan Muda yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

e. Pimpinan Unit Kerja sarana Pelayanan Kesehatan serendahnya eselon IIIpd Instansi Pusat diluar Depkes bagi Fisioterapis Pelaksana s.d Penyelia dan Fisioterapis Pertama s.d Madya pada unitnya dibantu Tim Penilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKATAHLI

Fisioterapis Terampil yang memperoleh ijazah S1/DIV dapat diangkat dalam Fisioterapis Ahli dengan syarat:

a. Ijazah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan utk jabatan Fisioterapis Ahli

b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir

c. Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Fisioterapis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40		58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Terampil	Pelaksana	П/с	60	Rp. 240.000		Berijazah paling rendah DIIsesuai dengan kualifikasi pendidikan
		II/d	80			Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI,
	Pelaksana Lanjutan	Ш/а	100	Dr. 265 000	58th	Golru II/b 3. Diklat fungsional Tk terampil
		III/b	150	Rp. 265.000	36 U1	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/d	300			Court
	Pertama	III/a	100	- Rp. 300.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Benjazah paling rendahS.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Gol.Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		Ш/b	150			
	Muda	Ш/с	200	Rp. 600.000	58th	
Ahli	Muua	III/d	300		3501	
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan
	Madya	IV/b	550	Rp. 850.000	60 th	
Ц		IV/c	700			pelayanan fisioterapi paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.

G u ru

1. PERMENPAN-RB : Nomor 16 Tahun 2009, Tanggal 10 Nopember 2009

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, Tanggal 6 Mei 2010

s. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Guru adalah jafung yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluai peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yg diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Mendidik, mengajar,membimbing,mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan

menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 108 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : UU Nomor 14 Tahun 2005

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan Sekolah Khusus

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tk I golru IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/e dilngkngn Instansi Pusat dan daerah serta Guru Pertama s.d Utama yang diperbantukan diluar negeri dibantu Tim Penilai Pusat
- b. Dirjen Depag yang membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Depag dibantu Tim Penilai Departemen Agama
- c. Ka.Kanwil Depag bagi Guru Muda pangkat Penata golru III/cdan Penata Tk Igolru III/ddilngkngan Depag dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah
- d. Ka.Kandepag bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golru III/adan Penata Muda TkIgolru III/bdilingkungan Kantor Depag dibantu Tim Penilai Kantor Departemen
- e. Gubernur atau Kadin yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/as.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- f. Bupati/Walikota atau Kadin yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/as.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
- g. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat lain yang ditunjuk yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama golru III/as.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dilngkungan instansi pusat diluar Depdiknas dan Depag dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. SANKSI:

- a. Guru yang tidak dapat memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai Guru dan tidak mendapat pengecualian dari Mendiknas dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan.
- b. Guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, fungsional dan maslahat tambahan dan penghargaan sebagai Guru yg pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Guru yang diberhentikan karena angka 11 poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100	Rp. 327.000	60 th	Syarat pengangkatan pertama:
Percama	Pertama	III/b	150		55 U.	 Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.IVdan bersertifikat Pendidik Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a Tersedia formasi Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir Memiliki Kinerja yg baik yang dinilai dalam masa program induksi
	Muda	Ш/с	200	Rp. 327.000	60 th	
		III/d	300			
		IV/a	400	Rp. 389.000	60 th	
Ahli	Madya	IV/b	550			
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850	Rp. 389.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman sebagai Guru paling singkat 2tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/e	1050			

Inspektur Angkutan Udara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 59 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 41 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Inspektur Angkutan Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan teknis di bidang

penyelenggaraan angkutan udara.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan di bidang penyelenggaraan Angkutan Udara.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUNJABATAN : Pengawasan kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi Angkutan Udara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Angkutan Udara Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama dan Inspektur Angkutan Udara Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara

11. KENAIKAN JABATAN

Inspektur Angkatan Udara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Inspektur Angkutan Udara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang	Golru	Angka	Tunjangan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Jabatan		Kredit	Jabatan		
	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berijazah paling rendah S-1/D-4 di transportasi udara, ekonomi, keuangan, hukum, administrasi atau bidang lainnya
Keahlian	Pertama	III/b	150		58 th	sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi
	Muda	III/c	200		58 th	Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 3.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/d	300		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling sedikit 2 (dua) tahun;
	Madya	IV/a	400		60 th	3. memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam Inspector Training System (ITS) di bidang kebandarudaraan.
		IV/b	550		60 th	4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 5. berusia paling tinggi:
		IV/c	700		60 th	 a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.

Inspektur Bandar Udara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 57 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 34 Tahun 2019, Tanggal ...

PENGERTIAN : Inspektur Bandar Udara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yg Berwenang untuk

melakukan pembinaan teknis di bidang kebandarudaraan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian,

pengawasan , investigasi dan pelayanan keselamatan operasi bandar

udara di bidang kebandarudaraan.

5. PERPRESTUNJANGAN: Nomor.....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUNJABATAN : Pengawasan kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kebandarudaraan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Bandar Udara Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama dan Inspektur Bandar Udara Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara

11. KENAIKAN JABATAN

Inspektur Bandar Udara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Inspektur Bandar Udara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Teknik Elektro, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin,
		III/b	150		58 th	Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Transportasi; 2.mengikuti dan Iulus uji Kompetensi
	Muda	III/c	200		58 th	Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 3.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
Keahlian		III/d	300		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan paling
	Madya	IV/a	400		60 th	sedikit 2 (dua) tahun; 3.Memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam Inspector Training System (ITS) di bidang kebandarudaraan.
		IV/b	550		60 th	4.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 5.berusia paling tinggi:
		IV/c	700		60 th	a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Ahli Madya.

Inspektur Keamanan Penerbangan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 55 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 40 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Inspektur Keamanan Penerbangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan teknis di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang

berbahaya, atau pelayanan darurat

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis pengaturan, pengendalian,

pengawasan, dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, penanganan

pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawasan kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat untuk angka kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama dan Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

11. KENAIKAN JABATAN

Inspektur Keamanan Penerbangan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Inspektur Keamanan Penerbangan yang diberhentikan karena poin b.s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang Ilmu Teknik, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, atau Ilmu
	reitailla	III/b	150		58 th	Komputer; 2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial
	Muda	III/c	200		58 th	Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 3.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai bail dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
Keahlian		III/d	300		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.memiliki pengalaman di bidang kebandarudaraan
	Madya	IV/a	400		60 th	paling sedikit 2 (dua) tahun; 3.memiliki sertifikat sebagaimana dipersyaratkan dalam
		IV/b	550		60 th	Inspector Training System (ITS) di bidang keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan kargo dan/atau barang berbahaya, atau pelayanan darurat 4.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2
		IV/c	700		60 th	(dua) tahun terakhir 5.berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.

Inspektur Ketenagalistrikan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 37 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017

PERATURAN BKN : Nomor 4 Tahun 2019, Tanggal 28 Maret 2019

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan

5. PERPRESTUNJANGAN: Nomor 71 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian ESDM / Daerah Provinsi

10. PEJABAT PENETAP PAK:

 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian ESDM untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya s.d Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama dibantu Tim Penilai Pusat;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama s.d Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat dibantu Tim Penilai Pusat:
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama s.d Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

11. DIKLATATAU UJI KOMPETENSI

Inspektur Ketenagalistrikan yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat atau uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Inspektur Ketenagalistrikan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

sesuai ke	<u>tentuan yang be</u>	паки.				
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
	74 III T Granta	Ш/b	150	1413231000	554.	sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau
	Ahli Muda	π/c	200	Rp. 750.000	58th	Diploma IV (D-IV) bidang Teknik Pertambangan/Teknik Geologi/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Teknik Kimia/Teknik
	Anii Muda	III/d	300	кр. 750.000	3841	Fisika/Teknik Lingkungan/Teknik Elektro/Teknik Metalurgi/Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/Teknik Industri/Teknik Perminyakan atau Diploma IV(D-IV)
		IV/a	400		60 th	Keinspekturan Tambang, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
	Ahli Madya	IV/b	550	Rp. 1.050.000		5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi
Keahlian		IV/c	700			yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
	Ahli Utama	IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman dlm pelaksanaan tugas dibidang inspeksi ketenagalistrikan paling kurang 2 th;
		IV/e	1050		65 th	 nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2tahun terakhir Berusia paling tinggi: 53th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; 55th utk menduduki jenjang Ahli Madya; 60th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNSyg telah menduduki JPT.

Inspektur Minyak dan Gas Bumi

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002, Tanggal 19 April 2002

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 1245 K/70/MEM/2002dan Nomor 18 Tahun 2002, Tanggal 22 Juli 2002

3. PENGERTIAN : Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab,

wewenang dan hak utk melakukan pelaksanaan Inspeksi minyak dan gas bumi.

I. TUGAS POKOK : Melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek minyak

dan gas bumi, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan

menyebarluaskan hasil inspeksi.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 71 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan
 LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian ESDM / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Dirjen Minyak dan Gas Bumi bagi Inpektur Minyak dan Gas Bumi Madya dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat eselon Ilyang ditunjuk oleh Dirjen Minyak dan Gas Bumi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Kepala Dinas Provinsi bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Propinsi

d. Kepala Dinas kabupaten/Kota bagi Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang diberhentikan karena poin b dan poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Densiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100	- Rp. 325.000	58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah- rendahnya S.1/D.IVteknik yg berhubungan
	rauma	Ш/ь	150	Τφ. 323.000	35 ti	dgn minyak dan gas bumi 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelaksanaan inspeksi minyak dan gas bumi paling kurang 2 tahun; 3. Telah ikut dan lulus diklat fungsional yang ditetapkan; 4. Berusia paling tinggi 5thn sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir
	Muda	Ш/с	200	- Rp. 750.000	58 th	
	Muua	Ⅲ/d	300	. кр. 730.000		
Ahli		IV/a	400	Rp.1.050.000	60 th	
	Madya	IV/b	550			
		IV/c	700			

Inspektur Tambang

PERMENPAN-RB : Nomor 36 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017
 PERATURAN BKN : Nomor 23 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas

pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

4. TUGAS JABATAN : Melakukan pengawasan atas pelaksanaarr kegiatan usatra pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber

daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pema.nfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi

persiapan, pelaksanaan, evduasi dan pelaporan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 71 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian ESDM

10. PEJABAT PENETAP PAK:

 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara bagi Inspektur Tambang Ahli Madya dan Ahli Utama dibantu Tim Penilai Pusat; dan

 b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara bagi Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Ahli Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. DIKLATATAU WIKOMPETENSI

Inspektur Tambang yg akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat atau uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Inspektur Tambang yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli	Ш/а	100	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3. sehat iasmani dan rohani;
	Pertama	III/b	150	тр. 323.000		4. benjazah paling rendah sarjana (s-l) atau Diploma IV (D-IV) bidang Teknik pertambangan/ Teknik Geologi/Teknik sipil/ Teknik Mesin/ Teknik Kimia/ Teknik Fisika/
Keahlian	Ahli Muda	Ш/с	200	Rp. 750.000	58 th 60 th 65 th	Teknik Lingkungkungan/Teknik Etelrtro/Teknik Metalurg/ Teknik Geodesi/Teknik Geofisika/ Teknik Industri/Teknik Perminyakan atau D.IV Keinspekturan Tambang, dan kualilikasi lain yg ditentukan oleh Instansi pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	AimPidda					
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.050.000		 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; Memiliki pengalaman di bdg pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan paling kurang 2 th; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir Berusia paling tinggi: 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; 55 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS yg telah menduduki JPT.
		IV/b	550			
		IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	850			
		IV/e	1050			

Instruktur

1. KEPMENPAN-RB: Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003, Tanggal 28 Maret 2003

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor Kp.188/MEN/2003 dan Nomor 25A Tahun 2003, Tanggal 10 Juli 2003

3. PENGERTIAN : Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk

melakukan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau

keiuruan tertentu.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 58 tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan Lainnya

9. LINGKUP BERLAKU: PNS Kementerian Ketenagakerjaan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Madya dilingkungan masingmasing dibantu Tim Penilai Instansi Pusat

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi pelatihan dan pembelajaran pada Instansi Pusat bagi Instruktur Pelaksana s.d Penyelia dan Instruktur Pertama-Muda dilingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Instruktur Pelaksana s.d Penyelia dan Instruktur Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Daerah.

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI

Instruktur Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IVdapat diangkat menjadi Instruktur Ahli dengan syarat:

- a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi jabatan Instruktur Ahli
- b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Instruktur Ahli

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Instruktur yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Berijazah paling rendah DIIsesuai dgn
		II/d	80	1		kualifikasi pendidikan yang ditentukan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil	Pelaksana	III/a	100	D 26E 000	58th	Muda TKI,Golongan Ruang II/b.
	Lanjutan	III/b	150	Rp. 265.000		Diklat fungsional tingkat terampil Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-
	Donyolio	Ш/с	200	Rp. 325.000	58 th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Penyelia	III/d	300			
	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli : Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditentukan Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a Diklat fungsional tingkat ahli Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang pelatihan dan pembelajaran paling singkat 2 th; Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.
	PG GIIId	III/b	150			
	Muda	Ш/с	200	- Rp. 400.000		
Ahli	Muda	III/d	300			
		IV/a	400			
	Madya	IV/b	550	Rp. 500.000	60 th	
	·	IV/c	700			

Inspektur Mutu Hasil Perikanan

: Nomor 9 Tahun 2017, Tanggal 26 Januari 2018 PERMENPAN-RB 1. Nomor 5 Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018 2 PERATURAN BKN

3. **PENGERTIAN** Jabatan Fungsionar Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, wewendrig, dan hak untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

: Melaksanakan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang meliputi **TUGAS JABATAN** 4.

persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan

PERPRES TUNJANGAN PERATURAN BUP PP Nomor 11 Tahun 2017 6.

: Kementerian Kelautan dan Perikanan **INSTANSI PEMBINA** 7.

: Ilmu Hayat 8. **RUMPUN JABATAN**

: PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahti Madya dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan perikanan dan unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Pusat; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit Jabatan pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Angka Kredit Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama dan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. UJI KOMPETENSI:

Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP ɗan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam iabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Japat	jabatannya sesuai ketentuan yang beriaku.									
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
	Ahli	III/a	100		F0.1	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;				
	Pertama	πљ	150		58 th	 memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani; berijasah paling rendah sarjana (s1) atau 				
	Ahli Muda 58th	Diploma IV (DIV) bidang perikanàn, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun								
		III/d	300			oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir				
Keahlian	Ahli Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling kurang 2 th;				
		IV/b	550							
		IV /c	700							
	Ahli Utama	IV/d	850			 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli 				
		IV/e	1050		65 th	Pertama dan Ahli Muda; b. 55th utk menduduki jenjang Ahli Madya; c. 60th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNSyg telah menduduki JPT.				

Jaksa

: Nomor 18/MENPAN/1989 jo Nomor 41 /MENPAN/1990, Tanggal 30 Januari 1989 **KEPMENPAN-RB**

: Nomor 005/JA/8/1990 dan Nomor 42/SE/1990, Tanggal 12 Mei 1990 PERATURAN BERSAMA

: Jaksa adalah PNS yang oleh atau berdasarkan perpu diberi tugas, wewenang dan PENGERTIAN tanggungjawab sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama

sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Melaksanakan sebagai alat negara penegak hukum dan keadilan yang terutama sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 117 Tahun 2014, Tanggal 17 September 2014

6. PERATURAN BU P : UUNomor 16 Tahun 2004

7. INSTANSI PEMBINA : Kejaksaan Agung

8. RUMPUN JABATAN

9. LINGKUP BERLAKU : Kejaksaan Agung

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Jaksa Agung bagi Jaksa Madya, Jaksa Utama Pratama dan Jaksa Muda sampai Utama

b. Jaksa Agung Muda bidang pembinaan bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda

c. Kejati bagi Ajun Jaksa Madya, Ajun Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Jaksa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ajun Jaksa Madya	III/a	100	Rp. 2.400.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	Syarat pengangkatan pertama:
Ajun Jaksa	III/b	150	Rp. 3.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	Berijazah serendah- rendahnya Sarjana Hukum Pangkat serendah-
Jaksa Pratama	Ш/с	200	Rp. 3.600.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a
Jaksa Muda	III/d	300	Rp. 4.200.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	Diklat fungsional tingkat ahli Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
Jaksa Madya	IV/a	400	Rp. 6.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	
Jaksa Utama Pratama	IV/b	550	Rp. 7.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	Syarat pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat
Jaksa Utama Muda	IV/c	700	Rp. 8.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	pengangkatan pertama; 2. Pemah menjadi Jaksa
Jaksa Utama Madya	IV/d	850	Rp. 9.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	
Jaksa Utama	IV/e	1000	Rp. 10.000.000	Dpt diperpanjang s.d 62 th	

Kataloger

1. PERMENPAN-RB : PER/07/KEP/M.PAN/5/2007, Tanggal 3 Mei 2007

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PER/05/M/IV/2008 dan Nomor 9 A Tahun 2008, Tanggal 4 April 2008

3. PENGERTIAN : Kataloger adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan

kodifikasi materiel pertahanan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi materiel pertahanan mulai dari identifikasi

data meteriel, kodifikasi data materiel, dan publikasi katalog pertahanan.

5. PERPRES TUNJANGAN : ...

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA
8. RUMPUN JABATAN
9. LINGKUP BERLAKU
10. PEJABAT PENETAP PAK:

S Kementerian Pertahanan
1 Hak Cipta, Paten, dan Merek
2 PNS Kementerian Pertahanan

a. Sekjen Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Kataloger Madya dibantu oleh Tim Penilai JF. Kataloger

 Kepala Pusat Kodifikasi Dephan/Pejabat lain yang ditunjuk bagi Kataloger Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Kataloger Pertama dan Muda dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Kataloger

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI

Kataloger Terampil yang memperoleh Ijasah S1/D.IVdapat diangkat menjadi Kataloger Ahli dengan syarat:

- a. Ijazah ya diperoleh sesuai dan tugas pokok dan kualifikasi yang ditentukan dan ditetapkan instansi pembina
- b. Paling kurang telah 1th dalam pangkat terakhir;
- c. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda, golru III/a
- d. Telah ikut dan lulus diklat fungsional dibidang kodifikasi materiel pertahanan keahlian
- e. DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Kataloger yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golr	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil :
		II/b	40			1. Berijazah SLTA
	Pelaksana	II/c	60		58th	2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil		II/d	80			Muda, golongan ruang II/a.
	Pelaksana	III/a	100		58th	3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
	Lanjutan	Ш/b	150		Joui	sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Penyelia	III/c	200		E04-	
		III/d	300		58th	
	Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli : 1. Berijazah paling rendanhS.1/D.IV sesuai
	ratama	III/b	150		3641	dengan kualifikasi yang telah ditentukan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a 3. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Persyaratan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Telah Mengikuti dan lulus diklat fungsional dibdg kodifikasi materiel pertahanan; 3. Memiliki pengalaman dibdg kodifikasi materiel pertahanan paling kurang 2 th; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun.
	No. de	Ш/с	200		EO.H.	
Ahli	Muda	III/d	300		58th	
Anii		IV/a	400			
	Madya	IV/b	550		60 th	
		IV/c	700			

Konselor Adiksi

PERMENPAN-RB
 Nomor 44 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
 PERATURAN BKN
 Nomor 15 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019

3. PENGERTIAN : Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional

Konselor Adiksi

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan

korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Badan Narkotika Nasional

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan dan/atau Ilmu sosial

9. LINGKUP BERLAKU : BNN

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Konselor Adiksi Ahli Muda di lingkungannya.

11. KENAIKAN JABATAN

Konselor Adiksi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Konselor Adiksi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Pertama	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang Ilmu Psikollogi, Illmu Kesehatan Masyarakat, Ilmu
	T Crtama	III/b	150		58 th	Kesejahteraan Sosial, atau Ilmu Bimbingan dan Konseling; 2.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Keahlian	Muda eahlian	III/c	200		58 th	Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 3.memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yg dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; dan 4.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/d	300		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.memiliki pengalaman di bidang rehabilitasi
		IV/a	400		60 th	narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling sedikit 2 (dua) tahun; 3.nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
	Madya	IV/b	550		60 th	dalam 2 (dua) tahun terakhir 4.berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
		IV/c	700		60 th	b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.

Mediator Hubungan Industrial

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/06/M.PAN/4/2009, Tanggal 7 April 2009

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009, Tanggal 17 September 2009

PENGERTIAN : Mediator Hubungan Industrial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta mediasi perselisihan

hubungan industrial di luar pengadilan.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta penyelesaian

perselisihan industrial.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 94 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan

8. RUMPUN JABATAN : Hukum dan peradilan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Ketenagakerjaan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Dirjen yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang pembinaan HIbagi Mediator Hubungan Industrial Madya dibantu Tim Penilai Pusat

 b. Direktur yang bertugas dibidang penyelesaian perselisihan HIbagi MHI Pertama s.d Madya dibantu TimPenilai Unit Keria

c. Kepala Dinas Provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan bagi MHI Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas dan bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan bagi MHI
Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Mediator Hubungan Industrial yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	Ш/а	100	— Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/ D.1V sesuai dengan kualifikasi
retalla	ш/ь	150	14131000		pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a 3. Paling lama 2th setelah diangkat harus ikut Diklat fungsional MHI dan mendapat Legitimasi sebagai MHI dari Mennakertrans	
	Ш/с	200				
Ahli	Muda	III/d	300	Rp. 960.000	58 th	4. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
Mady		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang hubungan Industrial paling singkat 2
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	
		IV/c	700			tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.

Medik Veteriner

1. PERMENPAN-RB : Nomor 52 Tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11 Tahun 2013, Tanggal 6 Maret 2013
3. PENGERTIAN: Tahatan fungsional Medik Veteriner adalah jahatan yang mempunyai mang lingkun

: Jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungiawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan

hewan yang diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan

kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta

pengembangan kesehatan hewan.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekretaris Jenderal Kementerian pertanian bagi Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/b s.d utama di lingkungan Kementerian Pertanian, provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

- b. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian pertanian bagi Medik Veteriner Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian dibantu Tim Penilai Kementerian
- c. Pejabat eselon IIyang membidangi kesehatan hewan provinsi bagi Medik Veteriner Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- d. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Medik Veteriner Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Medik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Medik Veteriner yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	Ш/ь	150	Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama:
	Muda	III/c	200	D 4 000 000	58th	Berijazah paling rendah Dokter Hewan; Pangkat paling rendah penata Muda
	Muda	Ⅲ /d	300	Rp. 1.080.000	30 ti	Tingkat I,golongan ruang III/b;
		IV/a	400			3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun
Madya	Madya	IV/b	550	Rp. 1.350.000	60 th	terakhir.
		IV/c	700			
Ahli		IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan dan/atau pengamanan produk hewan hewan sekurang-kurangnya 2 th; 3. Usia paling tinggi 50 tahun; dan 4. Mengikuti dan lulus uji ompetensi dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan
	Utama	IV/e	1050	Rp. 1.560.000	65 th	

Nutrisionis

: Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001, Tanggal 4 April 2001 **KEPMENPAN-RB**

KEPUTUSAN BERSAMA: Nomor 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001, Tanggal 16 Agustus 2001

: Nutrisionis adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh PENGERTIAN

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang pelayanan

gizi, makanan dan dietetik.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan,

penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat

dan di Rumah Sakit.

PERPRES TUNJANGAN Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP PP Nomor 11 Tahun 2017 7. **INSTANSI PEMBINA** Kementerian Kesehatan

8. RUMPUNJABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNSPusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Dirjen bina kesehatan masyarakat Depkes dan Kesos bagi Nutrisionis Madya dibantu Tim Penilai Pusat b. Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat bagi Nutrionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Direktorat

Pimpinan unit kerja bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai

Instansi

d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Nutrisionis Pelaksana s.d Penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Nutrisionis Pelaksana s.d penyelia dan Nutrisionis Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KETINGKAT AHLI

Nutrisionis Terampil yang memperoleh Ijasah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Nutrisionis Ahli dengan syarat:

- a. Pendidikan/ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn tugas pokok jabatan Nutrisionis;
- b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir;
- d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal ya ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- diberhentikan sementara sebagai PNS;
- menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan iabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Nutrisionis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

					_	
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240,000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat
	reiaksaria	II/d	80	тф. 2-10.000	36 U	Terampil : 1. Berijazah DIII Gizi
Terampil	Pelaksana	III/a	100	D= 26E 000		2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur,
Lanjutan Penyelia	Lanjutan	III/b	150	Rp. 265.000	58th	golongan ruang II/c. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
	Donyolia	III/c	200	D= 500,000	58th	sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Periyelia	III/d	300	Rp. 500.000	3641	dalam saw tahun ta'aniii
	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S1/ D.IV
		Ш/ь	150			(Gizi). 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam pelayanan gizi, makanan dan dietetik paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.
		Ш/с	200	Rp. 600.000	58 th	
AL:	Muda	III/d	300			
Ahli		IV/a	400			
	Madya	IV/b	550	Rp. 850.000	60 th	
_		IV/c	700			

Okupasi Terapis

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/123/M.PAN/12/2005, Tanggal 30 Desember 2005

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 101/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 4 Tahun 2006, Tanggal 21 Februari 2006

3. PENGERTIAN : Okupasi Terapis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan

okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan,

pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan

waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta

pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi fungsional

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen

- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
- d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes bagi Okupasi Terapis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Okupasi Terapis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Pelaksana Pelaksana	Balalana	П/с	60		FO#-	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah paling rendah D.III/
	Pelaksana	II/d	80	Rp. 240.000	58 th	Akademi okupasi terapi 2. Pangkat paling rendah Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. Tersedia formasi 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan okupasi terapi paling singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50 tahu.n
	Pelaksana Lanjutan	Ш/а	100	Rp. 265.000	58 th	
Terampil		III/b	150		50 4.	
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 500.000	58 th	
		Ш/d	300	тф. 300.000	35 ui	

Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Operator SIAK)

PERMENPAN-RB : Nomor 34 Tahun 2017, Tanggal 11 Desember 2017

PERATURAN BKN : Nomor 17 Tahun 2018, 21 September 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah

jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak

untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIAK yang meliputi pelayanan pendaftaran

penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan Surat Keterangan Kependudukan,

dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

5. PERPRESTUNJANGAN:

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUN JABATAN : Kekomputeran

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Dalam Negeri /Daerah (Kabupaten/Kota)

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Penyelia dibantu Tim Penilai Pusat;

- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; diabantu Tim Penilai Instansi;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk angka kredit bagi Operator SIAK Terampil dan Operator SIAK Mahir di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Operator SIAK yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Operator SIAK yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/c	60			Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;
	Terampil	pil II/d 80		58 th	 memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani; þenjazah paling rendah DIIIbidang 	
Keterampilan	Mahir	III/a	100		58 th	komputer; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		ш/ь	150			
		Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Penyelia	III/d	300		58 th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; Memiliki pengalaman di bdg pengelolaan SIAK paling kurang 2 th; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir Berusia paling tinggi 53 th.

Ortotis Prostetis

PERMENPAN-RB : Nomor PER/122/M.PAN/12/2005, Tanggal 30 Desember 2005

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 100/MENKES/PB/II/2006 dan Nomor 3 Tahun 2006, Tanggal 21 Februari 2006

3. PENGERTIAN : Ortotis Prostetis adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan ortotik

prostetik pada sarana pelayanan kesehatan.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesia, pemeriksaan,

pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada

pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Perka BKN Nomor 37 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik Depkes bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen

b. Kepala DinasKesehatan Provinsi bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat selain Depkes bagi Ortosis Prostetis Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS:
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Ortotis Prostetis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana	П/с	60			 Syarat pengangkatan pertama: Berijazah serendah-rendahnya Diploma III/Akademi ortotik prostetik. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Gol. Ruang II/c. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		II/d	80	Rp. 240.000	58 th	
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	D., 265,000	58 th	
Terampil		III/b	150	Rp. 265.000	58 W	
	Penyelia	Ш/с	200	D. 500 000	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
		III/d	300	Rp. 500.000		Memiliki pengalaman dalam pelayanan Ortotik prostetik paling singkat 2 tahun; Berusia paling tinggi 50 th

Pamong Belajar

1. PERMENPAN-RB : Nomor 15 Tahun 2010, Tanggal 6 Juli 2010

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 03/III/PB/2011 dan Nomor 8 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan Nonformal dan Informal

pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada UPT/UPTD dan satuan PNFI sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg

diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan

model bidang PNFL

3. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 72 Tahun 2013, PerKa Nomor 39 Tahun 2007

4. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

5. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

6. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya

7. LINGKUP BERLAKU : PNSDaerah

8. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Mendiknas atau pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Pamong Belajar Madya, pangkat Pembina TkI,golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan UPTdan UPTDdibantu Tim Penilai Pusat

- b. Direktur atau pejabat eselon IIyang membidangi Pamong Belajar bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPT dibantu Tim Penilai Direktorat
- c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Provinsi bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya, pngkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPTD Provinsi yang bersangkutan dibantu Tim Penilai Provinsi
- d. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Pamong Belajar Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan UPTD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pamong Belajar yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	III/a 100 Pertama Rp. 500.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah paling rendah			
		Ш/ь	150	141300.000	3501	S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tk ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi Syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pendidikan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun 4. Diklat fungsional Pamong Belajar.
	Muda	Ш/с	200	Rp. 750.000	58 th	
Ahli		III/d	300	147730.000	33 3.	
		IV/a	400			
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.000.000	60 th	
		IV/c	700			

Pamong Budaya

PERMENPAN-RB : Nomor PER/09/M.PAN/5/2008, Tanggal 13 Mei 2008

PERATURAN BERSAMA Nomor BP.37/KP.403/MKP/2010 dan Nomor 11 Tahun 2010, Tanggal 6 april 2010

: Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNSdengan hak dan kewajiban 3. PENGERTIAN

yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan. 4.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 74 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. **RUMPUN JABATAN** : Penerangan dan Seni Budaya

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. **PEJABAT PENETAP PAK:**

- a. Pimpinan Instansi yang bertggjwab di bid.Kebudayaan/Pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Pamong Budaya Madya dibantu Tim Penilai Pusat
- b. Pejabat eselon Ilyang membidangi pembinaan kebudayaan yang ditunjuk instansi pembina bagi Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja
- c. Pimpinan instansi/Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II)yang bertggjwb di bidang kebudayaan bagi Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
- d. PPKD Provinsi/Pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II)yg bertggjwb di bidang kebudayaan bagi Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda diling.masing-masing dibantu Tim Penilai Provinsi
- e. PPKD Kabupaten/Kota/Pejabat yang ditunjuk (paling rendah eselon II) yang bertggjwb di bidang Kebudayaan bagi Pamong Budaya Pelaksana s.d Penyelia dan Pamong Budaya Pertama-Muda di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPILKE TINGKATAHLI

- a. Pamong Budaya yang memperoleh ijasah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pamong Budaya Ahli, dengan syarat:
 - 1) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pamong Budaya Ahli;
 - Julus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pamong Budaya Ahli;
 - 3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - 4) tersedia formasi untuk jabatan Pamong Budaya Ahli.
- b. Pamong Budaya Terampil yang akan beralih menjadi Pamong Budaya Ahli diberikan angka kredit dari ijasah S1/DJV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan:
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Pamong Budaya yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

		_	_			
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58th	Berijazah paling rendah DII sesuai dgn kualifikasi pendidikan
		II/d	80			2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI,
Terampil	Pelaksan	III/a	100	Rp. 265.000	58th	golongan ruang II/b 3. Diklat fungsional Tk. Terampil
	a Lanjutan	Ш/b	150	кр. 203.000	36ui	Setiap unsurpenilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58th	satu tahun terakhir
	III/d	300		3501		
	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58th	 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: Berijazah paling rendahS.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a Diklat fungsional tingkat ahli Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 1th terakhir
		III/b	150			
		Ш/с	200			
Ahli	Muda	III/d	300	Rp. 400.000	58th	
		IV/a	400	Rp. 530.000		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Madya	IV/b	550		60th	Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman dlm kegiatan
_		IV/c	700			pembinaan kebudayaan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 50 th

Paramedik Karantina Hewan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 18 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 43 Tahun 2019, Tanggal...

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS

dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan

hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. PERPRES TUNJANGAN:

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani untuk Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan Pemula s.d Paramedik Karantina Hewan Penyelia dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan

11. UJI KOMPETENSI:

Paramedik Karantina Hewan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh pada JPTdan jabatan Administrasi;
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. tugas belajar lebih dari 6(enam) bulan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Paramedik Karantina Hewan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

_						
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Target Angka Kredit Setiap tahun	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pemula	II/a	15	3,75	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;
		II/b	20	5		memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani;
	Terampil	II/c	20	5	58 th	 berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan; mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; Memiliki pengalaman di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling kurang 2 th; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2thterakhir Berusia paling tinggi 53 th.
		II/d	20	5		
	Mahir	Ш/а	50	12,5		
Keterampilan		Ш/ь	50	12,5	58 th	
	Penyelia	III/c	100	25		
		III/d	100	25	58 th	

Paramedik Veteriner

PERMENPAN-RB : Nomor 53 Tahun 2012, Tanggal 29 Agustus 2012

PERATURAN BERSAMA : Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013, Tanggal 6 Maret 2013 2.

: Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yarrg mempunyai ruang 3. **PENGERTIAN**

lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner pengendalian di bidang hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban

secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

: Menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan **TUGAS POKOK**

penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

: Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **PERPRESTUNJANGAN** 5.

: PP Nomor 11 Tahun 2017 6. PERATURAN BUP : Kementerian Pertanian 7. **INSTANSI PEMBINA**

: Ilmu Hayat **RUMPUN JABATAN**

: PNS Kementerian Pertanian / Daerah LINGKUP BERLAKU 9.

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat eselon Ilyang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerjan pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula s.d penyelia di lingkungan Kementerian pertanian dibantu Tim Penilai Kementerian

- b. Pejabat eselon Ilyang membidangi fungsi kesehatan hewan di provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula s.d Penyelia di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- c. Pejabat eselon Ilyang membidangi fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula s.d Penyelia di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Paramedik Veteriner yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Paramedik Veteriner yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

iabatar	iabatannya menurut ketentuan yang berlaku.									
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah paling rendah SPP/SNAKMA				
	Pelaksana II/b 40 II/c 60 II/d 80 Rp. 360.000 5	II/b	40			dan SMK di bidang peternakan atau kesehatan hewan				
		58 th	2. Pangkat paling rendah Pengatur							
		II/d	80			Muda, golongan ruang II/a 3. Tersedia formasi 4. Nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam satu tahun terakhir				
	Pelaksana	III/a	100	- Rp. 480.000	58 th					
Terampil	Lanjutan	III/b	150		38 ui					
Terampii _	Penyelia	Ш/с	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan paling kurang 2 th; 3. Usia paling tinggi 50 tahun; 4. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang keseharan hewan dan pengamanan produk hewan.				
		III/d	300	Rp. 810.000						

Pekerja Sosial

KEPMENPAN-RB : Nomor KEP/03/M.PAN/1/2004, Tanggal 16 Januari 2004

KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 05/HUK/2004dan Nomor 09 Tahun 2004, Tanggal 8 Maret 2004

: Pekerja Sosial adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial **PENGERTTAN**

dilingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya. : Menviapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan

pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

PERPRES TUNJANGAN Nomor 61 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Sosial

8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu sosial dan yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

TUGAS POKOK

Mensos bagi Pekerja Sosial Madya dibantu Tim Penilai Departemen

Dirien Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Pekeria Sosial Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekeria Sosial Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

Pimpinan Instansi Pusat diluar Depsos bagi Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi

Gubernur di Provinsi bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

Bupati/Walikota atau pejabat lain yg ditnjuk (paling rendah eselon II)yg membidangi pelayanan kesejahteraan sosial di kabupaten/kota bagi Pekerja Sosial Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pekerja Sosial Pertama s.d Madya di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota bersangkutan dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KETINGKAT AHLI

Pekerja Sosial Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pekerja Sosial Ahli dengan syarat:

Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pekerja Sosial Ahli;

Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;

Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dlm DP-3 paling kmg bernilai baik dlm 1 th terakhir;

d. Memenuhi angka kredit minimal untuk Pekerja Sosial Ahli.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan iabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pekerja Sosial yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil : 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTAsesuai dgn
Terampil Pel		II/b	40	Rp. 240.000		kualifikasi pendidikan
	Pelaksana	П/с	60		58th	2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,
		II/d	80]		golongan ruang II/a.
	Pelaksana	III/a	100	Rp. 275.000	58th	3. Diklat fungsional tingkat terampil
	Lanjutan	III/b	150	кр. 273.000	30 41	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 525.000	58th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	renyena	III/d	300		3501	тегакпіг.
	Deuteure	III/a	100	D. 200 000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan
	Pertama	III/b	150	Rp. 300.000		kualifikasi pendidikan.
		Ш/с	200			pangkat palingrendah Penata Muda, golru III/a Diklat fungsional tingkat ahli
Ahli	Muda	III/d	300	Rp. 550.000	58th	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1th terakhir
~		IV/a	400			Svarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Madya	IV/b	550	Rp. 7 90.000	60 th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang pelayanan kesejahteraan sosial paling singkat 2 th;
_		IV/c	700			Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir yg diduduki.

Pelatih Olahraga

PERMENPAN-RB
 Nomor 40 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2016
 PERKA BKN
 Nomor 38 Tahun 2015, Tanggal 9 Oktober 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan

pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM,

Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan

kompetensi keolahragaan yang dimiliki

5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

6. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pemuda dan Olahraga

7. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya 8. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

9. PENGANGKATAN DARIJF ASISTEN PELATIHOLAHRAGA KEJF PELATIH OLAHRAGA

Asisten Pelatih Olahraga yang memperoleh Ijasah S1/DIV dapat diangkat dalam jabatan Pelatih Olahraga dgn syarat:

- a. berijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang kepelatihan keolahragaan;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga;
- d. memiliki Sertifikat Pelatih Olahraga;
- e. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga; dan
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir

10. UJI KOMPETENSI:

Pelatih Olahraga yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pelatih Olahraga yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	golru	Angka Kredit	Jumlah AK Minimal / thn	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan					
	Ahli	III/a	50	12,5		Syarat Pengangkatan Pertama: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/					
	Pertama	Ш/b	50	12,5	58 th	Diploma IV (D-IV) Bidang Kepelatihan					
		III /c	100	25		Keolahragaan; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;					
	Ahli Muda	III/d	100	25	58 th	 c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga; d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahunterakhir 					
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5		Syarat Pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: a. tersedia lowongan formasi; b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV(DIV) Bidang Kepelatihan Keolahragaan;					
Keahlian		IV/b	150	37,5							
		IV/c	150	37,5	60 th	 c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga e. memiliki pengalaman dlm pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5 tahun; dan f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 th terakhir; g. usia paling tinggi 45 tahun. 					

Pelelang

PERMENPAN-RB : Nomor 43 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014 **PERKA BKN** : Nomor 11 Tahun 2016, Tanggal 17 Mei 2016

: Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan PENGERTIAN

instansi pemerintah

TUGAS POKOK : Melaksanakan penjualan barang secara lelang, meliputi lelang eksekusi, lelang

noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela.

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 6. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Keuangan

RUMPUN JABATAN : Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan 7.

8. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Kementerian Keuangan

WI KOMPETENSI:

Pelelang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

10. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

11. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pelelang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		III/a	50	12,5		Syarat pengangkatan pertama: a. berijazah paling rendah Sarjana
	Ahli Pertama	ш/ь	50	12,5	58 th	(S-1)/ Diploma IV (D-IV) Bidang hukum, Ekonomi Manajemen/
		Ш/с	100	25		Akuntansi atau bidang lain yang ditentukan instansi pembina; b. pangkat paling rendah Penata
	Ahli Muda	Ш/d	100	25	58 th	Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Pelelang;
						d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		D//-				Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: a. tersedia lowongan formasi untuk
		IV/a	150	37,5	+	 a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pelelang; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus pelatihan
Keahlian		IV/b	150	37,5		
	Ahli Madya	IV/c	150	37,5	60 th	fungsional Pelelang e. pelaksanaan tugas di bidang lelang paling kurang 2 tahun; f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan a. Berusia paling tinggi 50 tahun

Pemadam Kebakaran

1. PERMENPAN-RB : Nomor 16 Tahun 2019, Tanggal 05 September 2019

2. PERATURAN BKN : Nomor

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan

ııngkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penceganan dal penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan:

4. TUGAS POKOK : melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan

5. PERPRESTUNJANGAN :

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yg membidangi suburusan kebakaran atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama membidangi suburusan kebakaran yg ditunjuk, untuk AK bagi Pemadam Kebakaran Penyelia.

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yg membidangi suburusan kebakaran, untuk AK bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Terampil, dan Pemula di lingkungan pemerintah provinsi; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penanggulangan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran, untuk AK bagi Pemadam Kebakaran Mahir, Terampil, dan Pemula.

11. KENAIKAN JABATAN

Pemadam Kebakaran yang akan naik jabatan setiingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS; f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Pemadam Kebakaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keterampilan	Pemula	II/a	15		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
	Terampil	II/b	20		58 th	 sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat; mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
		II/c	20			
	Mahir	II/d	20			dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
		III/a	50		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama:
	Penyelia	III/b	50			 memenuhi syarat pengangkatan pertama; memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemadaman kebakaran paling singkat 2 (dua) tahun; nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
		III/c	100		58 th	baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 4. h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun
		III/d	100			

Pembimbing Kemasyarakatan

PERMENPAN-RB Nomor 22 Tahun 2016, Tanggal 9 Nopember 2016 2. **PERKA BKN** Nomor 5 Tahun 2017, Tanggal 12 April 2017

PENGERTIAN Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di

bidang bimbingan kemasyarakatan

TUGAS JABATAN Melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan yang meliputi penelitian

kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim

pengamat pemasyarakatan dalam penanganan klien pemasyarakatan

PERPRES TUNJANGAN Nomor

PERATURAN BUP PP Nomor 11 Tahun 2017 7. **INSTANSI PEMBINA** Kementerian Hukum dan HAM

RUMPUNJABATAN Manajemen LINGKUP BERLAKU

PNS Kementerian Hukum dan HAM 10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan kemasyarakatan untuk Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya s.d Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Pusat.

b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah untuk Angka

Kredit bagi:

1) Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda s.d Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2) Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas I;dan

3) Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama s.d Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas IL

c. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit bagi Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama s.d Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas IKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Balai.

Pembimbing Kemasyarakatan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pembimbing Kemasyarakatan yang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

	annya menurut k				-	b sid point of dupate didrighate herriban dularii
Kategori	Jenjang Jabatan	Golr	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama/Ahli	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;
	Pertama	III/b	150			mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan
	Muda/Ahli	Ш/с	200		58th	pemasyarakatan serta perlindungan anak; 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
ı	Muda	III/d	300		500.	4. sehat jasmani dan rohani;
	Madya/Ahli Madya	IV/a	400			 berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang ilmu sosial (kesejahteraan sosial, sosiologi, hukum, psikologi, ilmupemasyarakatan dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina); pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; mengikuti dan lulus diklat fungsional kategori keahlian di bid bimbingan kemasyarakatan; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: memenuhi syarat pengangkatan pertama; tersedia formasi untuk jabatan Pembimbing Kemasyarakatan; memiliki pengalaman di bidang bimbingan kemasyarakatan paling singkat 2 tahun; usia paling tinggi: 55 tahun utk menduduki Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda 57 th utk menduduki Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya dan Utama/Ahli Utama
		IV/b	550		60 th	
Keahlian		IV/c	700			
	Utama/Ahli Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050			

Pembimbing Kesehatan Kerja

1. PERMENPAN-RB : Nomor 13 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013 jo Permenpan RB Nomor 47 Tahun 2013

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 50 Tahun 2013 dan Nomor 18 Tahun 2013, Tanggal 16 Juli 2013 jo Nomor 22 Tahun 2014

dan Nomor 15 Tahun 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang

ingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan upaya

kesehatan kerja yang diduduki oleh PNS

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 112 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Direktur Jenderal yang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi Madya, pangkat Pembina TkI, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Pusat
- b. Pejabat eselon IIyang membidangi kesehatan kerja Kementerian Kesehatan bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
- c. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan kerja instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
- d. Pejabat eselon IIyang membidangi kesehatan kerja Provinsi bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
- e. Pejabat eselon IIyang membidangi kesehatan kerja Kabupaten/Kota bagi Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Pembimbing Kesehatan Kerja yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pembimbing Kesehatan Kerja yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam

iabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Januara	miya malalack	ocorredari ya	ing benanta			
Tingkat	Jenjang Jabata n	Golru	Angk a Kredit	Tunjang an Jabatan	Batas Usia Pensi un	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100	D E40.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama:
l		Ш/b	150	Rp. 540.000		 berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes; pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Syarat Pengangkatan Perpindahan dari jabatan lain: memenuhi syarat pengangkatan pertama; usia paling tinggi 50 tahun; memiliki pengalaman di bidang upaya kesehatan kerja paling kurang 2 th;
	Muda	Ш/с	200	Rp. 960.000	58 th	
		III/d	300			
Ahli		IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	
<u> </u>	Madya	IV/b	550			
		IV/c	700			

Pembina Jasa Konstruksi

I. PERMENPAN-RB : Nomor 38 Tahun 2013 jo Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2016, tgl 23 Desember 2016

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 04/PRT/M/2014dan Nomor 8 Tahun 2014, Tanggal 28 April 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pembinaan jasa

konstruksi yang diduduki oleh PNS

4. TUGAS POKOK : Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yg terdiri dari kegiatan perencanaan

program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan, dan pengembangan pembinaan jasa

konstruksi

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pembina Jasa Konstruksi Madya, pangkat Pembina Tk I, golru IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, instansi pusat selain Kementerian PU, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

- Kepala Badan yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum atau pejabat eselon II dibawahnya yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jasa konstruksi instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/a s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Pekerjaan Umum dibantu Tim Penilai Instansi;
- d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Provinsi bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi;
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pembinaan jasa konstruksi Kabupaten/Kota bagi Pembina Jasa Konstruksi Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSI:

Pembina Jasa Konstruksi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATANAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pembina Jasa Konstruksi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam iabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Java	itaririya Sesua	i keteritua	ii yang be	IIaku		
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma
Ahli	ratama	III/b	150		500.	IV(DIV) bidang teknik, ekonomi, dan hukum
	Muda	Ш/с	200		58th	serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri PU;
		III/d	300		36 UI	2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
	Madya	IV/a	400			3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
		IV/b	550		60th	pelatihan fungsional di bidang pembinaan jasa konstruksi; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		IV/c	700			
	Utama	IV/d	850		65 th	Syarat Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. tersedia formasi untuk jabatan Pembina Jasa Konstruksi; 3. memiliki pengalaman di bidang pembinaan jasa konstruksi paling kurang 2 tahun; 4. usia paling tinggi: a. 54 tahun utk menduduki Pembina Jasa Konstruksi Pertama dan Muda b. 56 th utk menduduki Pembina Jasa Konstruksi Madya dan Utama
		IV/e	1050			

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

: Nomor 7 Tahun 2018, Tanggal 26 Januari 2018 PERMENPAN-RB : Nomor 4Tahun 2018, Tanggal 5 April 2018 PERATURAN BKN 2

: Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang **PENGERTIAN** mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan

kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

: Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang TUGAS JABATAN 4.

meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan

5. PERPRES TUNJANGAN

: PPNomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP

: Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. **INSTANSI PEMBINA**

8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Havat

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Kelautan dan Perikanan /Daerah

PEJABAT PENETAP PAK

 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan

Kementerian Kelautan dan perikanan, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota dibantu Tim Penilai Pusat, b. Pejabat Pimpinan Tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja; c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk

Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di ringkungan Pemerintah

Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSI

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. ditugaskan secara penuh pada JPTdan jabatan Administrasi;

- d. cuti di luar tanggungan negara; e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;
		Ш/b	150			sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah sarjana (S1)/DIVdi
	Ahli Muda	Ш/с	200		58 th	bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknorogi/ilmu pangan, atau ilmu gizi; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh
		III/d	300			Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir
Keahlian		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Ahli Madya	IV/b	550		60 th	Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6;
		IV/c	700			Memiliki pengalaman pelaksanan tugas di bidang pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan paling kurang 2th
		IV/d	850			nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2tahun terakhir Berusia paling tinggi:
	Ahli Utama	IV/e	1050		65 th	 a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th untuk menduduki jenjang Ahli Madya; c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNSyg telah menduduki JPT

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

PERMENPAN-RB
 Nomor 51 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
 PERATURAN BKN
 Nomor 17 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019

3. PENGERTIAN : Pembina Teknis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan

pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan negara.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perbendaharaan

negara.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan
8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan Anggaran
9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kesekertariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

11. KENAIKAN JABATAN

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Terampil	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS; 2.memiliki integritas dan moralitas yg baik;
II/d 80 Ketrampilan Mahir	. c. up.i	II/d	80		58 th	3.sehat jasmani dan rohani; 4.berijazah paling rendah D3 bidang keuangan, akuntansi, administrasi dan
		58 th	kebendaharaan negara, atau bidang lainnya yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi pembina; 5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS			
		III/b	150		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
	Penyelia	III/c	200		58 th	2.Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan negara
		III/d	300		58 th	paling singkat 2 tahun.

Pemeriksa

1. PERMENPAN-RB : Nomor 49 Tahun 2018, Tanggal 10 Oktober 2018

2. PERATURAN BKN : ...

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa yang selanjutnya disingkat JFP adalah

jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

noners were did duly bis old DNC di lingly mean DDV

4. TUGAS POKOK negara yang diduduki oleh PNS di lingkungan BPK

: melakukan kegiatan pemeriksaan yang meliputi perumusan erencanaan strategis pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan pemeriksaan, penguatan aspek hukum pemeriksaan, pemeriksaan dan review teknologi informasi, serta pengawasan/penjaminan mutu terhadap seluruh

pelaksanaan pemeriksaan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor......

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

8. RUMPUN JABATAN : Akuntan dan Anggaran

9. LINGKUP BERLAKU : PNS BPK

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Madya/Madya dan Pemeriksa Ahli Utama/Utama di lingkungan Kantor Pusat BPK dan BPK Perwakilan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang pengelolaan sumber daya manusia untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda/Muda di lingkungan Kantor Pusat BPK; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di BPK Perwakilan untuk Angka Kredit Pemeriksa Ahli Pertama/Pertama.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Ahli	Pertama	Ш/а	100		- 58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani;
		Ш/b	150		Sour	 berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pemeriksa; mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
	Muda	ш/с	200		F0.11	
		III/d	300		58th	Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 7. nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman pemeriksaan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi: a. 53 thn bagi yang akan menduduki JF Pemeriksa Ahli Pertama dan Pemeriksa Ahli Muda; b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Pemeriksa Ahli Madya; dan c. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Pemeriksa Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT
	Madya	IV/b	550		60 th	
		IV/c	700			
		IV/d	850			
_	Utama	IV/e	1050		65 th	

Pemeriksa Bea dan Cukai

: Nomor 31 Tahun 2016, Tanggal 29 Desember 2016 1. PERMENPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017, Tanggal 1 Agustus 2017 2. **PERKA BKN**

Pemeriksa Bea dan Cukai adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak 3. PENGERTIAN

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan

informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi dibidang kepabeanan dan cukai. : Melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-

undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi dibidang kepabeanan dan cukai.

Nomor 53 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP PP Nomor 11 Tahun 2017 7. **INSTANSI PEMBINA** Kementerian Keuangan

8. RUMPUNJABATAN : Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK :

PERPRESTUNJANGAN

TUGASJABATAN

4.

5.

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Madya dan Utama di lingkungan Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Pel Pemula/Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda di lingkungan Kanwil dan KPPBC dan UPTDirjen Bea dan Cukai dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
- c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bagi Pemeriksa Bea dan Cukai Pel Pemula/Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Pelayanan Utama Dirjen Bea dan Cukai dibantu Tim Penilai Wilayah
- PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI KATEGORI KETERAMIPLAN KE KATEGORI KEHLIAN 11.
 - a. PBC Kategori Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/D.IVdapat diangkat dlm Pemeriksa Bea dan Cukai Kategori Keahlian, dengan syarat:
 - 1) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli;
 - Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pemeriksa Bea dan Cukai Keahlian
 - Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya
 - b. PBC Kat.Keterampilan yg diangkat ke PBC Kat. Keahlian diberikan angka kredit dari Ijasah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69%dari diklat, pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
- **UJI KOMPETENSI:** 12.

Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan naik iabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan:
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, ÌÀ, JP ɗan Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 14. PENGANGKATAN KEMBALI: PBC yg diberhentikan karena poin b ṣ.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku									
Kategori	Jenjang Jabatan	Golr	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan			
	Pel Pemula/ Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama Kat. Keterampilan: 1. Berstatus PNS;			
		II/b	40	Rp. 240.000	58th	2. Memiliki integritas dan moralitas yg baik;			
	Pelaksana/ Terampil	II/c	60			Sehat jasmani dan rohani; Berijazah paling rendah SLTAdan sederajat atau			
Keterampilan		II/d	80			D3 bidang kepabeanan dan cukai atau			
	Pel Lanjutan/ Mahir	Ш/а	100	Rp. 300.000	58th	kualifikasi lain yg ditentukan Instansi Pembina; 5. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a			
		Ш/b	150	1		6. Diklat fungsional dibidg kepabeanan dan cukai;			
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 550.000	58th	7. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1thterakhir.			
		III/d	300			ddiani I dicaddiii.			
	Ahli Pertama	III/a	100	- Rp. 325.000	58th	Syarat pengangkatan pertama Kat. Keahlian:			
		Ш/b	150		35ti	Berstatus PNS; Amemiliki integritas dan moralitas yg baik;			
	0 la li 14 l	Ш/с	200	- Rp. 650.000	58th	3. Sehat jasmani dan rohani;			
	Ahli Muda	III/d	300	кр. 030.000	58 tn	4. Berijazah paling rendah S.1/D.IV dibidang kepabeanan dan cukai atau kualifikasi lain yg			
		IV/a	400			ditentukan. 5. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a			
	Ahli Madya	IV/b	550	Rp. 1.000.000	60th	6. Diklat fungsional dibidng kepabeanan dan cukai			
Keahlian		IV/c	700			7. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1thterakhir.			
Reallian	Ahli Utama	IV/d	850		65th	Syarat pengangkatanperpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibdg kepabeanan bea dan cukai paling kurang 2 tahun; 3. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 thterakhir. 4. Berusia paling tinggi: a. 50 th utk PBC Kategori Keterampilan; b. 53 th utk PBC Ahli Pertama dan Ahli Muda; c. 55 th utk PBC Ahli Madya; dan			
		IV/e	1050						

57th utk PBC Ahli Utama

Pemeriksa Desain Industri

1. PERMENPAN-RB : Nomor 36 Tahun 2013, Tanggal 4 Oktober 2013

PERATURAN BERSAMA : Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 11 Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan

pemeriksaan permohonan desain industri

4. TUGAS POKOK : Melakukan pemeriksaan permohonan desain industri yang meliputi perencanaan

pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil

pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan

pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 29 Tahun 2017, Tanggal 16 Maret 2017

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM8. RUMPUN JABATAN : Hak Cipta, Paten dan Merek

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM

10. PEJABAT PENETAP PAK:

 a. Pejabat Eselon Iyang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Desain Industri Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

b. Pejabat Eselon IIyang membidangi permohonan desain industri bagi Pemeriksa Desain Industri Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dibantu Tim Penilai Direktorat.

11. UJI KOMPETENSI:

Pemeriksa Desain Industri yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 12. PEMBEBASAN SEMENTARA (PEMBERHENTIAN menurut PP Nomor 11 Tahun 2017):
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa Desain Industriyang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

J	,,,,,,,,,,,,,,										
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan					
Pertama Muda Ahli Madya	Doubous	III/a	100	D 540 000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana					
	Ш/ь	150	Rp. 540.000	3541	(S1) bidang seni rupa, desain, dan/atau teknik atau kualifikasi						
	Muda	Ш/с	200	Rp. 960.000	58 th	pendidikan lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1thterakhir					
		III/d	300								
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan desain industri paling singkat 2 (dua) tahun;					
		IV/b	550								
		IV/c	700			3. berusia pàling tinggi: a. 53 th untuk Pemeriksa Desain Industri Pertama dan Muda b. 55 th untuk Pemeriksa Desain Industri Madya; 4. tersedia formasi					

Pemeriksa Karantina Tumbuhan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 16 Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018

2 : Nomor 29 Tahun 2019, Tanggal ... PERATURAN BKN

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNSdan

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati

: Melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan

hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. PERPRES TUNJANGAN :

6. : PPNomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian 7.

8. **RUMPUN JABATAN** : Ilmu Havat

: Kementerian Pertanian 9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

TUGAS JABATAN

4.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula s.d Penvelia dibantu Tim Penilai

Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Target Angka Kredit Setiap Tahun	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pemula	II/a	15	3,75	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;
		II/b	20	5	58 th	memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani;
	Terampil	II/c	20	5		4. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi
		II/d	20	5		bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman pelaksanan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling kurang 2 th 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi 53 th;
	Mahir	Ш/а	50	12,5	- 58 th	
Keterampilan		ш/ь	50	12,5		
	Penyelia	Ш/с	100	25		
		Ш/d	100	25	58 th	

Pemeriksa Keimigrasian

1. PERMENPAN-RB : Nomor 48 Tahun 2018, Tanggal 10 Oktober 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 32 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan

kegiatan pemeriksaan keimigrasian

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pemeriksaan keimigrasian.
5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 25 Tahun 2017, Tanggal 16 Maret 2017

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

8, RUMPUN JABATAN : Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Angka Kredit Pemeriksa Keimigrasian.

11. UJI KOMPETENSI:

Pemeriksa Keimigrasian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa Keimigrasian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

	_					
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredir	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pemula	II/a	40		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang
		baik; 3. sehat jas		3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sekolah		
	Terampil	П/с	60		5. mengikuti dan lulus uji Kompeter	Menengah Atas (SMA) atau sederajat; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
		II/d	80		58 th	Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun
recei ampiian		Ш/а	100		58 th	oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernila baiik dalam1 (satu) tahun terakhir bagi
	Mahir	ш/ь	150			PNS.
Per		Ш/с	200		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
	Penyelia	ш/d 300				memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan keimigrasian paling sedikit 2 (dua) tahun;
						3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernila baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan4. berusia paling tinggi 53 (lima puluh

tiga) tahun.

Pemeriksa Merek

PERMENPAN-RB : Nomor 34 Tahun 2013, Tanggal 40ktober 2013

PERATURAN BERSAMA: Nomor 11 Tahun 2014 dan Nomor 10 Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014

: Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, **PENGERTIAN** tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan

pendaftaran merek.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi perencanaan

> pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi

hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek.

PERPRESTUNJANGAN: Nomor 28 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

: PP Nomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM 8. **RUMPUN JABATAN** : Hak Cipta, Paten dan Merek 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Pejabat Eselon Iyang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina Tingkat Igolru IV/b s.d Pemeriksa Merek Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/e dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.

b. Pejabat Eselon Ilyang membidangi permohonan pendaftaran merek bagi Pemeriksa Merek Pertama, pangkat Penata Muda golru III/as.d Pemeriksa Merek Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dibantu Tim Penilai Direktorat

11. UJI KOMPETENSI:

Pemeriksa Merek yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa Merek yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama:
	Pertama	III/b	150		36 U I	berijazah paling rendah Sarjana (S1)
	Monda	III/c	200	D 050 000	E0#	bidang hukum, manajemen, teknik,
	Muda	III/d	300	Rp. 960.000	58 th	farmasi, dan humaniora;
		IV/a	400			2. menduduki pangkat paling rendah
	Mades	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	Penata Muda, golongan ruang III/a;
Mic	Madya	IV/c	700			3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
Ahli	Ahli	IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pemeriksaan merek paling kurang 2 (dua) tahun;
Uta	Utama	IV/e 1050		Rp. 1.500.000	65 th	3. berusia paling tinggi: a. 53 th untuk Pemeriksa Merek Pertama dan Muda; b. 55 th untuk Pemeriksa Merek Madya c. 60 th untuk Pemeriksa Merek Utama 4. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek

Pemeriksa Pajak

PERMENDAN-RR : Nomor 17 Tahun 2016, Tanggal 13 Oktober 2016 : Nomor 15 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017 PERKA BKN

3 PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan.

4. **TUGAS JABATAN** : melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 53 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 5.

6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. **RUMPUN JABATAN** : Imigrasi, pajak dan ass prof yang berkaitan

: PNSKementerian Keuangan 9 LINGKUP BERLAKU

10.

PEJABAT PENETAP PAK : a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Madya/Ahli Madya di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil sampai dengan Pemeriksa Pajak Penyelia dan Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa Pajak Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Pemeriksa Pajak Pelaksana/Terampil sampai dengan Pemeriksa Pajak Penyelia dan Pemeriksa Pajak Pertama/Ahli Pertama dan Pemeriksa

Pajak Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

- a. Pemeriksa Pajak Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/DIV dpt diangkat dlm Pemeriksa Pajak Keahlian, dgn syarat:
 - Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pemeriksa Pajak Keahlian;

Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pemeriksa Pajak Keahlian;

Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

b. Pemeriksa Pajak Kat. Keterampilan yg diangkat ke Pemeriksa Pajak Kat. Keahlian diberikan angka kredit dari Ijasah S1/ D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari diklat, pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI:

Pemeriksa Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatandiberhentikan sementara sebagai PNS;

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa Pajak yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan

yang berla	aku.		•	- ,		
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana/	II/c	60	Rp. 240.000	58th	Syarat pengangkatan pertama kat. keterampilan:
	Terampil	II/d	80	10.210.000	3001	memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani;
Keterampilan	Pel Lanjutan/	III/a	100	Rp. 300.000	58th	4. berijazah paling rendah Diploma III (DIII) di
	Mahir	III/b	150	ТФ: 500.000	30 u i	bidang Akuntansi, Perpajakan, Manajemen Perpajakan atau kualifikasi pendidikan lain
	Down selie	III/c	200		58th	yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pemeriksaan; dan
	Penyelia	III/d	300	Rp. 550.000	36 U1	nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir
	Ahli Pertama	III/a	100	. Rp. 325.000	58th	 Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian: berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Ekonomi, Keuangan, Hukum, dan Administrasi atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pemeriksaan; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatanpertama; Memiliki pengalaman dibidang pemeriksaan paling kurang 2 tahun; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2thterakhir Mengikuti dan lulus uji kompetensi;
		Ш/b	150			
	Ahli Muda	Ш/с	200			
Keahlian	AlliMuda	III/d	300	Rp. 650.000	58th	
		IV/a	400			
	Ahli Madya	IV/b	550	Rp. 1.000.000	60th	
		IV/c	700		Wui	

5. Berusia paling tinggi 40 tahun

Pemeriksa Paten

1. PERMENPAN-RB : Nomor 26 Tahun 2013, Tanggal 24 Juli 2013

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 10 Tahun 2014 dan Nomor 9 Tahun 2014, Tanggal 5 Mei 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan

pemeriksaan permohonan paten.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pemeriksaan permohonan paten yang meliputi pengelolaan dokumen

permohonan paten, pemeriksaan substantif permohonan paten, dan penganalisisan

hukum terkait dengan paten.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 30 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM
8. RUMPUN JABATAN : Hak Cipta, Paten dan Merek
9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Hukum dan HAM

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Eselon Iyang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Paten Madya, pangkat Pembina TkI,golru IV/bs.d Utama dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

b. Pejabat Eselon IIyang membidangi paten bagi Pemeriksa Paten Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dibantu Tim Penilai Direktorat

11. UJI KOMPETENSI:

Pemeriksa Paten yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa Paten yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Doubouse	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama:
	Pertama	III/b	150	кр. 540.000	36 ui	berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang kimia, biologi,
	Na. de	Ш/с	200	Dm 060 000	58 th	farmasi, elektro, fisika, mesin, sipil,
	Muda	III/d	300	Rp. 960.000	36 U I	teknologi pertanian, teknologi perikanan, dan teknik di bidang
		IV/a	400			International Patent Classification (IPC);
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
		IV/c	700			3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
Ahli		IV/d	850			Syarat Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang paten
Uta	Utama	IV/e	1050	Rp. 1.500.000	65 th	 3. berusia paling tinggi a. 53 th untuk Pemeriksa Paten Pertama dan Muda; b. 55 th untuk Pemeriksa Paten Madya c. 60 th untuk Pemeriksa Paten Utama; 4. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (Pemeriksa PVT)

PERMENPAN-RB : Nomor 32 Tahun 2013, Tanggal 16 September 2013

2. PERATURAN BERSAMA Nomor 35/PERMENTAN/OT.140/2/2014 dan Nomor 4 Tahun 2014, Tgl 3 Maret 2014

3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman yang diduduki oleh PNS.

4. **TUGAS POKOK** : Melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan

dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT

: Nomor 6 Tahun 2017, Tanggal 17 Januari 2017 5. **PERPRESTUNJANGAN**

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA **Kementerian Pertanian**

RUMPUN JABATAN 8. Ilmu Havat

9. LINGKUP BERLAKU **PNS** Kementerian Pertanian

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pemeriksa PVT Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/b s.d Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dibantu Tim Penilai Kementerian.

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi PVT pada Kementerian Pertanian, bagi Pemeriksa PVT Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dibantu Tim Penilai Unit Keria.

11. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PVT:

Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT paling banyak 40 orang berdasarkan analisis beban kerja dan jumlah permohonan hak PVT.

12. UJI KOMPETENSI:

Pemeriksa PVT yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan:
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

IV/c

- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pemeriksa PVT yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

ketentuan yang berlaku. **Batas** Angka Tunjangan Jenjang Usia Tingkat Golru Pengangkatan Dalam Jabatan Jabatan Kredit Jabatan **Pensiun** Syarat pengangkatan pertama: III/a 100 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Rp. 540.000 **Pertama** 58th Pertanian bidang pemuliaan tanaman/ Ш/b 150 agronomi/ agroteknologi, dan Sarjana (S1) Biologi bidang tumbuhan: 2. pangkat paling rendah Penata Muda, III/c 200 golongan ruang III/a; Rp. 960.000 58th 3. telah mengikuti pelatihan teknis di Muda bidang pemeriksaan PVT; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang III/d 300 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Ahli Syarat pengangkatan perpindahan dari IV/a 400 iabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang IV/b 550 pemeriksaan PVT paling kurang 2th; Madya Rp. 1.260,000 60 th 3. Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pemeriksaan PVT; dan 4. Usia pāling tinggi: a. 53th untuk Pemeriksa PVT Pertama **700**

dan Muda

b. 55 th untuk Pemeriksa PVTMadya

Penata Anestesi

: Nomor 11 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 PERMENPAN - RB 2 PERATURAN BKN : Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 3.

jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai

kewenangan dan peraturan perundang-undangan

TUGAS JABATAN : Melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi

PERRESTUNJANGAN 5. : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan LINGKUP BERLAKU 9. : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya, Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bs.d pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
- Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
- c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Ahli Muda/Muda pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai LPT Pusat
- d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelavanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
- Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi, bagi:
 - 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi.
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, s.d Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.
- Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Provinsi
- Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota, bagi:
 - 1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota
- f. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama s.d Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota

Penata Anestesi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. ditugaskan secara penuh pada JPT, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau
 - e. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- PENGANGKATAN KEMBALI:

Penata yang b		entikan da	ri jabatanny	a karena point a	a s.d pointd,	dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan
Kategori	Jenjang	Golru	Angka Krajii nga	n Ja llakkata n	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama/Ahli	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 3. sehat jasmani dan rohani;
	Pertama 150 4. berija	4. berijazah paling rendah Diploma IV(D-IV) di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi; 5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat)				
	Muda/Ahli	Ш/с	200		58th	fungsional di bidang pelayanan anestesi; 6. memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); dan
	Muda III/d	III/d	300			 nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Keahlian		IV/a	400		memenuhi persyaratan pengangkatar memiliki sertifikat pelatihan anestesiolis Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi (STRPA) bagi PNS dengan pen rendah Sarjana (S1)/D-IV bidang kesel 3. mengikuti dan lulus uji kompetensi di basuhan kepenataan anestesi; memiliki pengalaman di bidang pelay kepenataan anestesi paling singkat 2. nilai prestasi kerja paling rendah berni (dua) tahun terakhir; dan berusia paling tinggi: a. 53 tahun untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Mu	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; 2. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) bagi PNSdengan pendidikan paling rendah Sariana (STVD-Whidang kesahatan)
	Madya/Ahli Madya	IV/b	550			 mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi; memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi paling singkat 2 (dua) tahun; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2
		IV /c	700			6. berusia paling tinggi: a. 53 tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda; b. 55 tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi

Penata Kanselerai

PERMENPAN-RB
 Nomor 13 Tahun 2018, Tanggal 1 Maret 2018
 PERATURAN BKN
 Nomor 21 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan. barang milik negara. ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Runtuk mendukung kegiatan diplomatik dan

konsuler

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik

negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk

mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler

5. PERPRES TUNJANGAN :

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Luar Negeri

8. RUMPUN JABATAN : Politik dan Hubungan Luar Negeri

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Luar Negeri

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Penata Kanselerai Ahli Madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Pusat; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di Kementerian Luar Negeri untuk Angka Kredit bagi Penata Kanselerai Ahli Pertama dan Penata Kanselerai Ahli Muda di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

11. UJI KOMPETENSI

Penata Kanselerai yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN:

- a. Penata Kanselerai diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) mengundurkan diri dari Jabatan;
 - 2) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 5) ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrasi; atau
 - 6) tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- b. Selain pemberhentian pada hurufa, Penata Kanselerai diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) menduduki Jabatan Negara; dan
 - 2) menduduki Jabatan pada Organisasi Internasional.

13. PENGANGKATAN KEMBALI

Penata Kanselerai yang diberhentikan karena ketentuan huruf a angka 2)s.d angka 5)dan huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

	_	-				
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;
	Ami Pertama	ш/ь	150			 sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S-1 atau D-4 pada
	Mil Muda	bidang akuntansi, manajemen, ekonomi, atau bidang studi lainnya yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai				
		III/d	300		3541	standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Keaniian				Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6;		
Ahli Madya	Ahli Madya	IV/b	550		60 th	Memiliki pengalaman pelaksanan tugas di bidang kekanseleraian paling kurang 2 th nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir Berusia paling tinggi:
		IV/c				a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th untuk menduduki jenjang Ahli Madya;

Penata Kelola Pemilihan Umum

1. PERMENPAN-RB : Nomor 27 Tahun 2018, Tanggal 30 Juli 2018

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 24 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Penata Kelola Pemilihan Umum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan pengelolaan Pemilu

4. TUGAS POKOK : Melakukan pengelolaan perencanaan Pemilu, pengelolaan tahapan

kepemiluan, pengelolaan logistik Pemilu, pelaksanaan Pemilu, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu, serta

pengelolaan terhadap sengketa Pemilu.

5. PERPRESTUNJANGAN: Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : Sekertariat Jenderal KPU; Sekertariat KPU Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan (KIP) Aceh; Sekertariat KPU/KIP Kabupaten; dan Sekertariat

KPU/KIP Kota

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bagi Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, Penata kelola Pemilu Ahli Muda;
 Penata Kelola Pemilu Ahli Madya dan Penata Kelola Pemilu Ahli Utama di lingkungan Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Sumber Daya Manusia pada Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum bagi Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, Penata Kelola Pemilu Ahli Muda, dan Penata Kelola Pemilu Ahli Madya di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

11. KENAIKAN JABATAN

Penata Kelola Pemilu yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Penata Kelola Pemilu yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
		III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS;
	Pertama	III/b	150		58 th	2.memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3.sehat jasmani dan rohani; 4.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Ilmu Sosial, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi atau Ilmu Ekonomi; 5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.berusia paling tinggi:
Muda Keahlian	Muda	III/c	200 300		58 th	
		IV/a	400		60 th	a.53 tahun untuk JF Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama da Penata Kelola Pemilu Ahli Muda;
	Madya	IV/b	550		60 th	 b.55 tahun untuk JF Penata Kelola Pemilu Ahli Madya; c.60 tahun untuk JF Penata Kelola Pemilu Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
		IV/c	700		60 th	
	Utama	IV/d	850		65 th	
Otama	IV/e	1050		65 th		

Penata Laksana Barang

1. PERMENPAN-RB : Nomor 23 Tahun 2018, Tanggal 27 April 2019

2. PERATURAN BKN : Nomor 22 Tahun 2019, Tanggal 26 September 2019

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan BMN/D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan Pengelolaan BMN/D

5. PERPRES TUNJANGAN:.....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUN JABATAN: Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Barang Terampil sampai dengan Penata Laksana Barang Penyelia di lingkungan Kementerian/Lembaga dibantu Tim Penilai Instansi; dan

b. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Barang Terampil sampai dengan Penata Laksana Barang Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSI

Penata Laksana Barang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penata Laksana Barang yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keterampilan	Toronovil	II/c	60		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;
	Terampil	II/d	II/d 80			 sehat jasmani dan rohani; memiliki ijazah paling rendah D-3 (Diploma-3) bidang ekonomi, teknik, matematika, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh Instansi Pembina; mengikuti dan lulus uji Kompetensi
	Mahir Penyelia	III/a	100			
		ш/ь 150		58th	Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial 6. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1thterakhir	
		Ш/с	200		58th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6;
		III/d	300		30 UI	 Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan BMN/D paling kurang 2th; Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2th terakhir Berusia paling tinggi 53 th

Penata Ruang

1. PER MENPAN-RB : Nomor PER/10/M.PAN/6/2007, tanggal 18 Juni 2007

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 06/PKS/M/2007 dan Nomor 44 Tahun 2007, Tanggal 27 Desember 2007

3. PENGERTIAN : Penata Ruang adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan

ruang.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 20 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Menteri PUbagi Penata Ruang Madya dibantu Tim Penilai Departemen.

b. Dirjen Penataan Ruang bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Sekjen Departemen, Sekjen Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan LPND bagi Penata Ruang Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi

d. Kepala Dinas provinsi bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Penata Ruang Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penata Ruang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya

sesuai ketentuan yang berlaku

3630	iai keterituari	yang benakt	•				
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Pertam	III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah paling rendah S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan.	
	а	ш/ь	150	кр. 5-ю.000		2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a	
		ш/с	200			3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
Ahli	Muda	III/d	300	Rp. 960.000	58 th		
AIIII		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;	
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	Memiliki pengalaman di bidang penataan ruang paling singkat 2 tahun;	
Ĺ		IV/c	700			Telah ikut dan lulus diklat fungsional; Berusia paling tinggi 50 tahun	

Pe ne liti

1. PERMENPAN-RB : Nomor 34 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 9 Tahun 2019, Tanggal 15 Mei 2019

3. PENGERTIAN : PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh

Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/ a tau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian,

pengembangan, dan/atau pengkajian Instansi Pemerintah

4. TUGAS POKOK : melakukan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi.

5. PERRES TUNJANGAN : Nomor 100 Tahun 2012, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

8. RUMPUN JABATAN : penelitian dan perekayasaan

9. LINGKUP BERLAK U : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk Angka Kredit bagi Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah bagi Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Peneliti yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ueng	jan ketentua	ii yang ben	laku.			
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	Ш/ь	150	Rp. 1.100.000	58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
	Muda	III/c	200	Dr. 1.750.000	E0#	sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S-2 (Strata-Dua) sesuai
	Muda	III/d	300	1 - 4	58th	5. kebutuhan bidang kepakaran;
		IV/a	400			mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social
	Madya	IV/b	550	Rp. 3.000.000	65th	kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 8. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan pemgangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang penelitian paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 4. berusia paling tinggi: a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF Peneliti Ahli Pertama dan Peneliti Ahli Muda; b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Peneliti Ahli Madya; dan c. 60 (enam puluh) tahun untuk JF Peneliti Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT
		IV/c	700			
Ahli		IV/d	850		70 th	
	Utama	IV/e	1050	Rp. 5.200.000		

Pe nera

PERMENPAN-RB

: Nomor 32 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014 : Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015 PERATURAN BERSAMA **PENGERTIAN**

: Jabatan Fungsional Penera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggungjawab, wewenang untuk melakukan peneraan.

 Melakukan peneraan yang meliputi pengelolaan instalasi uji dan peralatan atau perlengkapan standar tera, tera ulang UTIP,pelaksanaan tera dan tera ulang UTIP,pengujian UTIP,dan pengelolaan Cap Tanda Tera.
 Nomor 70 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **TUGAS POKOK**

PERPRES TUNJANGAN

: PPNomor 11 Tahun 2017 **PERATURAN BUP** INSTANSI PEMBINA: Kementerian Perdagangan

: Pengawas kualitas dan keamanan 8. **RUMPUN JABATAN**

: PNS Pusat / Daerah 9. **RUANG LINGKUP**

10. RUANG LINGKUP

 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan bagi Penera Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Penera Terampil,

pangkat Pengatur, golru II/c, s.d Penyelia, dan Penera Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Penera Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Penera Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Penera Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

a. Penera Keterampilan yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Penera Keahlian dengan syarat:
1) berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) jurusan teknik atau Matematika dan MIPA
2) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian;

3) telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penera Keahlian; dan 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

Penera Keterampilan yang akan beralih menjadi Penera Keahlian diberikan angka kredit dari Ijazah S1/DJV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

IV/c

700

	emenuhi persya	-	atan.		•	
	KATAN KEMBALI: ng diberbentika:		noin h e d	noin e danat d	lianakat k	kembali dalam jabatanya sesuai ketentuan yang
berlaku Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama kategori keterampilan:
	Terampil	П/с	60	Rp. 240.000	58th	1. berijazah Diploma III(DIII)jurusan teknik atau Matematika dan MIPA; 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c
		II/d	80			mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keterampilan;
Keterampilan	Mahir	III/a	100	Rp. 265.000	58th	telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi:
		III/b	150	14. 20000	555.	5. telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejahat Pimpinan
	Penyelia	III/c	200		58th	Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian
		III/d	300 Rp. 3	Rp. 325.000		Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; 6. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1thterakhir
	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58th	 Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian: berijazah paling rendah Sarjana (S1)/D.N jurusan teknik atau Matematika dan MIPA; pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penera Keahlian; telah mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; telah ditetapkan sebagai Pegawai Berhak dan memperoleh Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan tentang Penetapan Pegawai Berhak; setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 thterakhirr Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman dibidang peneraan paling kurang 2 tahun;
	Ailireitailia	III/b	150			
Keahlian	Ahli Muda	Ш/с	200	Rp. 400.000	58th	
	Ailli Piuud	III/d	300	. τφ. που.σου	35ui	
		IV/a	400			
	Ahli Madya	IV/b	550	Rp. 500.000	60 th	
	I	T) //-	700			

3. Berusia paling tinggi 52tahun.

Penerjemah

PERMENPAN - RB : Nomor 49 Tahun 2014, tql 16 Oktober 2014 jo Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2016

2. **PERKA BKN** : Nomor 21 Tahun 2016, Tanggal 26 Agustus 2016

: Jabatan Fungsional Peneriemah adalah iabatan fungsional tertentu yang **PENGERTIAN**

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk

melaksanakan kegiatan penerjemahan tulis maupun lisan dan penyusunan naskah

bahan terjemahan dalam lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

: Melakukan kegiatan penerjemahan tulis, penerjemahan lisan, pengalihaksaraan dan penerjemahan teks naskah kuno/arsip kuno/prasasti, dan penyusunan naskah

bahan teriemahan.

: Nomor 70 Tahun 2008, Per Ka BKN Nomor 39 Tahun 2007 5. **PERPRES TUNJANGAN**

: PPNomor 11 Tahun 2017 6. PERATURAN BUP

7. **INSTANSI PEMBINA** : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

: Manajemen 8. **RUMPUNJABATAN**

: PN SPusat / Daerah LINGKUP BERLAKU

10. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV(D-IV) bidang sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- c. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

11. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

- a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Penerjemah;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV(D-IV) sastra atau bidang lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- c. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
- d. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Penerjemah
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penerjemahan paling kurang 2 tahun;
- f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2th terakhir;
- g. usia paling tinggi 50 th

12. UJI KOMPETENSI:

TUGAS POKOK

Selain memenuhi syarat kinerja, Penerjemah yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI

Penerjemah yang diberhentikan karena poin b s.d oin e, dapat diangkat kembali dalam

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun
	ALE Destance	III/a	50	12,5	Rp. 375.000	58th
	Anii Pertama	Ahli Pertama III/b 50 12,5		кр. 373.000	36ui	
	Ahli Muda	III/c	100	25	Rp. 750.000	58th
		III/d	100	25	кр. 750.000	Soul
Keahlian		IV/a	150	37,5		
Rearman	Ahli Madya	IV/b	150	37,5	Rp. 1.000.000	60th
		IV/c	150	37,5		
	Ahli Utama	IV/d	200	50	Rp. 1.300.000	65th
	Ariii Otama	IV/e	200	50	кр. 1.500.000	- Wui

Pengamat Gunung Api

KEPMENPAN-RB : Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002, Tanggal 3 Desember 2002

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 0064 k/70/MEM/2004 dan Nomor 05 Tahun 200, Tanggal 17 Februari 200

3. PENGERTIAN : Pengamat Gunung Api adalah PNSdi lingkungan Dep. ESDM yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melakukan kegiatan pengamatan gunung api.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pengamatan dan pengukuran gejala aktivitas gunung api untuk

menentukan tingkat kegiatan gunung api.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 67 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. RUMPUN JABATAN : Fisika, kimia dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian ESDM

10. PEJABAT PENETAP PAK

Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Vulkanologi dan Mitegasi Bencana Geologi yang diberi wewenang oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengamat Gunung Api yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 260.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya SMK sesuai dgn kualifikasi	
		П/ь	40			pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan	
	Pelaksana	II/c	60	60 Rp. 280.000 58	58 th	Ruang II/a. 3. Diklat fungsional di bidang Pengamatan Gunung api 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang	
Terampil		II/d	80				
	Pelaksana	III/a	100		58 th		
	Lanjutan	ш/ь	150	Rp. 300.000			
	Penyelia III/c 200	200	Rp. 400.000	58th	pelayanan jasa pengamatan gunung api paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari		
Ĺ	,	Ⅲ/d	300	—		jabatan terakhir.	

Pengamat Meteorologi dan Geofisika

KEPMENPAN-RB : Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004, Tanggal 11 Februari 2004

: Nomor SK.32/KP.303/KB/BMG-2004 dan Nomor 19 Tahun 2004, Tgl 26 April 2004 KEPUTUSAN BERSAMA

PENGERTIAN : Pengamat Meteorologi dan Geofisika, adalah PNSyg diberi tugas, tanggungjawab wewenang, dan hak secara penuh oleh Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika untuk

melaksanakan kegiatan pengamatan meteorologi dan geofisika.

Melakukan kegiatan pengamatan (observasi) dan pengkajian dibidang **TUGAS POKOK**

kemeteorologian dan geofisika.

: Nomor 56 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 PERPRES TUNJANGAN

: PPNomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP

: Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 7. **INSTANSI PEMBINA**

RUMPUN JABATAN Fisika, kimia dan yang berkaitan

PNSBMG LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Ka. BMG bagi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Madya dibantu TimPenilai Badan

b. Deputi bidang Observasi/Deputi bidang sistem data dan informasi bagi Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pelaksana s.d Penyelia dan Pengamat Meteorologi dan Geofisika Pertama - Muda dibantu Tim Penilai Deputi

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KETINGKAT AHLI

Pengamat Metereologi dan Geofisika Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IVdpt diangkat menjadi Pengamat Metereologi dan Geofisika Ahli, dgn syarat: a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengamat Metereologi dan Geofisika Ahli;

- b. Lulus diklat fungsional vang ditentukan untuk Pengamat Metereologi dan Geofisika Ahli;
- Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengamat Metereologi dan Geofisika yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan			
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat			
l	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58th	Terampil: 1. Berijazah paling rendah D.III.sesuai			
l		II/d	80		dengan kualifikasi pendidikan				
Terampil	Pelaksana	III/a	100	Rp. 265.000	58th	2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI,golongan ruang II/c.			
	Lanjutan	Ш/b	150	кр. 203.000	3541	Diklat fungsional Tk terampil Setiap unsur penilaian dalam DP-3			
l	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 325.000	58th	sekurang-kurangnya bernilai baik			
	Periyella	Ⅲ/d	300	тф. 525.000	dalam satu tahun terakhir				
	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000 5	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:			
l	retailla	III/b	150) Soul	Berijazah paling rendahS.1 / D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan.			
	_	Ш/с	200			Pangkat paling rendah Penata Muda,golongan ruang III/a Diklat fungsional tingkat ahli			
	Muda	III/d	300	Rp. 450.000 58 th	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir				
Ahli		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama:			
	Madya	IV/b	550	Rp. 700.000	60 th	2. Memiliki pengalaman di bidang pengamatan metereologi dan geofisika paling singkat 2 tahun;			
Ĺ		IV/c	700			3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir			

Pengamat Tera

1. PERMENPAN - RB : Nomor 33 Tahun 2014, Tanggal 20ktober 2014

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 12/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 11 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengamat Tera adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pengamatan tera sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pengamatan tera meliputi pengamatan UTTP, pengamatan BDKT,

pengamatan penggunaan satuan ukuran, penyuluhan masyarakat, dan

penanganan pengaduan masyarakat.

5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
6. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 105 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perdagangan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula s.d Penyelia, di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Pusat

- b. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula s.d Penyelia di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengamat Tera Pemula s.d Penyelia di Iingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Pengamat Tera yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengamat Tera yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengamat Tera sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama:
		II/b	40			1. berijazah paling rendah SMU/SMK atau yang sederajat;
	Terampil	П/с	60	Rp. 360.000	58 th	2. pangkat paling rendah Pengatur
		II/d	80			 Muda, golongan ruang II/a; 3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengamat Tera; 4. mengikuti uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; 5. nilai prestasi kerja pating kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pengamatan tera paling kurang 2 th 3. berusia paling tinggi 52 tahun.
	Mahir	III/a	100	Dn 450 000	58 th	
Keterampilan	Mailli	III/b	150	Rp. 450.000	56 UI	
	Penyelia	Ш/с	200	Rn. 780.000	58 th	
Ļ	. S.i.yella	III/d	300	Rp. 780.000	35 Ui	

Pengantar Kerja

1. PERMENPAN-RB : Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 10 Januari 2014

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 28 Tahun 2014, Tanggal 17 September 2014

2. PERATUKAN BERSAMA
3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengantar Kerja adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan

antar kerja

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 62 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan 8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Direktur Jenderal yang membidangi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans bagi Pengantar Kerja Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/b s.d Utama, Pangkat Pembina Utama, golru IV/e, di lingkungan Kemnakertrans, Instansi Pusat selain Kemnakertrans, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/a yg bertugas dilingkungan Kemnakertrans dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Pejabat eselon Ilyang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat selain Kemnakertrans bagi Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kemnakertrans dibantu Tim Penilai Instansi.
- d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi Ketenagakerjaan bagi Pengantar Kerja Pertama, Pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, Pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSI:

Pengantar Kerja yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengantar Kerja yang diberikan karena poin b s.d poin e, dapat dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Batas Golongan Angka Tuniangan Jeniana **Tingkat** Usia Pengangkatan Dalam Jabatan Jabatan Jabatan Kredit ruang **Pensiun** 100 III/a Syarat pengangkatan pertama: 58th Rp. 270.000 Pertama 1. berijazah paling rendah Sarjana Ш/b 150 (S1)/Diploma IV (DIV), ilmu èkonomi, ilmu sòsial humaniora, Ш/c 200 ilmu pendidikan serta rumpun seni, 58th Muda Rp. 400.000 300 III/d desain dan media serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; IV/a 400 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus 550 IV/b 60th Madva Rp. 500,000 pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja; dan Ahli 4. nilai prestasi kerja paling kurang 700 IV/c bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan ďari jabatan lain: IV/d 850 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; tersedia formasi untuk Jabatan Utama 65th Fungsional Pengantar Kerja; 3. memiliki pengalaman di bidang pelayanan antar kerja paling 1050 IV/e singkat 2tahun; dan usia paling tinggi 50 tahun.

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

1. PERMENPAN-RB : Nomor 46 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 31 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Pengawas Alat dan Mesin Pertanina adalah PNS yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian

mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode

4. TUGAS POKOK : melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin

pertanian serta pengembangan metode.

5. PERPRESTUNIANGAN: Nomor.....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Pertanian

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Aat dan Mesin Pertanian Ahli Madya di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemertintah di luar Kementerian Pertanian; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi alat dan mesin pertanian untuk Angka Kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pertanian dan Instansi Pemerintah di lua Kementerian Pertanian.

11. KENAIKAN JABATAN

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

	iya i i le lul ut k	coa iodai i y				
Kategori	Jenjang	Golru	Angka	Tunjangan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Jabatan		Kredit	Jabatan		
		III/a	-		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS; 2.memiliki integritas dan moralitas ya baik;
	Pertama	III/b	50		58 th	3.sehat jasmani dan rohani; 4.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, atau Hukum;
	Muda	III/c	100		58 th	 5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,Kompetens Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam : (satu) tahun terakhir
Keahlian	eahlian	III/d	100		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.Memiliki pengalaman di bidang pelindungan dan pengamananperdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
		IV/a	150		60 th	3.Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam dua (dua) tahun terakhir; 4.Berusia paling tinggi: a.53 tahun untuk menduduki JF Pengawas Alat dan
	Madya	IV/b	150		60 th	Mesin Pertanian Ahli Ahli Pertama dan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; b.55 tahun untuk menduduki JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya;
		IV/c	150	60 th	c.60 tahun untuk menduduki JF Pengawas Alat dan	

Pengawas Benih Tanaman

: Nomor 09 Tahun 2010, Tanggal 23 April 2010 PERMENPAN-RB

: Nomor 59/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 38 Tahun 2011, Tanggal 30 September 2011 PERATURAN BERSAMA

: Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung **PENGERTIAN** jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yg diberikan oleh pejabat yg berwenang; :Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan

pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu. : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERPRES TUNJANGAN

6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017 INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

RUMPUNJABATAN : Ilmu Hayat

TUGAS POKOK

LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian /Daerah **PEJABAT PENETAP PAK**

Sekjen Kementan bagi Madya, pangkat Pembina Tingkat Igolru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golru IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Pusat b. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan benih tanaman di Kementan, bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama

s.d Madya, pangkat Pembina golru İV/adi lingkungan Kementan dibantu Tim Penilai Kementan

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan benih tanaman Provinsi bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi d. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan benih tanaman Kabupaten/Kota bagi P. Pemula s.d Penyelia, dan Pertama

s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/adi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKATAHLI:

- a. Pengawas Benih Tanaman Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IVdapat diangkat menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli dengan syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Benih Tanaman Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih kelompok Pengawas Benih Tanaman Terampil ke Ahli; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
- b. Pengawas Benih Tanaman Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Benih Tanaman Ahli diberikan angka kredit dari Ijazah S1/D.IVyang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65%dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. DIKLAT PENJENJANGAN:

Pengawas Benih Tanaman yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan

PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Benih Tanaman yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
		II/b	40			Berijazah paling rendah SMK di bidang Pertanian
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58th	2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,
Terampil		II/d	80	1		Golongan Ruang II/a.
	Pelaksana	III/a	100	D. 450 000	58th	3. Diklat fungsional tingkat terampil
	Lanjutan	III/b	150	Rp. 450.000	-sxm	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang
	Domiselie	Ш/с	200	Dm 720 000	0.000 58th	bernilai baik dalam 1tahun terakhir
	Penyelia	III/d	300	Rp. 720.000		
	Destaura	III/a	100	D= E40.000		Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendahS.1/ D.IV di bidang pertanian 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli
	Pertama	III/b	150	Rp. 540.000		
	Muda	III/c	200	Rp. 900.000	58th	
Ahli	Mada	III/d	300	тф. 500.000	900.000 58 th	bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
AIII		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jbtn lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.200.000	60th	Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan benih tanaman paling kurang 2th;
		IV/c	700			Telah ikut dan lulus diklat fungsional bidang pengawasan benih tanaman; Berusia paling tinggi 50 tahun.

Pengawas Bibit Ternak

PERMENPAN-RB : Nomor 2 Tahun 2011, Tanggal 27 Januari 2011

PERATURAN BERSAMA : Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2011 dan Nomor 39 Tahun 2011, Tanggal 30 September 2011

: Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup **PENGERTIAN**

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak

yang diduduki oleh PNS.

TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan

pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih,

serta pengawasan peredaran bibit dan benih.

: Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERPRESTUNJANGAN 6.

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Pertanian

RUMPUNJABATAN : Ilmu Hayat

LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Pertanian / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

Sekjen Kementan bagi Madya, pangkat Pembina TkIgolru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golru IV/c di lingkungan Kementan, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

Pejabat eselon Ilyg membidangi pengawasan bibit ternak di Kementan bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Kementan dibantu Tim Penilai Kementan

Pejabat eselon IIyg membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

Pejabat eselon Ilyg membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota bagi Pelaksana s/d Penyelia dan Pertama s/d Madya, pangkat Pembina golru IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI:

- Pengawas Bibit Ternak Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pengawas Bibit Ternak Ahli dengan syarat:
 - 1) tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
 - 2) jiazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Bibit Temak Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih kelompok Pengawas Bibit Ternak Terampil ke Ahli; dan
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
- Pengawas Bibit Ternak Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Bibit Ternak Ahli diberikan angka kredit dari Ijazah S1/D.IV yang sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI:

Pengawas Bibit Ternak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan:
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS:
- menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Bibit Temak yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	II/c 60 Rp. 360.00	Rp. 360.000	58th	1. Berijazah paling rendah SNAKMA, SPP, dan SMK	
		II/d	80]		bidang Peternakan. 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TkI,
Terampil	Pelaksana	III/a	100	Rp. 450.000	58th	Golru II/b.
	Lanjutan	Ш/b	150	тр. 450.000	тф. 450.000 55 ат	3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 720.000	0.000 58th	kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
	Penyena	III/d	300	тр. 720.000		
	Pertama	III/a	100	D. 540.000 F0	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang peternakan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
	Pertama	III/b	150	Rp. 540.000	36 UI	
	Muda	Ш/с	200	Rp. 900.000	58 th	golongan ruang III/a
		III/d	300	1		3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai haik dalam 1 tahun terakhir
Ahli		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang pengawasan bibit temak paling kurang 2th;
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.200.000	60 th	
_		IV/c	700			Telah ikut dan lulus diklat fungsional dibidang pengawasan bibit ternak; Berusia paling tinggi 50 tahun.

Pengawas Farmasi dan Makanan

Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002, Tanggal 16 Agustus 2002 **KEPMENPAN**

Nomor HK. 00.04.24.02905 dan Nomor 21 Tahun 2002, Tanggal 19 September 2002 KEPUTUSAN BERSAMA

Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, PENGERTIAN wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan

kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat lunak untuk pengawasan di bidang farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian dan

penilaian sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan

berbahaya dan makanan.

PERPRES TUNJANGAN Nomor 52 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP PP Nomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

RUMPUN JABATAN Pengawas Kualitas dan Keamanan

PNS BPOM LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Ka. BPOM bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya dan Utama dibantu Tim Penilai BPOM

b. Sekretaris Utama bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana s/d Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Utama

c. Kepala Balai Besar bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana s/d Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Balai Besar

d. Kepala Balai bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana s/d Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Balai

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPILKE TINGKAT AHLI:

Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil yang memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli dengan syarat:

a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan Kepala BPOM;

b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Farmasi dan Makanan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 260.000	58th	1. Berijazah paling rendah DII sesuai dengan
		II/d	80			kualifikasi pendidikan
Terampil	Pelaksana	Ш/а	100	Rp. 300.000	58th 58th	2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI, Golru II/b.
	Lanjutan	III/b	150	кр. 300.000		3. Diklat fungsional Tk terampil
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 500,000		4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
	Periyelia	III/d	300	кр. 500.000	Soul	kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir
	Pertama	III/a	100	Rp. 325,000	58th 58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
	Pertania	III/b	150	Rp. 725.000		 Berijazah paling rendahS.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a
	Muda	III/c	200			
	Muua	III/d	300	тр. 723.000		
		IV/a	400			3. Diklat fungsional tingkat ahli
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.175.000	60th	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir
Ahli		IV/c	700			Kurangnya bernilai balk dalam 1 u teraknir
	Utama	IV/d	850	0 Rp.1.400.000	65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman melaksanakan
		IV/e	1050			kegiatan pengawasan farmasi dan makanan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir

Pengawas Kemetrologian

1. PERMENPAN - RB : Nomor 35 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 21 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015

: Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tggjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

TUGAS POKOK : Melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTTP,pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP,BDKTdan satuan ukuran, Pengembangan

kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian

pengaduan masyarakat

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 118 Tahun 2016, perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan

8. RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perdagangan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Madya, pangkat Pembina TkI,golru IV/bdan Pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kementerian Perdagangan, Provinsi, dan Kabupaten IKota dibantu TimPenilai Pusat;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkngan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi Perdagangan bagi Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSI:

Pengawas Kemetrologian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus Uji Kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Kemetrologian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

receile.	dan yang benake	4.				
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
	Amreiana	III/b	150		Sour	Diploma IV (D.IV); 2. pangkat paling rendah Penata Muda,
		Ш/с	200		golongan ruang IIIIa; 3. telah mengikuti dan lulus pendidikan pelatihan fungsional Pengawas Kemetrologian; 4. telah mengikuti uji kompetensi dan	
Keahlian	Ahli Muda	Ш/d	300	Rp. 960.000	58 th	memperoleh sertifikat kompetens; 5. telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik; 6. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	IV/a 400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan		
	Ahli Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60th	pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan metrologi legal paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 52 th
		IV/c	700			

Pengawas Keselamatan Pelayaran

KEPMENPAN : Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004, Tanggal 10 Desember 2004

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor KM. 61 TAHUN 2005 dan Nomor 20 Tahun 2005, Tanggal 5 Oktober 2005

3. PENGERTIAN : Pengawas Keselamatan Pelayaran, adalah PNSyang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan tugas/

kegiatan pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalu lintas angkutan laut.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalulintas angkutan laut

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 28 Tahun 1985
6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Menteri Perhubungan/Pejabat eselon Iyang ditunjuk, bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran Madya dibantu Tim Penilai Departemen

 b. Dirjen Perhubungan Laut/Pejabat eselon Iiyang membidangi pengawasan keselamatan pelayaran dan kelancaran lalulintas angkutan laut, bagi Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pengawas Keselamatan Pelayaran Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKATAHLI

Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dpt diangkat dlm Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli, dgn syarat:

- a. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli;
- b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli;
- c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Keselamatan Pelayaran yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ı									
	Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatann	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
		Pelaksan a Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:		
		Torridia	II/b	40			Berijazah paling rendah SLTAsesuai dgn kualifikasi pendidikan		
		Pelaksana	П/с	60]	58th	Pangkat paling rendah Pengatur Muda,		
	Terampil		II/d	80	Ţ		Golru II/a.		
		Pelaksana	III/a	100		58th	3. Diklat fungsional tingkat terampil		
		Lanjutan	III/b	150	150		4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3		
		Penvelia	III/c	200		58th	sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir		
		renyena	III/d	300		334	dalam saw tahun terakhir		
		Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendahS.1/ D.IV sesuai		
			Ш/ь	150			dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a		
		Muda	III/c	200		58 th	Golongan Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bemilai baik		
	Ahli		III/d	300			dalam satu tahun terakhir		
			IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan		
		Madya	IV/b	550		60th	pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan keselamatan pelayaran		
			IV/c	700			paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir		

Pengawas Ketenagakerjaan

1. PERMENPAN -RB : Nomor 19 Tahun 2010, Tanggal 10 Nopember 2010

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 08 Tahun 2012, Tanggal 8 Agustus 2012

3. PENGERTIAN : Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg

diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta

pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 51 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Ketenagakerjaan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina TkI, golru IV/bs.d Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan Kemennakertrans, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
- b. Sekretaris Dit. Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II)bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang berada di wilayah kerjanya dibantu Tim Penilai Provinsi.
- d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang berada di wilayah kerjanya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSI:

Pengawas Ketenagakerjaan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Ketenagakerjaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	country and					
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		III/a	100	Rp. 270.000		Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah paling rendah S.1/DIV sesuai dgn kualifikasi pendidikan
	Pertama	III/b	150			 Pangkat paling rendah Penata Muda,Golongan ruang III/a Telah ikut dan lulus Diklat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Telah memiliki surat penunjukan sebagai Pengawas Ketenagakerjaan oleh Menakertrans Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
		Ш/с	200			
Ahli	Muda	Ⅲ/d	300	Rp. 400.000		
		IV/a	400			
	Madya	IV/b	550	Rp. 500.000	60 th	Memiliki pengalaman di bidang pengawasan ketenagakerjaan paling singkat 2th dan dibuktikan dgn surat keterangan yang berwenang;
Ц		IV/c	700			 Memiliki kompetensi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan yang diperlukan; Berusia paling tinggi 50 tahun.

Pengawas Koperasi

1. PERMENPAN-RB : Nomor 43 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 10 Tahun 2019, Tanggal 15 Mei 2019

3. PENGERTIAN : Pengawas Koperasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan penerapan kepatuhan, pemeriksaan kegiatan pengawasan koperasi melalui penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian

kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pengawasan koperasi dalam aspek penerapan kepatuhan,

pemeriksaaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian

kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawasan kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : Pengawas Koperasi pada instansi pemerintah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Pengawas Koperasi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pengawasan koperasi untuk Angka Kredit bagi Pengawas Koperasi Ahli Pertama, Pengawas Koperasi Ahli Muda dan Pengawas Koperasi Ahli Madya di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yg membidangi pengawasan koperasi pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk AK bagi Pengawas Koperasi Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah; dan

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi keskretariatan daerah untuk Angka Kredit bagi Pengawas Koperasi Ahli Pertama dan Pengawas Koperasi Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

11. KENAIKAN JABATAN

Pengawas Koperasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan iabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Pengawas Koperasi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang

Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama:
Pertama	III/b	150		58 th	1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik 3. sehat jasmani dan rohani;
	III/c	200		58 th	4. berijazah paling rendah S-1/D-4 bidang Ilmu
Muda	III/d	300	300 58 th 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi tek	Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, atau Hukum; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial	
1V/a 400 60 th yang dis 6. nilai pre baik dal	Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.				
мацуа	IV/b	550		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pelindungan
	IV/c	700		60 th	dan pengamanan perdagangan paling sedikit 2 (dua) tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai
IV/d 850		65 th	baik dalam 2 (dua) tahun terakhir 4. berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan		
Utama	IV/e	1050		65 th	Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda;dan b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya. c. 60 tahun utk JF Ahli Utama yg menduduki JPT
	Jabatan	Pertama III/a III/b III/c III/c III/d IV/a IV/c IV/c IV/d	Dabatan Kredit	Dabatan Kredit Jabatan	Dabatan Kredit Jabatan S8 th

Pengawas Lingkungan Hidup

1. PERMENPAN - RB : Nomor 39 Tahun 2011, tanggal 25 Agustus 2011

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 09 Tahun 2012 dan 06 Tahun 2012, Tanggal 26 Juli 2012

B. PENGERTIAN : Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung

untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap

ketentuan dalam ijin lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Menteri Negara LHatau pejabat eselon Iyg ditunjuk bagi PLHMadya, Pangkat Pembina TkI,Golru IV/bdan Pangkat Pembina Utama Muda, Golru IV/cdi lingkungan Kementerian LHdibantu Tim Penilai Pusat

 Pejabat eselon Ilyg membidangi pembinaan jafung PLHatau pejabat eselon Ilyg membidangi jafung di Kementerian LHbagi PLHPertama, pangkat Penata Muda TkI, Golru III/bs.d PLHMadya, pangkat Pembina, Golru IV/a di lingkungan Kementerian LHdibantu Tim Penilai Unit Kerja

- Pejabat eselon Ilyg membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup diluar Kemen terian LHbagi PLHPertama, pangkat Penata Muda TkI, Golru III/bs.d PLHMadya, pangkat Pembina, Golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat dibantu Tim Penilai Instansi
- d. Pejabat eselon Ilyang membidangi lingkungan Hidup provinsi bagi PLH Pertama, pangkat Penata Muda TkI, Golru III/bs.d PLH Madya, pangkat Pembina, Golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- e. Sekda Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon IIyang membidangi lingkungan hidup bagi PLHPertama, pangkat Penata Muda TkI,Golru III/bs.d PLHMadya, pangkat Pembina, Golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSI:

Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus Uji Kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Lingkungan Hidup yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I I CCCI IC	dan yang bend	iva:			_	
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/b	150		58 th	dibidang ilmu alam, sosial dan ilmu
		Ш/с 200		F0.11	lain yg ditentukan kualifikasinya oleh Menteri Negara LH; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk1, golongan ruang III/b; 3. Mengikuti dan lulus diklat fungsional	
Ahli	Muda	III/d	300		58 th	Pengawas Lingkungan Hidup; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan	
M	Madya	IV/b	550		60 th	pertama;
_		IV/c	700			pengawasan lingkungan hidup paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian

1. PERMENPAN : Nomor PER/17/M.PAN/4/2006, Tanggal 11 April 2006

PERATURAN BERSAMA : Nomor 59/Permentan/OT.140/11/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006, Tgl 6 Nopember 2006

3. PENGERTIAN : Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan

sistem pengawasan dan pengujian.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 39 Tahun 2009, Per Ka BKN 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU: PNS Kementerian Pertanian / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Menteri Pertanian bagi PMHP Madya dibantu Tim Penilai Departemen

b. Pejabat eselon Ilbagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. PPK daerah Provinsi bagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

 d. PPK Daerah Kabupaten/Kota bagi PMHP P. Pemula s.d Penyelia dan PMHP Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI

PMHP Terampil yang memperoleh ijazah S1/DJVdapat diangkat menjadi PMHP Ahli, dengan syarat:

a. Ijazah yang dimiliki sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk PMHP Ahli;

b. Lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk PMHP Ahli;

c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	П/а	25	Rp. 300.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
		II/b	40	Rp. 350.000	0 58th	Berijazah paling rendah SMU/SMK sesuai Supisikasi yang ditantukan
	Pelaksana	II/c	60			kualifikasi yang ditentukan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Terampil		II/d	80			Golongan Ruang II/a.
	Pelaksana	III/a	100	Rp. 425.000	58th	3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
	Lanjutan	III/b	150	кр. 425.000	36 U1	sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 500.000	58th	satu tahun terakhir
		III/d	300	кр. 500.000	36 UI	
	Pertama	III/a	100	Rp. 500.000	58th	 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: Berijazah paling rendahS.1/ D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Persyaratan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama Memiliki pengalaman dibdg pengawasan mutu hasil pertanian paling kurang 2 th Berusia paling tinggi 50th
		Ш/b	150	141333333	333.	
		Ш/с	200		FOUL	
Ahli	Muda	III/d	300	Rp. 800.000	58 th	
		IV/a	400	Rp. 1.175.000		
	Madya	IV/b	550		60 th	
_		IV/c	700			

Pengawas Mutu Pakan

PERMENPAN-RB

PERATURAN BERSAMA **PENGERTIAN**

Nomor 22 Tahun 2013, Tanggal 7 Mei 2013 Nomor 114/Pementan/OT.140/11/2013 dan Nomor 28 Tahun 2013, Tanggal 6 Nopember 2013 Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS

TUGAS POKOK

: Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan se pengawasan dan pengujian mutu pakan. : Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 : PP Nomor 11 Tahun 2017 : Kamentorian Barbarian

PERPRESTUNJANGAN PERATURAN BUP 6.

: Kementerian Pertanian

INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN LINGKUP BERLAKU

: Ilmu Havat : PNS Kementerian Pertanian / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 b. Pejabat eselon IIyang membidangi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian, bagi Pelaksana Pemula s.d

Penyelia, dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian dibantu Tim Penilai Kementerian Pertanian

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan mutu pakan Provinsi, bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula, s.d Penyelia dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota, bagi Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula s.d Penyélia dan bagi Pengawas Mutu Pakan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKATAHLI

a. Pengawas Mutu Pakan Terampil yg memperoleh ijasah S1/D.IV dpt diangkat ke Pengawas Mutu Pakan Ahli dgn syarat:

) tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli;

ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan Ahli; telah mengikuti dan lulus diklat fungsional pengawasan mutu pakan ahli;

4) telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; dan

5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

b. Pengawas Mutu Pakan Terampil yang akan beralih menjadi Pengawas Mutu Pakan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/ Ď.IV ditambah angka kredit kúmulatif sebesar 65 %ďari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok ďan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI:

Pengawas Mutu Pakan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

a. Theriguitud Kari Gill dari Jabatan,
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Mutu Pakan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian
		II/b	40		58 th	Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 360.000		Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang
Terampil		II/d	80	1		Peternakan/ Analis Kimia;
	Pelaksana	III/a	100	D= 450,000	58 th	2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a:
	Lanjutan	III/b	150	Rp. 450.000		nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1tahun terakhir
	Domisalia	Ш/с	200	Rp. 720.000	58 th	
	Penyelia	III/d	300	1 .		
	Pertama	III/a	100	Dr. 540,000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkatAhli: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Peternakan/Kimia; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1tahun terakhir
		Ш/b	150	Rp. 540.000		
		Ш/с	200			
	Muda	III/d	300	Rp. 900.000	58 th	
Ahli		IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bdg pengawasan mutu pakan paling kurang 2th; 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Mutu Pakan; 4. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pengawas Mutu Pakan; 5. usia paling tinggi 50 tahun.
	Madya	IV/b	550			
		IV/c	700			

Pengawas Perikanan

- : Nomor 25 Tahun 201, Tanggal 26 September 2017 : Nomor 22 Tahun 2017, tanggal 24 Nopember 2017 PERMENPAN-RB PERATURAN BKN
- : Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 3. PENGERTIAN

tanggungjawab dan wewenang utk melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam rangka menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan

TUGAS JABATAN : Melakukan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk

menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. : Nomor 32 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 PERPRES TUNJANGAN

: PP Nomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

RUMPUN JABATAN LINGKUP BERLAKU : Ilmu Hayat

: PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah Provinsi

10. PEJABAT PENETAP PAK

BAT PENETAP PAK:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Ahli Madya/Madya dan Ahli Utama/Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Pusat
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengawas Perikanan Ahli Pertama/Pertama, Ahli Muda/Muda, dan Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KETINGKAT AHLI

Pengawas Perikanan Terampil yg memperoleh ijasah S1/D.IV bidang perikanan atau kualifikasi lain yg ditetapkan, dpt diangkat menjad Pengawas Perikanan Ahli dgn syarat: 1) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;

- ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian;
 memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan

6) memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

- Pengawas Perikanan Keterampilan yg akan beralih menjadi Pengawas Perikanan Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/DJV yg sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 🍪 dari pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang
- 12. UJI KOMPETENSI:

Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - mengundurkan diri dari Jabatan;
 - diberhentikan sementara sebagai PNS; menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - tidak memenuhi persyaratan jabatan
- 14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Perikanan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan sesuai ketentuan vang berlaku.

Retentuali ya	ang benaku.							
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
		II/b	40	Rp. 240.000	58th	Syarat pengangkatan pertama Kat Keterampilan:		
	Terampil/ Pelaksana	II/c	60			 berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik; 		
Keterampilan		II/d	80			sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah SUPM/SMKdi bidang kelautan		
	Mahir/ Pelaksana	III/a	100	D= 265,000	58th	dan perikanan dan paling tinggi Diploma III(DIII)di bidang kelautan dan perikanan atau kualifikasi		
	Lanjutan	III/b	150	Rp. 265.000		pendidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi		
		Ш/с	200			Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina;		
	Penyelia	III/d	300	Rp. 300.000	58th	nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir		
	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58th	Syarat pengangkatan pertama Kat Keahlian: 1. berstatus PNS:		
		Ш/b	150			 memiliki integritas dan moralitas yang baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV bidang perikanan atau bidang kelautan, atau kualifikasi pnddkan lain yg ditentukan Instansi Pembina; 		
	Ahli Muda	Ш/с	200	Rp. 400.000	58th			
		III/d	300					
		IV/a	400			5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai		
	Ahli Madya	IV/b	550	Rp. 660.000	60th	standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1		
Keahlian		IV/c	700			tahun terakhir		
	Ahli Utama	IV/d	850	Rp. 920.000	65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jab lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman bidang pengawasan perikanan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda dan Kategori Keterampilan b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNS		
		IV/e	1050					

yg telah menduduki JPT

Pengawas Radiasi

: Nomor 46 Tahun 2012, Tanggal 26 Juli 2012 **PERMENPAN-RB**

PERATURAN BERSAMA : Nomor 007/KS00 01/KB-BAPETEN/K/XII/2012dan 19 Tahun 2012, Tgl 28 Desember 2012 2.

: Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi, adalah jabatan fungsional yang mempunyai 3. PENGERTIAN ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan/ atau mendukung kegiatan pengawasan

radiasi.

: Melaksanakan kegiatan inspeksi, perizinan, evaluasi norma standar pengawasan **TUGAS POKOK**

> ketenaganukliran/ perjanjian pengawasan ketenaganukliran atau pengesahan perjanjian internasional, dan sertifikasi dan validasi untuk mendukung pengawasan

serta pembinaan dalam ketenaganukliran.

: Nomor 57 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 5. **PERPRESTUNJANGAN**

: PP Nomor 11 Tahun 2017 **PERATURAN BUP** 6.

: Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 7. **INSTANSI PEMBINA**

: Fisika, kimia dan yang berkaitan 8. **RUMPUN JABATAN**

: PNS Pusat / Daerah 9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala BAPETEN atau pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Pengawas Radiasi Madya, pangkat Pembina TKI golru IV/b s.d Utama, pangkat pembina Utama, golru IV/e di lingkungan BAPETEN dan instansi di luar BAPETEN dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Utama BAPETEN bagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan BAPETEN dibantu Tim Penilai Unit Keria

- c. Sekretaris Jenderal Kementerian atau pimpinan LPNK atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II bagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/a di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi
- d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon Ilbagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/a di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon Ilbagi Pengawas Radiasi Pertama s.d Madya, pangkat pembina, golru IV/a di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. DIKLAT PENJENJANGAN:

Pengawas Radiasi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Radiasi yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya

sesua	<u>i ketentuan yaı</u>	<u>ng berlaku</u>	l			
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama:
	reitaina	III/b	150	тф. 525.000		1. Berijazah paling rendah S1/DIV dibidang ilmu Fisika, Kimia, Keteknikan
	Muda	Ш/с	200	- Rp. 750.000	58 th	dan kualifikasi pendidikan yang terkait diatur lebih lanjut dengan peraturan
-	- Tuda	III/d	300			Kepala BAPETÉN; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. telah mengikuti dan lulus diklat
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	
Ahli		IV/b	550			fungsional Pengawas Radiasi 4. Nilai prestasi kerja paling kurang
		IV/c	700			bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
_		IV/e	1050			Memiliki pengalaman di bidang pengawasan radiasi paling kurang 2 th; Berusia paling tinggi 50th

Pengawas Sekolah

1. PERMENPAN-RB : Nomor 21 Tahun 2010, Tanggal 30 Desember 2010 jo Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2016

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 01/III/PB/2011dan Nomor 6 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan kegiatan

pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yg

meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan

di daerah khusus.

PERPRES TUNJANGAN : Perpres Nomor 108 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

 a. Mendiknas atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon Ibagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina TkI, golongan ruang IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e dilingkungan instansi pusat dan daerah dibantu Tim Penilai Pusat.

b. Dirjen Kemenag yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kemenag dibantu Tim Penilai Kementerian Agama.

c. Ka.Kanwil Kemenag Provinsi bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru III/cdan Muda, pangkat Penata TkI, golru III/ddilingkungan Kanwil Kementerian Agama dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah.

 d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru III/c s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

e. Bupati/Walikota yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru III/cs.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golru III/cs.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a diling instansi pusat diluar Kemendiknas dan Kemenag dibantu Tim Penilai Instansi.

11. TUNJANGAN JABATAN

No	Jabatan	Golongan	Jumlah (Rp)
\Box	Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Pendidikan	ш	Rp. 485.000
	Agama, TK, RA/ Bustanul Athfal, SD, MI, SDLBdan yg sederajat	IV	Rp. 560.000
	Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun mata pelajaran dan Pengawas	ш	Rp. 650.000
2.	Bimbingan dan Konseling pada SLTP, MTs, Sekolah Menengah, MA dan sederajat	IV	Rp. 725.000
3.	Pengawas Pendidikan Luar Biasa pada SLB	ш	Rp. 650.000
J.	rengawas rendidikan Luai biasa pada SLB	IV	Rp. 725.000

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabata.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Sekolah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan ruang	Angka Kredit	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
Muda III/c 200 58 III/d 300 IV/a 400	Muda	Ш/с	200	58th	Syarat pengangkatan: 1. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat		
	3501	pendidik dgn pengalaman mengajar paling sedikit 8th atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah paling sedikit 4th sesuai dgn satuan					
	Madya	IV/a	400	60 th	 pendidikannya masing-masing. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV bid pendidikan. Pangkat serendah-rendahnya Penata, Gol Ruang III/c Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang Pengawasan Usia paling tinggi 55 tahun Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah Telah megikuti diklat fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh SITP 		
Ahli		IV/b	550				
		IV /c	700				
	Utama	IV/d	850	GE 44			
IV/e 1050	65 th	Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2th terakhir					

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)

1. PERMENPAN : Nomor 15 Tahun 2009, Tanggal 25 September 2009

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010, Tanggal 24 Februari 2010

3. PENGERTIAN : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dgn peraturan perundang-undangan yg diduduki PNS

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah

diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan pengawasan atas peraturan daerah dan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi

penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 4 Tahun 2012, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri
8. RUMPUN JABATAN : Politik dan Hubungan Luar Negeri

9. LTNGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

 a. Inspektur Jenderal Depdagri bagi Pengawas Pemerintahan Madya, pangkat Pembina TkI golru IV/bs.d Pembina Utama Muda golru IV/c pada Itjen Kementerian/Inspektorat Utama LPNK, Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

- b. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama pd Kementerian/LPNK bagi Pengawas Pemerintahan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a pada Kementerian/LPNK dibantu Tim Penilai Pusat
- c. Sekretaris Itjen Depdagri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a pada Inspektorat Jenderal Depdagri dibantu Tim Penilai Instansi
- d. Inspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a pd Unit kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Provinsi
- e. Inspektur Kabupaten/Kota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama dan Muda pangkat Penata TkIgolru III/dpd Unit Kerja Inspektorat Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengawas Pemerintahan yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV	
	ratama	III/b	150			sesuai dgn kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata	
	Muda	Ш/с	200		58th	Muda, golongan ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:	
Ahli		III/d	300	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		IV/a	400				
	Madya IV/b 550 Rp. 900.000	60 th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional Memiliki pengalaman jabatan paling 				
Ļ		IV/c	700			singkat 2 tahun; 4. Berusia paling tinggi 50th.	

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

PERMENPAN-RB : Nomor 44 Tahun 2014, Tanggal 16Oktober 2014
 PERKA BKN : Nomor 4 Tahun 2016, Tanggal 7 Maret 2016

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah jabatan fungsional

melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

5. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

8. LINGKUP BERLAKU: PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah

9. UJI KOMPETENSI:

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

10. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

11. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali

dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku									
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit Minimal per-tahun	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan			
	Ahli Pertama	Ш/а	50	12,5	58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV(D-IV) bidang perikanan/ilmu kelautan/			
		III/b	50	12,5	30 41	planologi/ geografi/lingkungan; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;			
	Ahli Muda	Ш/с	100	25	58th	telah mengikuti dan lulus diklat fungsional untuk jabatan fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;			
	Amridad	III/d	100	25		4. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.			
	Ahli Madya	IV/a	150	37,5	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;			
Keahlian		IV/b	150	37,5		 berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) bidang perikanan/ilmu kelautan/ planologi/geografi/lingkungan; 			
		IV/c	150	37,5		 pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, golru III/b; telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional utk Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; 			
	Ahli Utama	IV/d	200	50		5. mengikuti dan lulus uji kompetensi;6. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang			
		IV/e	200	50	65 th	pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling kurang 2 tahun; 7. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; dan 8. usia paling tinggi 50 tahun.			

Pengelola Kesehatan Ikan

PERMENPAN-RB : Nomor 1 Tahun 2017, Tanggal 25 Januari 2017

Nomor 17 Tahun 2017 PERKA BKN

Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup 3. **PENGERTIAN**

tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan

dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya Melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi **TUGAS JABATAN**

persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. PERPRES TUNJANGAN : Nomor

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 6.

: Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. INSTANSI PEMBINA

: Ilmu Hayat 8. **RUMPUN JABATAN**

: PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

5

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perikanan Budidaya bagi Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya s.d Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Budidaya/Unit Pelaksana Teknis/Daerah Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Budidaya bagi Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama s.d Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda di Instansi Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja;

c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama/Ahli Pertama s.d Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Kesehatan Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Pengelola Kesehatan Ikan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengelola Kesehatan Ikan yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS;
	Anii Pertama	III/b	150		36 u i	 sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) bidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;dan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	ALPAGAL	Ш/с	200		58 th	
	Ahli Muda	III/d	300			
 Keahlian		IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; kecuali angka 5;
	Ahli Madya	IV/b	550			
		IV/c	700			memiliki pengalaman di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan paling singkat 2 th;
	Ahli Utama	IV/d	850			telah mengikuti dan lulus diklat di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2tahun terakhir
		IV/e	1050		65 th	 usia paling tinggi: a. 56th untuk menduduki jenjang Pertama/ Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda; dan b. 58th untuk menduduki jenjang Madya/Ahli Madya dan Utama/Ahli Utama;

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

1. PERMENPAN-RB : Nomor 77 Tahun 2012, Tanggal 26 Desember 2012

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013, Tanggal 1 Mei 2013

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penga-

daan barang/jasa Pemerintah sesuai dgn peraturan perundang-undangan

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen

kontrak dan manajemen informasi aset.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 109 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat/Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala LKPPatau pejabat eselon Iyang ditunjuk yang membidangi pembinaan jabatan fungsional bagi PPBJ Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bs.d pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan LKPP, instansi pusat diluar LKPP, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

 Pejabat eselon Iiyang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan LKPP dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat di luar LKPP dibantu Tim Penilai Instansi

 Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon IIyang ditunjuk yang membidangi pengadaan barang/ jasa bagi PPBJ Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

jabatar	jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.									
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
	Pertama	III/a	100	Rp. 493.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV sesuai				
		Ш/ь	150	300	333.	kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP; 2. pangkat paling rendah Penata Muda,				
Ahli	Muda	Ш/с	200	Rp. 876.000	58 th	golongan ruang III/a; 3. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3, paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Persyaratan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 tahun;				
		III/d	300	тф. 67 0.000						
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.150.000						
		IV/b	550		60 th					
	IV/c 700				telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tk pertama; usia paling tinggi 50 tahun;					

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

PERMENPAN-RB 2. PERKA BKN

: Nomor 8 Tahun 2017, Tanggal 31 Januari 2017 : Nomor 9 Tahun 2017, Tanggal 17 Juli 2017 : Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah jabatan yang mempunyai 3. **PENGERTIAN** ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan

pengelolaan produksi perikanan tangkap : Melaksanakan kegiatan pengelolaan produksi perikanan tangkap.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor

TUGAS JABATAN

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA 7. : Kementerian Kelautan dan Perikanan

RUMPUN JABATAN 8. : Ilmu Havat

9 LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan/Daerah

- PEJABAT PENETAP PAK :

 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perikanan Tangkap bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya/Ahli Madya dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Utama/Ahli Utama di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap/Unit Pelaksana Teknis/Sekretaris Daerah Provinsi/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Tim Penilai Pusat
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Perikanan Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Tim Penilai Unit Kerja
- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk bagi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli Pertama dan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda/Ahli Muda di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JF ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KE JF PENGELOLA PRODUKSI **PERIKANAN TANGKAP**

a. Pejabat Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang memperoleh ijazah S1/DIV dapat diangkat kedalam Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dengan ketentuan:

1) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;

- 2) ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;
- 3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang perikanan tangkap; dan
- 4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- b. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang akan diangkat menjadi Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) yang diperoleh ditambah sebesar 69% angka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan bangprof dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

UJI KOMPETENST: 12.

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjngan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
	Ahli	II I/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama : 1. berstatus PNS;				
	Pertama	III/b	150			sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang Perikanan atau Ilmu Kelautan, atau kualifikasi				
	Ahli	Ш/с	200			pendidikan yang ditentukan oleh instansi pembina; 4. Mengikuti dan lulus diklat fungsional				
	Muda	III/d	300		58 th	nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 th terakhir				
Keahlian		IV/a	400		60 th	Persyaratan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan produksi perikanan tangkap paling singkat 2 th; 3. telah mengikuti dan lulus diklat dibid. perikanan tangkap; 4. usia paling tinggi:				
	Ahli Madya	IV/b	550							
	1100,0	IV/c	700							
	Ahli	IV/d	850		65 th	a. 56th untuk menduduki jenjang Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda; dan				
_	Utama	IV/e	1050			b. 58th untuk menduduki jenjang Madya/Ahli Madya dan Utama/Ahli Utama ;				

Pengembang Teknologi Pembelajaran

PERMENPAN-RB : Nomor 28 Tahun 2017, Tanggal 16 Oktober 2017

PERATURAN BKN : Nomor 9 Tahun 2018, Tanggal 9 Mei 2018

3. PENGERTIAN

: Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang diduduki oleh PNSdengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. **TUGAS JABATAN** : Melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi,

pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran

PERPRES TUNJANGAN 5. : Nomor 22 Tahun 2013, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP 6. : PP Nomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA 7. : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. **RUMPUN JABATAN** Pendidikan lainnya LINGKUP BERLAKU **PNS Pusat /Daerah**

10. PEJABAT PENETAP PAK

> a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan teknologi pembelajaran pada Kemendikbud utk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya dan Ahli Utama dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Kemendikbud untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kemendikbud untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kemendikbud dibantu Tim Penilai Instansi

 d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengembang Teknologi Pembelajaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

<u> </u>	Januari, a document family a criainal									
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
Keahlian		III/a	100	Rp. 540.000		Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik				
	Ahli Pertama	III/b	150		58 th	3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) di bidang pendidikan, teknologi informasi/ komputer,				
	Ahli Muda	Ш/с	200	Rp. 1.020.000	58th	komunikasi/ media, dan seni atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNSyg telah menduduki JPT				
		III/d	300							
		IV/a	400		60 th					
	Ahli Madya	IV/b	550	Rp. 1.320.000						
		IV/c	700							
	Ahli Utama	IV/d	850		65th					
		IV/e	1050							

Pengendali Dampak Lingkungan

KEPMENPAN

: Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002, Tanggal 16 Agustus 2002 : Nomor 08 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun 2002, tanggal 25 September 2002 **KEPUTUSAN BERSAMA**

3 **PENGERTIAN** : Pengendali Dampak Lingkungan adalah PNSyang diberi tugas, tggjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan

penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas

lingkungan.

TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau

kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan Nomor 35 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **PERPRES TUNJANGAN**

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RUMPUNJABATAN : Ilmu Hayat

LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

PEJABAT PENETAP PAK:

a. Menteri Lingkungan Hidup bagi Pengendali Dampak Lingkungan Madya dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Menteri LHbagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja

 Kepala Badan/Pimpinan instansi Provinsi bagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota bagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kab/Kota

e. Pimpinan instansi tingkat pusat di luar kementerian LHbagi Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dan Pengendali Dampak Lingkungan Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KETINGKAT AHLI

Pengendali Dampak Lingkungan tingkat terampil yang memiliki/memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat sebagai Pengendali Dampak Lingkungan tingkat ahli, dengan syarat:

a. ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk jabatan Pengendali Dampak Lingkungan tingkat ahli

b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengendali Dampak lingkungan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil		II/b	40		58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000		Berijazah serendah-rendahnya D.II sesuai dengan kualifikasi pendidikan
		II/d	80			2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58th	TKI,Golru II/b. 3. Diklat fungsional Tk terampil
		III/b	150	кр. 205.000	35 U	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 400.000	58th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/d	300		3501	Co. Co. Co.
	Pertama	III/a	100	Rp. 310.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
		Ш/b	150			 Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a Diklat fungsional tingkat ahli Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Muda	Ш/с	200	- Rp. 650.000	58 th	
Ahli	i idda	III/d	300			
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Madya	IV/b	550	Rp. 975.000	60 th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang pengendalian dampak lingkungan paling singkat 2th; Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.
Ц		IV/c	700			

Pengendali Ekosistem Hutan

PERMENPAN-RB

: Nomor 50 Tahun 2012, Tanggal 23 Agustus 2012 : Nomor PB.1/MENHUT-II/2013dan Nomor 6 Tahun 2013, Tanggal 30 Januari 2013 PERATURAN BERSAMA

Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yg diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan pengendalian ekosistem hutan. **PENGERTIAN**

: Melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yg kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, **TUGAS POKOK** mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan. Nomor 34 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 22 Nopember 2007

PERPRESTUNJANGAN

6. PERATURAN BUP PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8. **RUMPUN JABATAN**

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Daerah 10. PEJABAT PENETAP PAK

Sekretaris Jenderal bagi PEHMadya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/b dan pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan bagi PEH Pelaksana Pemula, s.d Penyelia dan PEH Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi PEH Pel.Pemula pangkat Pengatur Muda, golru II/as.d Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golru II/ddilingkungan UPT Kementerian Kehutanan dibantu Tim Penilai UPT Kementerian Kehutanan

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan bagi PEHPel. Pemula s.d Penyelia dan PEHPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Daerah Provinsi

e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi PEH Pel. Pemula s.d Penyelia dan PEH Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI

a. PEHTerampil yg memperoleh ijazah S1/D.IVdpt diangkat menjadi PEHAhli, dengansyarat:

tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;

iiazah yang dimiliki sesuai dengan kualitikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;

telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional;

4) Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Keahlian; dan

5) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

b. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IVyg sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI DAN DIKLAT:

PEHyang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, sedangkan PEHMuda yang akan naik jabatan ke PEH Madya harus mengikuti dan lulus uji kompetensi serta diklat penjenjangan

PEMBERHENTIAN DARÍ JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

PEHyang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatan sesuai dengan peraturan yg berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah paling rendah SMK dibidang
		II/b	40		58 th	Kehutanan, Pertanian, perkebunan, perikanan/Kelautan, Peternakan, Kesehatan
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000		Hewan, Teknik Bangunan/ Sipil, Surveyor dan Pemetaan serta kualifikasi lain yg ditetapkan oleh
Terampil		II/d	80			Menteri Kehutanan;
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100		=0.1	pangkat paling rendah Pengatur Muda, golru II/a; telah lulus uji kompetensi PEH;
		III/b	150	Rp. 265.000	58th	4. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau
	Penyelia	Ш/с	200			pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang
		III/d	300	Rp. 325.000	58th	·
	Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah S/DIV bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, perikanan/
		Ш/ь	150			Kelautan, Ilmu Lingkungan, Geografi, Geodesi, Sosiologi, Kedokteran Hewan, Petemakan, Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan; 2. pangkat paling rendah penata Muda, golru III/a; 3. telah lulus uji kompetensi PEH; 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahunterakhir.
	Muda	ш/с	200	Rp. 400.000	58th	
Ahli	Muua	III/d	300		3641	
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
	Madya	IV/b	550	Rp. 600.000	60th	Memiliki pengalaman di bidang pengendalian ekosistem hutan paling singkat 2 th;
_		IV/c	700			Berusia paling tinggi 50 th; Telah ikut dan lulus diklat fungsional bidang pengendalian kehutanan

Pengendali Frekuensi Radio

1. KEP MENPAN : Nomor KEP/51/M.PAN/4/2004, Tanggal 30 April 2004

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor KM.77 Tahun 2004 dan Nomor 36 Tahun 2004, Tanggal 13 Oktober 2004

3. PENGERTIAN : Pengendali Frekuensi Radio, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan

pengendalian frekuensi radio.

4. TUGAS POKOK : Pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor

frekuensi radio

5. PERPRESTUNJANGAN: Nomor 33 Tahun 2008, Per. Ka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Komunikasi dan Informatika
 8. RUMPUN JABATAN : Operator Alat-alat Optik dan Elektronik
 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Menteri Kominfo/Pejabat eselon Iyang ditunjuk bagi Madya dibantu TimPenilai Direktorat Jenderal

b. Pejabat eselon IIdi bid.Pengendalian Frekwensi Radio pd Dirjen Pos dan Telkom bagi Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKATAHLI

Pengendali Frekuensi Radio Terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pengendali Frekuensi Radio Ahli, dengan syarat:

- a. iiazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pengendali Frekuensi Radio Ahli;
- b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional yang ditentukan untuk Pengendali Frekuensi Radio Ahli;
- c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan utk jabatan/pangkat yang didudukinya.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pengendali Frekwensi Radio yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SLTAsesuai
Terampil		II/b	40			dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 240.000	58 th	Gol. Ruang II/a.
	Ī	II/d	80]		Diklat fungsional tingkat terampil Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurang-
	Pelaksana	III/a	100	D= 26E 000	58 th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
	Lanjutan	Ш/ь	150	Rp. 265.000	36 U I	terakhir
	Penyelia -	Ш/с	200	D 22E 000	58th	
		III/d	300	Rp. 325.000	58 tn	
		III/a	100	Rp. 300.000	58th	 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a Diklat fungsional tingkat ahli Setiap unsur penilaian dlm DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pertama	III/b	150			
		Ш/с	200			
Ahli	Muda	Ⅲ/d	300	Rp. 450.000	58th	
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Madya	IV/b	550	Rp. 700.000	60 th	Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengendalian frekwensi radio paling kurang 2 tahun;
		IV/c	700			

3. Berusia paling tinggi 50 tahun

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

PERMENPAN - RB : Nomor 22 Tahun 2010, tgl 31 Desember 2010 jo Permenpan-RB No 2 Tahun 2017, tgl 11 Januari 2017

PERATURAN BERSAMA Nomor PB.01/MEN/2012 dan Nomor 17 Tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012

: Jabatan fungsional PHPIadalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan PENGERTIAN

wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang

diduduki oleh PNS.

: Melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan serta lingkungan yang meliputi **TUGAS POKOK** persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pengendalian

hama dan penyakit ikan.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 32 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

: Kementerian Kelautan dan Perikanan **INSTANSI PEMBINA**

RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

: PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah

9. LINGKUP BEKLANG 10. PEJABAT PENETAP PAK:

 a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat Eselon Iyang ditunjuk bagi PHPIMadya, pangkat Pembina TkI,golru IV/b s.d Utama, Pangkat Pembina Utama, golru IV/edilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Dirjen atau Pejabat Eselon Iyg ditunjuk bagi PHPIP.Pemula s.d Penyelia dan PHPIPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yg bekerja dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Kepala BKIPMbagi PIPIP.Pemula s.d Penyelia dan PIPIPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bekerja

dilingkungan BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

Sekda Provinsi bagi PHPIP.Pemula s.d Penyelia dan PHPIPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/ayang bekerja dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

Sekda Kabupaten/Kota bagi PHPIPel Pemula s.d Penyelia dan PHPIPertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a yang bekerja dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKATAHLI

a. PHPITerampil yang memperoleh ijazah S1/DIV bidang perikanan atau kualifikasi lain yg ditentukan, dpt diangkat menjadi PHPIÁhli, dengan syarat:

1) tersedia formasi untuk jabatan PHPIAhli;

2) telah mengikuti dan lulus diklat alih tingkat dari PHPITerampil ke PHPIAhli; dan

memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

 b. PHPITerampil yang akan beralih menjadi PHPIAhli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65%dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

IV/e

1050

ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI: PHPIyang diberhentikan karena poin b.s.d.e, dapat diangkat kembali dalam jabatan sesuai dengan peraturan yg berlaku.										
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angk a Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
	Pelaksana Pemula					Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SUPM /SMK bidang				
		II/b	40			perikanan				
Terampil _	Pelaksana	П/с	60	Rp. 240.000	58th	 Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir. 				
		II/d	80	1						
	Pelaksana Lanjutan	Ш/а	100	D., 20E 000	58th					
		Ш/b	150	Rp. 265.000) 58 UI					
	Penyelia -	Ш/с	200	D., 200 000	58th					
		III/d	300	Rp. 300.000						
		III/a	100	D 277 000		Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang perikanan atau sesuai dengan kualifikasi. 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir				
	Pertama	III/b	150	Rp. 275.000	58th					
	Muda	Ш/с	200	Rp. 400,000	58th					
	Muda	III/d	300	кр. 400.000	36 U1					
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:				
Ahli	Madya	IV/b	550	Rp. 660.000	60th	Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman dibidang PHPIpaling singkat				
		IV/c	700	1		2th; 3. Berusia paling tinggi:				
	Utama -	IV/d	850		65 th	a. 54th utk menduduki PHPIAhli Pertama, Muda dan Kategori Keterampilan b. 56th bagi JPTyg akan beralih ke PHPIAhli Madya dan Ahli Utama				
		T) //-	1050							

Syarat lain yg ditentukan instansi pembina

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan

PFRMFNPAN

: Nomor PER/10/M.PAN/05/2008, Tanggal 23 Mei 2008 : Nomor 55/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 BTahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 PERATURAN BERSAMA

: Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai ruang PENGERTIAN lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian OPT yang diduduki oleh

PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang : Menviapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing.

TUGAS POKOK mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau

daerah sebar serta membuat koleksi. : Nomor 16 Tahun 2013 Tanggal 1 Maret 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Pertanian / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

PERPRESTUNJANGAN

a. Sekjen Deptan bagi POPTMadya di lingkungan Deptan, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi pengendalian OPT, bagi POPT P.Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Departemen c. Sekda Provinsi bagi POPT P.Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Sekda Kabupaten/Kota bagi POPT P.Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

e. Pimpinan Instansi lain bagi POPT P.Pemula s.d Penyelia dan POPT Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKATAHLI

a. POPTTerampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV, dpt diangkat menjadi POPTAhli, dengan syarat:

tersedia formasi untuk jabatan POPT Ahli;

Ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk POPTAhli;
 telah mengikuti dan lulus diklat alih tingkat dari POPTTerampil ke POPTAhli; dan

memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

POPTTerampil yang akan beralih menjadi POPT Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69%dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

POPT yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keteritu	ian yang benaku	•				
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksnaa Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat
Terampil		II/b	40			Berijazah paling rendah SMU-IPA/SMK
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58th	dibidang Pertanian 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
		II/d	80			Muda, Gol. Ruang II/a
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 450.000	58th	3. Diklat fungsional tingkat terampil
		III/b	150	кр. 450.000	3501	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 660.000	58th	satu tahun terakhir
	renyena	III/d	300	кр. 000.000	36 U I	
	Pertama	III/a	100	Rp. 510.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a
		III/b	150			
	NA d c	Ш/с	200	D., 070 000	E0#	Diklat fungsional tingkat ahli Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Ahli	Muda	III/d	300	Rp. 870.000	58th	sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		IV/a	400	Rp. 1.140.000		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang pengendalian OPT paling kurang 2th; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun; 4. Telah ikut dan lulus diklat.
	Madya	IV/b	550		60 th	
		IV/c	700			

Penggerak Swadaya Masyarakat

1. PERMENPAN-RB : Nomor 28 Tahun 2018, Tanggal 27 Agustus 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 40 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa

melalui penggerakan

I. TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan

masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 63 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu sosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah 10. PEJABAT PENETAP PAK :

 Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tiransmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tiransmigrasi dan kementerian/lembaga;

 Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit pembinaan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Penggerak Swadaya Masyarkat Ahli Muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

 d. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan kementerian/lembaga;

e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian masing-masing untuk Angka Kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga.

f. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Penggerak Swadaya Masyarkat Ahli Muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi.

g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, Penggerak Swadaya Masyarkat Ahli Muda, dan Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Kategori Keterampilan di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS:

- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

12. PENGAKTIFAN KEMBALI:

Penggerak Swadaya Masyarakat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NCC IC	ai i yai ig ba laka.					
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana	II/a	25	Rp. 220.000	58th	1. Denjazan panny rendan Sci Asesual dyn
Terampil	Pelaksana	II/b	40		58th	kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
		П/с	60	Rp. 240.000		
		II/d	80			3. Diklat fungsional di bidang penggerakan
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265,000	58th	masyarakat;
		III/b	150	140.200.000		4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
	Penyelia	III/ c	200	Rp. 325.000	58 th	terakhir.
		III/d	300			
	Pertama	Ш/а	100	Rp. 270.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendahS.1/D.IV sesuai dgn
		III/b	150			kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda,
		III /c	200			golongan ruang III/a; 3. Diklat fungsional di bidang penggerakan
Ahli	Muda	III/d	300	Rp. 400.000	58 th	masyarakat; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir.
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Madya	IV/b	550	Rp. 500.000	60 th	Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang penggerakan masyarakat paling singkat 2 th;
		IV/c	700			 Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.

Penghulu

1. PERMENPAN : Nomor 09 Tahun 2019, Tanggal 24 Mei 2019

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor

3. PENGERTIAN : Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hakuntuk

melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan

kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

4. TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan

kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 73 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Agama

8. RUMPUN JABATAN : Keagamaan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Agama

10. PEJABAT PENETAP PAK:

 a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi bimbingan masyarakat islam Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Madya dan Penghulu Ahli Utama

b. Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penghulu Ahli Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penghulu yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kete	Reterituan yang beriaku.										
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kedit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan					
	Pertama	Ш/а Ш/b	100 150	Rp. 260.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan;					
	Muda	ш/с	200	Rp. 350.000	58 th	2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a; 3. Diklat fungsional tingkat ahli;					
		III/d	300			Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.					
Ahli		IV/a 400				Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:					
		IV/b	550	Rp. 500.000		Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang					
	Madya	IV/c	700		60 th	kepenghuluan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.					
	Utama	IV/d	850		60 th						
		TV/e	1050	1	60 th						

Penguji Kendaraan Bermotor

KEPMENPAN : Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003, Tanggal 21 Nopember 2003

2. KEPUTUSAN BERSAMA: Nomor KM.48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004, Tanggal 29 April 2004

3. PENGERTIAN : Penguji Kendaraan Bermotor, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala

kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan

bermotor.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 107 Tahun 2006, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perhubungan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Dirjen Perhubungan Darat/Pejabat eselon IIyang membidangi pengujian kendaraan bermotor bagi Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

b. Pejabat eselon IIyang membidangi pengujian kendaraan bermotor pada Dirjen Perhubungan Darat bagi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula s.d Pelaksana Lanjutan dibantu Tim Penilai Direktorat

c. Kepala Dinas/Pejabat eselon Ilyang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi bagi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Kepala Dinas/Pejabat eselon Ilyang membidangi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten/Kota bagi Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penguji Kendaraan Bermotor yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dim jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 200.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya SMU/SMK sesuai dengan kualifikasi
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 225.000	58 th	 pendidikan; Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Gol.Ruang II/a; Diklat fungsional tingkat terampil; Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir . Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang pengujian kendaraan bermotor paling kurang 2 th; Berusia paling tinggi 5tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir
		П/с	60			
Terampil		II/d	80			
	Pelaksana	Ш/а	100	Rp. 330.000	58 th	
	Lanjutan	III/b	150			
	Penyelia	Ш/с	200	D. 440.000	58 th	
		III/d	300	Rp. 440.000	36 U 1	
_						

Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 36 Tahun 2014, Tanggal 2 Oktober 2014

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 2 Tahun 2015, Tanggal 13 Januari 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan

kompetensi K3.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pengujian K3dan kompetensi K3yang meliputi perencanaan kegiatan

K3, pengujian higiene industri, pengujian kesehatan tenaga kerja, pengujian ergonomi, pengujian keselamatan kerja, pengujian kompetensi K3, pengendalian K3, pengkajian

K3, dan evaluasi dan pelaporan pelayanan K3

5. PERPRES TUNJANGAN :

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Ketenagakerjaan 8. RUMPUN JABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi Daerah Provinsi, dan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bagi Penguji K3 Ahli pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu Tim Penilai Unit Kerja
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Provinsi bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi TimPenilai Provinsi
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3 pada Instansi Daerah Kabnpaten/Kota bagi penguji K3 Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- 11. UJI KOMPETENSI:

Penguji K3 yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- 13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penguji K3 yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama	III/a	100		58 th	 Syarat pengangkatan pertama: berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) ilmu teknik, MIPA, kesehatan, manajemen, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Ketenagakerjaan; menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; mengikuti dan lulus diklat Jabatan Fungsional Penguji K3; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman dibidang pengujian K3 dan Kompetensi K3 paling kurang 2 th; Berusia paling tinggi 50 th.
	7 am i Grania	Ш/ь	150			
	Ahli Muda	Ш/с	200		58 th	
Keahlian		III/d 300	300			
		IV/a	400			
L	Ahli Madya	IV/b	550		60 th	
		IV/c	700			

Penguji Mutu Barang

PERMENPAN-RB

: Nomor 37 Tahun 2014, tanggal 13 Oktober 2014 : Nomor 15/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 14 Tahun 2015, tanggal 30 Januari 2015 PERATURAN BERSAMA

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,dan wewenang utk melakukan pengujian mutu barang sesuai dgn peraturan perundang-undangan. **TUGAS POKOK** : Melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi

dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang PERPRESTUNJANGAN : Nomor 70 Tahun 2007. Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

: PPNomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP 6. 7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perdagangan R. RUMPUNJABATAN : Pengawas kualitas dan keamanan LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Perdagangan/Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/cdi lingkungan Kementerian Perdagangan, Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan, Instansi Daerah Provinsi, Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang Pemula s.d Penyelia, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang Pemula, s.d Penyelia dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kem. Perdagangan dibantu Tim Penilai Instansi

d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang bagi Penguji Mutu Barang Pemula, s.d Penyelia, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang bagi Penguji Mutu Barang Pemula s.d Penyelia, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama s.d Ahli, Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

- a. PMB Keterampilan yang memperoleh ijazah S1/D.IV, dpt diangkat menjadi PMB Keahlian, dengan syarat:
 - 1) Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk PMB Keahlian;
 - telah mengikuti dan lulus diklat fungsional PMB Keahlian; dan
 - 3) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
- b. PMB Keterampilan yang akan beralih menjadi PMB Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/DJV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69%dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI:

Penguji Mutu Barang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

IV/c

700

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penguji Mutu Barang yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

	yang berlaku	l	ikali kai Cii L	a poin b s.a poin	, ′ •	angkat kembali dalam jabatannya sesuai
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan:
		II/b	40	Rp. 240.000	58th	1. berijazah paling rendah SMK di bidang Teknik
Keterampilan	Terampil	II/c	60			Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, atau Kimia; 2. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda,
		II/d	80			golongan ruang II/a;
	Mahir	III/a	100	Rp. 265.000	58th	3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penguji
		Ш/b	150		Jour	Mutu Barang Keterampilan; dan
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 325.000	58th	4. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik
		III/d	300			dalam 1 tahunterakhir
	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 270.000	58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian: 1. berijazah paling rendah S1/D.IVdi bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Kimia, Teknik Fisika, atau Kimia; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian
		III/b	150			
Keahlian	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 400.000	58 th	
Redniidii	7 7	III/d	300		55.51	4. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
		IV/a	400	Rp. 500.000		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Ahli Madya	IV/b	550		60 th	Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman dibidang pengujian mutu barang paling kurang 2 tahun;

3. Berusia paling tinggi 50 tahun.

Penguji Perangkat Telekomunikasi

PERMENPAN-RB : Nomor 3 Tahun 2017, tanggal 25 Januari 2017 PERKA BKN : Nomor 20 Tahun 2017, tanggal 26 Oktober 2017

: Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai PENGERTIAN

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan

penguijan perangkat telekomunikasi

TUGAS JABATAN : Melaksanakan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur

5. PERPRES TUNJANGAN

PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 6. 7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kominfo

: Pengawas kualitas dan keamanan 8. **RUMPUN JABATAN**

LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Kominfo 9

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/ Ahli Madya di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dibantu Tim Penilai Kementerian
- b. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit bagi Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama dan Penguji Perangkat Telekomunikasi Muda/Ahli Muda di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dibantu Tim Penilai Balai

11. UII KOMPETENSI:

Penguji Perangkat Telekomunikasi ya akan naik jabatan setingkat lebih tinggi hrs mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penguii Perangkat Telekomunikasi yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang
		III/b	150		3331	baik; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/
	A bii Maada	Ш/с	200		58th	Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus diklat fungsional di
	Ahli Muda	III/d	300		36ui	bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
	Ahli Madya	IV/a	400		60 th	 Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 th; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2tahun terakhir; berusia paling tinggi: 40tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Pertama/Ahli Pertama dan Muda/Ahli Muda; 45tahun untuk Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya/Ahli Madya;
		IV/b	550			
		IV/c	700			

Penilai Pajak

: Nomor 11 Tahun 2018, Tanggal 15 Februari 2018 PERMENPAN-RB

2. **PERATURAN BKN** : Nomor

: Jabatan Fungsional Penilai Pajak adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, 3. **PENGERTIAN** tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan.

TUGAS JABATAN : Melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan.

PERPRES TUNJANGAN

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 : Kementerian Keuangan 7. **INSTANSI PEMBINA**

8. **RUMPUN JABATAN** : Asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan

LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan 9.

10. **PEJABAT PENETAP PAK:**

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Sekretariat.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah

11. PENGANGKATAN DARI JF ASISTEN PENILAI PAJAK KE JF PENILAI PAJAK

Asisten Penilai Pajak yg memperoleh Ijazah S1/D.IV dapat diangkat dlm JF Penilai Pajak, dgn syarat:

- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
- b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak
- c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- d. telah mengikuti dan diklat fungsional di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan untuk kategori keahlian;
- e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
- f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

UJI KOMPETENSI

Penilai Pajak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- ditugaskan secara penuh pada JPTdan jabatan Administrasi;
- d. cuti di luar tanggungan negara; e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penilai Pajak yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama 58 th	E0 #b	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang			
Anii Pertama	Ш/b	150			 baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina; mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 th terakhir 	
Ahli Muda Keahlian	Ш/с	200		58 th		
	III/d	300				
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; 2. Memiliki pengalaman di bidang penilaian paling kurang 2 tahun; 3. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 th terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya
A	Ahli Madya	IV/b	550		60 th	
		IV/c	700			

Penilai Pemerintah

PERMENPAN - RB
 Nomor 18 Tahun 2016, tanggal 13 Oktober 2016
 PERKA BKN
 Nomor 13 Tahun 2017, Tanggal 25 Juli 2017

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. TUGAS JABATAN : melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

5. PERRESTUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUN JABATAN : Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Penilaian untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Madya/Ahli Madya dan Penilai Pemerintah Utama/Ahli Utama di lingkngn Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai kinerja Pusat
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kinerja Unit Kerja
- c. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama sampai dengan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat di luar Kementerian Keuangan dibantu Tim Penilai Kinerja instansi
- e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Kinerja Provinsi
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk untuk angka kredit bagi Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama dan Penilai Pemerintah Muda/Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kinerja Kabupaten/Kota

11. UJI KOMPETENSI:

Penilai Pemerintah yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. .tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- 13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penilai Pemerintah yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Pertama/Ahli Pertama	Pertama/Ahli	Ш/а	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;
	Ш/ь	150			 sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV); 	
	Muda/Ahli	Ш/с	200		58th	 mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penilaian; mengikuti dan lulus uji kompetensi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang penilaian paling singkat 2 (dua) tahun; berusia paling tinggi:
	Muda	III/d	300		36 UI	
Keahlian		IV/a	400			
	Madya/Ahli Madya	IV/b	550		60 th	
		IV/c	700			
Utama/Ahli Utama	Utama/Ahli	IV/d	850			
	IV/e	1050		65 th	Pemerintah Muda/Ahli Muda; b. 50 tahun untuk JF Penilai Pemerintah Madya/Ahli Madya dan Penilai Pemerintah Utama/Ahli Utama	

Penilik

1. PERMENPAN-RB : Nomor 14 Tahun 2010, Tanggal 6 Juli 2010

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, Tanggal 24 Maret 2011

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI) sesuai dngan peraturan perundang-

undangan yang diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program

pendidikan nonformal dan informal (PNFI).

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 72 Tahun 2013, Tanggal 12 November 2013

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Mendiknas bagi Madya, pangkat Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV/d, dibantu Tim Penilai Pusat

b. Kepala Dinas yg membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota bagi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. .tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penilik yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/b	150	Rp. 520.000	58th	Syarat pengangkatan : 1. Berstatus sebagai Pamong
_		Ш/с	200		58 th	Belajar/Pamong atau jabatan teknis sejenis dilingkungan pendidikan nonformal dan informal paling kurang 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi Guru/Pengawas Sekolah; 2. Berijazah paling rendah S1/D-IV
	Muda	III/d	300	Rp. 800.000		
	Madya	IV/a	400	Rp. 1.100.000	60 th	sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang pendidikan yg ditentukan;
Ahli		IV/b	550			Pangkat paling rendah Penata Muda Tk.I, Golru III/b Setiap unsur penilaian dalam DP-3
		IV/c	700			sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir; 5. Lulus seleksi sebagai Penilik
	Utama	I V/d	850	Rp. 1.300.000	65 th	Syarat lainnya: 7. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penilik dari jabatan fungsional Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, dan Guru paling tinggi berusia 54 th; 8. Pengangkatan dalam jabatan fungsional Penilik dari jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan informal paling tinggi berusia 50 tahun.

Pentashih Mushaf Al-Qur'an

1. PERMENPAN-RB : Nomor 19 Tahun 2019, Tanggal 26 September 2019

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor

3. PENGERTIAN : Pentashih Mushaf Al-Qur'an adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang

dan hak untuk melaksanakan pentashihan, pembinaan dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an

4. TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan,

dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.

5. PERPRESTUNJANGAN:

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Agama

8. RUMPUNJABATAN : Keagamaan 9. LINGKUP BERLAKU : Kementerian Agama

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama di lingkungan Kementerian Agama

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya di lingkungan Kementerian Agama

11. KENAIKAN JABATAN

Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang akan naik jabatan setiingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Pertama	III/a	50	Judan	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moral yang baik;
Keahlian		III/b	50		58 th	sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/ bidang ilmu agama Islam
	Muda	III/c	100		58 th	5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial,dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
		III/d	100		58 th	disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Madya	IV/a	150		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama;
		IV/b	150		60 th	2. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an paling kurang 2 (dua) tahun;
		IV/c	150		60 th	berusia paling tinggi: a. 53 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda;
	Utama	IV/d	200		65 th	 b. 55 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an; dan c. 60 tahun utk menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ahli Utama bagi
		IV/e	200		65 th	PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi

Penyelidik Bumi

PERMENPAN-RB : Nomor 01 Tahun 2013, tanggal 30 Januari 2013
 PERATURAN BERSAMA : Nomor 34 Tahun 2013 dan Nomor 32 Tahun 2013

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Penyelidik Bumi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyelidikan kebumian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan,

penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta

pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 96 Tahun 2015, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 9. LINGKUP BERLAKU\ : PNS Kementerian ESDM /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

- a. Menteri ESDM atau pejabat eselon Iyang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Madya, pangkat Pembina TKI,golru IV/b s.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi selain Kementerian ESDM dibantu Tim Penilai Pusat;
- b. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM atau pejabat eselon IIyang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian ESDM dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
- c. Pejabat eselon IIyang membidangi penyelidikan kebumian bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian ESDM dibantu Tim Penilai Instansi;
- d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon Ilyang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi;
- e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk, bagi Penyelidik Bumi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. DIKLAT DAN UJI KOMPETENSI:

Penyelidik Bumi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus diklat penjenjangan dan bagi yang belum mengikuti diklat penjenjangan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. .tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyelidik Bumi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Pertama Muda	Dortama	III/a	100	Rp. 500.000	58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)atau
	Palailla	Ш/b	150	кр. 500.000	3	Diploma IV di bidang Geologi, Ĝeódesi,
	Muda	Ш/с	200	Rp. 800.000	58 th	Geofisika, Geokimia, Pertambangan, Perminyakan, dan kualifikasi lain yang
	Muda	III/d	300	кр. 800.000		ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bid. penyelidikan kebumian; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam 1 th terakhir
		IV/a	400	Rp. 1.175.000	60 th	
Ahli	Madya	IV/b	550			
Ailli		IV/c	700			
		IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyelidikan kebumian paling kurang 2 tahun; 3. Tersedia formasi; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun
	Utama	IV/e	1050	Rp. 1.400.000	65 th	

Penyidik Badan Narkotika Nasional (Penyidik BNN)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 1 Tahun 2018, Tanggal 3 Januari 2018

2. PERATURAN BKN : Nomor 23 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Jabatan

Fungsional Penyidik BNN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam

lingkungan Badan Narkotika Nasional.

4. TUGAS JABATAN : Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta pencucian uang hasil

kejahatan narkotika dan prekursor narkotika

5. PERPRESTUNJANGAN :....

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Narkotika Nasional (BNN)

8. RUMPUN JABATAN : Penyidik dan Detektif

9. LINGKUP BERLAKU : PNS BNN /BNND Provinsi/Kabupaten/Kota

10. PEJABAT PENETAPPAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Madya di lingkungan BNN Pusat, BNN Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Pusat untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Pusat dibantu Tim Penilai Unit Kerja

 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyidikan pada BNN Provinsi untuk angka kredit bagi Penyidik BNN Ahli Pertama dan Penyidik BNN Ahli Muda di lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Provinsi

11. UJI KOMPETENSI:

Penyidik BNN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyidik BNN yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ucing	an ketentuan ya	ang bena	NG .			
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama:
	Pertama	III/b	150		3641	berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik;
	Ahli Muda	III/c	200		58th	sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma
		III/d	300			IV (DIV) bidang hukum dan ekonomi atau
	Ahli Madya	IV/a	400			kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
		IV/b	550		60 th	Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg telah disusun Instansi Pembina; 6. memiliki Sertifikat Penyidik BNN; dan 7. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam1 tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabtn lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 7; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyidikan dan penyelidikan paling kurang 2 tahun; 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 4. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya c. 60 th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNSyg telah menduduki JPT
Keahlian		IV/c	700			
	Ahli Utama	IV/d	850		65 th	
		IV/e	1050			

Penyuluh Agama

KEPMENPAN : Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggal 30 September 1999

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999, tanggal 13 Oktober 1999

3. PENGERTIAN : Penyuluh Agama adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjwb, wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.

4. TUGAS POKOK : Melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan

pembangunan melalui bahasa agama.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 50 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Agama

8. RUMPUN JABATAN : Keagamaan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Agama 10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Sekjen Depag bagi Penyuluh Agama Madya dibantu Tim Penilai Pusat

 Kakanwil Provinsi bagi Penyuluh Agama Pelaksana Lanjutan dan Penyelia, dan Penyuluh Agama Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Ka. Kantor Depag Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Agama Pelaksana dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

d. Pimpinan instansi diluar Depag bagi Penyuluh Agama Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Agama Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI

Penyuluh Agama Terampil yg memperoleh S1dapat diangkat menjadi Penyuluh Agama Ahli dengan syarat:

- a. Pendidikan/Ijazah/STTB sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Agama;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 thterakhir;
- d. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yg ditentukan utk pangkat yg baru berdasarkan pendidikan yg diperoleh;

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Agama yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

aenga	n ketentuan ya	ng beriaki	l			
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Berijazah serendah-rendahnya D.IIsesuai
		II/d	80			dengan kualifikasi pendidikan 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil	Pelaksana	III/a	100	Dn 265 000	58th	Muda TKI,Golru II/b.
	Lanjutan	III/b	150	Rp. 265.000		Diklat fungsional Tkterampil Setiap unsur penilaian dalam DP-3
	Penyelia	III/c	200	Rp. 300.000	58 th	sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
		III/d	300		3641	saw canun terakin
	Pertama	III/a	100	- Rp. 270.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV
	ratama	Ш/ь	150			sesuai dengan kualifikasi pendidikan. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a 3. Diklat fungsional tingkat ahli 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhi
	Muda	Ш/с	200	Rp. 350.000	58th	
Ahli	l lada	Ш/d	300		334.	
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bdg penyuluhan agama paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.
	Madya	IV/b	550	Rp. 500.000	60 th	
	-	IV/c	700			

Penyuluh Hukum

PERMENPAN-RB : Nomor 3 Tahun 2014, Tanggal 6 Januari 2014
 PERATURAN BERSAMA : Nomor 9 Tahun 2014dan Nomor 12 Tahun 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak utk melakukan kegiatan penyuluhan hukum

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan penyuluhan hukum

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 27 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM : Ilmu sosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK:

- a. Pejabat eselon Iyang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum Madya pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/e di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan instansi selain Kementerian Hukum dan HAM dibantu Tim Penilai Pusat;
- Pejabat eselon IIyang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibantu Tim Penilai Unit Keria;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia dibantu Tim Penilai Kantor Wilayah;
- d. Pejabat eselon II yang membidangi Penyuluhan Hukum di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan HAM bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda golru III/a s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Hukum dan HAM dibantu Tim Penilai Instansi;
- e. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat eselon Ilyang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon Ilyang ditunjuk bagi Penyuluh Hukum Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. UJI KOMPETENSI:

Penyuluh Hukum yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Hukum yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		III/a	100	Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama:
Muda	Pertama	III/b	150			berijazah paling rendah Sarjana (S1) di bidang hukum atau bidang lain yang kualifikasinya ditetankan lehih lanjut oleh Menteri Hukum dan
	III /c	200	Rp. 960.000	58th	Hak Asasi Manusia; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata	
	- Idaa	III/d	300	140.000	501.	Muda, golongan ruang III/a; 3. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Penyuluhan Hukum; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
AL:		IV/a	400	Rp. 1.260.000	60 th	
Ahli	Madya	IV/b	550			
		IV/c	700			
Ut		IV/d	850	Rp. 1.500.000	65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang Penyuluhan Hukum paling singkat 2th; 3. Tersedia formasi; 4. Berusia paling tinggi 50 tahun.
	Utama	IV/e	1050			

Penyuluh Kehutanan

PERMENPAN-RB : Nomor 27 Tahun 2013 Tanggal 14 Agustus 2013

PERATURAN BERSAMA: Nomor PB.I/Menhut-IX/2014 dan Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 3 Maret 2014

: Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, **PENGERTIAN** tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan penyuluhan kehutanan. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 19 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

LINGKUP BERLAKU PNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I,

 a. Kepala Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/edi ling. Kemhut, Provinsi /Kab/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.
 b. Sekretaris Badan yang membidangi penyuluhan kehutanan bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golru II/a s.d Penyuluh Kehutanan Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.
 c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon IIyang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan Provinsi bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golru II/as.d Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
 d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon IIyang ditunjuk yang membidangi penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kehutanan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Kehutanan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golongan pangkat Pe pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KETINGKATAHLI

a. Penyuluh Kehutanan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV, dpt diangkat menjadi Penyuluh Kehutanan Ahli, dgn syarat: tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan Keahlian;

ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Kehutanan Ahli;

telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan kehutanan Ahli; dan
 memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

Penyuluh Kehutanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Kehutanan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/ĎJVditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dan pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI:

Penyuluh Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Utama

Penyuluh Kehutanan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

	ian yang berlaku		ilukali kal	ena pom b s.a po	iii e, uapat	diangkat kembali dalam jabatannya sesuai
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25		58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berijazah paling rendah Sekolah Menengah
		II/b	40		58th	Kejuruan (SMK) Kehutanan;
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000		pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Terampil		II/d	80			golongan ruang II/a;
	Pelaksana	III/a	100	Rp. 450.000	58 th	 nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir
_	Lanjutan	III/b	150			
	Domisis	Ш/с	200	Rp. 780.000	58 th	
	Penyelia -	Ш/	300			
	Pertama	d	100	D E40.000	E0#	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang Kehutanan atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Kehutanan; 2. pngkt paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Pertama	III/B	150	Rp. 540.000	58th	
		Ш/с	200			
Ahli	Muda	III/d	300	Rp. 960.000	58th	
		IV/	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jbtn lain:
	Madya	а	550	Rp. 1.260.000	60th	Memenuhi syarat pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang penyuluhan
		IV/e	700			kehutanan paling kurang 2 tahun;
	Illanos	IV/d	850		CE N.	3. usia paling tinggi 50 tahun; dan 4. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di

65th

<u>bidang penvuluhan kehutanan</u>

Penyuluh Keluarga Berencana

PERMENDAN-RR : Nomor 21 Tahun 2018, Tanggal 2 April 2018 **PERATURAN BKN**

 Nomor 21 Tanun 2018, Tanggal 2 April 2018
 Nomor 24 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018
 Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
 Melakukan pengelolaan Program KKBPK yang meliputi penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 Nomor 26 Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
 PPNomor 11 Tahun 2017 3. **PENGERTIAN TUGAS JABATAN** 4.

PERPRESTUNJANGAN PERATURAN BUP 5. 6. 7. PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

8. : Ilmu sosial dan yang berkaitan **RUMPUNJABATAN** : PNS BKKBN

LINGKUP BERLAKU

PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Advokasi, Penggerakan dan Informasi atau pejabat lain yg ditunjuk untuk
Penyuluh KBAhli Madya/Madya dan Ahli Utama di lingkungan BKKBNdan Perwakilan BKKBNPovinsi dibantu Tim Penilai Pusat

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Perwakilan BKKBN Provinsi untuk Penyuluh KB Kategori Keterampilan dan Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama s.d Penyuluh KBAhli Muda/Muda dilingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi dibantu Tim Penilai Perwakilan

PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI 11.

Penyuluh KBKategori Keterampilan yg memperoleh Ijazah S1/D.IVdapat diangkat menjadi Penyuluh KBKategori Keahlian dengan syarat:

tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KBKategori Keahlian; ijazah yang dimiliki sesuai dgn kualifikasi yg ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KBKategori Keahlian; mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar

kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan fungsional di bidang Program KKBPK untuk Kategori Keahlian; dan memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan

6) pangkat paling rendah penata Muda, golru III/a; Penyuluh KB Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penyuluh KB Kategori Keahlian diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1/D-4, ditambah & Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang

UJI KOMPETENSI 12.

Penyuluh KByang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13.

PEMBERHENTIAN: DARI JABATAN
a. mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS; menjalani cuti di luar tanggungan Negara; menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh KByang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Batas** Jenjang Angka Tunjangan Kategori Golru Usia Pengangkatan Dalam Jabatan Jabatan Kredit Jabatan Pensiun Syarat pengangkatan pertama Kategori II/c 60 Keterampilan: 1. berstatus PNS; Terampil/ Pelaksana Rp. 325.000 58th memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani; II/d 80 berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) Ш/а 100 Mahir/ di bidang ilmu sosial atau kuàlifikasi Rp. 375.000 58th pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; Keterampilan Pelaksana Ш/b 150 Lanjutan mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar III/c 200 kompetensi yg tih disusun Instansi Pembina nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik Rp. 450.000 58th **Penyelia** Ⅲ/d 300 dalam 1 (satu) táhun terákhir Syarat pengangkatan pertama Kategori III/a 100 Ahli Keahlian: 58th Rp. 400.000 **Pertama** $\mathbf{III}/$ 1. berstatus PNS; 150 memiliki integritas dan moralitas yg baik; ь 200 sehat jasmani dan rohani; Ahli Muda Rp. 650.000 58th berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 ilmu sosial atau kualifikasi pendidikan lain III/d 300 yang relevan yg ditentukan Instansi Pembin; IV/a 400 mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi IV/b 550 Ahli Madya Rp. 950.000 60th Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yg tlh disusun Instansi Pembina; Keahlian nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. IV/c 700 Syarat pengangkatan perpindahan dari jab lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; IV/d 850 Memiliki pengalaman di bidang Program KKBPK paling singkat 2th Berusia paling tinggi: a. 53th utk menduduki jenjang Ahli Pertama, Ahli Utama 65th Ahli Muda dan Kategori Keterampilan 55th utk menduduki jenjang Ahli Madya IV/e 1050

60th utk menduduki jenjang Ahli Utama bagi PNSyg telah mendudukiJPT

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

KEPMENPAN : Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000, Tanggal 14 Agustus 2000

KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 1811/MENKES-KESOS/SKB/XII/2000 dan Nomor 164.A Tahun 2000 Tanggal 26 Des 2000 3.

PENGERTIAN : Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah PNSyang diberi tugas, tggjwb, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan

kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan

> masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilakumasyarakat yang

mendukung kesehatan. : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **PERPRESTUNJANGAN**

: PP Nomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan

RUMPUN JABATAN : Kesehatan

LINGKUP BERLAKU : PNS Kemenentrian Kesehatan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Sekjen Depkes bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pimpinan İnstansi baqı Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi

c. Direktur Promosi Kesehatan bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Direktorat

d. Kakanwil Provinsi bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Kepala Kantor depkes Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama s/d Muda dibantu Tim Penilai Kabupatén/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKATAHLI

Penyuluh Kesmas Terampil yg memperoleh S1/D.IV dapat diangkat menjadi Penyuluh Kesmas Ahli dengan syarat:

- a. Pendidikan/Ijazah/STTB sesuai dengan tugas pokok Penyuluh Kesmas;
- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan dlm DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 1th terakhir;
- d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat Penata Muda;

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP ɗan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Kesehatan Masyarakat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil p	Pelaksana	п/ b п/с	40 60 80	Rp. 240.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya DIIIsesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
	Pelaksana Lanjutan	III/a III/b	100 150	Rp. 265.000	Muda TKI, golongan ruang II/b; 58 th 3. Diklat fungsional tingkat terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 s	Diklat fungsional tingkat terampil; Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
	Penyelia	Ш/с Ш/d	200 300	Rp. 500.000	58 th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir .
	Pertama	Ш/а Ш/b	100 150	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan.
	Muda	Ш/с	200	Rp. 600.000	58 th	 Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a Diklat fungsional tingkat ahli Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
Ahli						kurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam bidang
	Madya	IV/b	550	Rp. 850.000	60 th	Memiliki pengalaman dalam bidang penyuluhan keshatan masyarakat paling singkat 2 th;
Ц		IV/c	700			Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.

Penyuluh Narkoba

PERMENPAN-RB
 Nomor 46 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014
 PERKA BKN
 Nomor 47 Tahun 2015, Tanggal 2 Desember 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah jabatan fungsional tertentu yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan

penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan penyuluhan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 51 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Narkotika Nasional (BNN)8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Sosial dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS BNN / Daerah

10. SYARAT PENGANGKATAN PERTAMA:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV(D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba;
- d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir

11. SYARAT PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN:

- a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Penyuluh Narkoba;
- b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV(D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina;
- c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Penyuluh Narkoba;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 tahun;
- f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir; dan
- g. usia paling tinggi 50 tahun.

12. UJI KOMPETENSI:

Penyuluh Narkoba yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi jenjang jabatan yang akan didudukinya

13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Narkoba yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah **Batas Usia** Jenjang Angka Tunjangan Golru **Angka Kredit Minimal** Kategori Jabatan Kredit Jabatan **Pensiun** per-tahun 50 12,5 Ш/а Ahli Pertama Rp. 540.000 58 th Ш/b 50 12,5 III/c 100 25 Rp. 960.000 Ahli Muda 58th 100 III/d 25 IV/a 150 37,5 Keahlian IV/b Ahli Madya 150 37,5 Rp. 1.260.000 60th IV/c 150 37,5 IV/d 200 **50** Ahli Utama 65 th Rp. 1.500.000 IV/e 200 **50**

Penyuluh Pajak

1. PERMENPAN : Nomor PER/04/M.PAN/2/2006, Tanggal 28 Februari 2006

2. PERKA BKN : Nomor

3. PENGERTIAN : Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak.

I. TUGAS POKOK : Memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum

dan wajib pajak.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Keuangan

8. RUMPUN JABATAN : Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Keuangan

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Direktur Jenderal Pajak bagi Penyuluh Pajak Madya dilingkungan Dirjen Pajak Dep. Keuangan dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

- b. Sekretaris Jenderal Pajak bagi Penyuluh Pajak Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Pajak Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Pusat Dirjen Pajak dibantu Tim Penilai Sekretariat
- Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak bagi Penyuluh Pajak Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Pajak Pertama s.d Muda dilingkungan Kantor Wilayah Dirjen Pajak dibantu Tim Penilai Wilayah

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KETINGKAT AHLI

Penyuluh Pajak Terampil yg memperoleh ijazah S1/DIV dpt diangkat menjadi Penyuluh Pajak Ahli, dgn syarat:

- a. Ijasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Pajak tingkat ahli;
- b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Pajak tingkat ahli; dan
- c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Pajak yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang lahatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan lahatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil Lanjuta	Polaksana	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksaria	II/d	80			Berijazah serendah-rendahnya DIIIsesuai dengan kualifikasi pendidikan; Pangkat serendah-rendahnya Pengatur,
	Pelaksana	III/a	100		58th	2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c
	Lanjutan	III/b	150		Soul	3. Diklat fungsional di bidang penyuluhan
	Penyelia	Ш/с	200		58 th	pajak; 4. Setjap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam
		III/d	300			sekurang- Kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Pertama	III/a	100		58 th	 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Diklat fungsional di bid. penyuluhan pajak; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	rauma	III/b	150			
	Muda	Ш/с	200		58 th	
Ahli		III/d	300			
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan pajak paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.
	Madya	IV/b	550		60 th	
_		IV/c	700			

Penyuluh Perikanan

PERMENPAN : Nomor PER/19/M.PAN/10/2008, Tanggal 20 Oktober 2008

PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009, Tanggal 7 Mei 2009

: Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh PNSdgn hak dan kewajiban secara penuh yg diberikan oleh pejabat yang berwenang. **PENGERTIAN**

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan. Nomor 169 Tahun 2014, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **PERPRESTUNJANGAN**

PERATURAN BUP PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN : Kementerian Kelautan dan Perikanan

: Ilmu Hayat

LINGKUP BERLAKU PNSKementerian Kelautan dan Perikanan / Daerah **10. PEJABAT PENETAP PAK**

Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon Iyg ditunjuk bagi Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina TkI Golru IV/bs.d Utama, pangkat Pembina Utama golru IV/edi lingkungan DKP daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai pusat

Pejabat eselon Ilbagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dibantu Tim Penilai Unit Kerja

Setda Provinsi bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dibantu Tim Penilai Provinsi

Setda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perikanan P.Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Perikanan Pertama s.d Madya pangkat Pembina golru IV/a dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKE TINGKATAHLI

Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh Ijasah S1/DJV dpt diangkat menjadi Penyuluh Perikanan Ahli dgn syarat:

tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli;

ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Perikanan Ahli;

3) telah lulus diklat fungsional alih tingkat dari jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan Ahli;

4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

Pényuluh Perikanan Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Perikanan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DJV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- mengundurkan diri dari Jabatan;
- diberhentikan sementara sebagai PNS; b.
- menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Perikanan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil : 1. Berijazah SUPM/SMK kejuruan di bidang Kelautan
		II/b	40			dan Perikanan atau sesuai kualifikasi; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan
Pelaksana Terampil Pelaksana Lanjutan Penyelia	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58th	ruang II/a;
		II/d	80			3. Diklat fungsional Tk terampil;
		Ш/а	100	Rp. 450.000	58th	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Lanjutan	III/b	150	1411301000	36 U	•
	Ш/с	200	Rp. 780.000	58th		
	Periyella	III/d	300	149.750.000	3501	
Portama	Pertama	III/a	100	- Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli :
	Percania	III/b	150		3641	Berijazah paling rendah S.1/D.IV bidang perikanan atau sesuai dgn kualifikasi;
	Muda	Ш/с	200	Rp. 960,000	58 th	2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
	Fidda	III/d	300	тф. 300.000	3501	ruang III/a;
		IV/a	400			Diklat fungsional tingkat ahli; Setiap unsur penilaian dalam DP-3sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
Ahli	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	kuraṅgnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		IV/c	700			
Utama	Utama	IV/d	850	Rp. 1.500.000	65 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan
		IV/e	1050	- 		perikanan paling singkat 2 tahun; 3. Telah ikut dan lulus diklat penyuluh perikanan; 4. Berusia paling tinggi 50 th

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

KEPMENPAN : Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002, Tgl 3 Desember 2002 jo Nomor KEP/04/M.PAN/I/2005

KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 436/MPP/KEP/6/2003 dan Nomor 24 Tahun 2003 Tanggal 23 Juni 2003 2

PENGERTIAN : Penyuluh Perindag adalah PNS yang diberi tugas, tggjwb, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan

nerindustrian dan nerdagangan.

: Melakukan penyuluhan di bidang perindustrian dan perdagangan. **TUGAS POKOK**

: Nomor 60 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 PERPRESTUNJANGAN

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Perindustrian **RUMPUNJABATAN** : IlmuSosial yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perindustrian / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Dirjen Industri Kecil dan DKM Depperindag bagi Penyuluh Perindag Madya dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
- b. Sekdirjen bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Jenderal
- Ka. Balai Besar Penelitian dan Pengmbangan Depperindag bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Balai Besar
- Ka. Balai Penelitian dan Pengmbangan Depperindag bagi Penyuluh Perindag Pelaksana dibantu Tim Penilai Balai
- Kadin/Pejabat eselon IIdi bid.perindag pd Provinsi bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama s.d Madya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Provinsi
- Kadin/Pejabat eselon IIdi bidang perindag pada Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Perindag Pelaksana s.d Penyelia dan Penyuluh Perindag Pertama s.d Madya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Kahunaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKATAHLI

Penyuluh Perindag Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Penyuluh Perindag Ahli, dgn syarat:

- ljasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Penyuluh Perindag tingkat ahli;
- lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Perindag tingkat ahli; dan
- Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- diberhentikan sementara sebagai PNS;
- menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Perindag yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jeniang Jabatan	Golru	Anaka Kredit	Tuniangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40	Rp. 240.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	II/c	60			Berijazah serendah-rendahnya D.IIsesuai dgn kualifikasi pendidikan;
		II/d	80			2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Dn 265,000	58th	Muda TKI,golongan ruang II/b; 3. Diklat fungsional tingkat terampil;
		Ш/b	150	Rp. 265.000	56 U1	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 300.000	58th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
		III/d	300			
	Pertama	III/a	100	- Rp. 270.000	58th	 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: Berijazah paling rendahS.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan; Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; Diklat fungsional tingkat ahli; Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1th terakhir
		III/b	150			
	N 4 .1.	Ш/с	200	D 400 000		
Ahli	Muda	III/d	300	Rp. 400.000	58th	
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Madya	IV/b	550	Rp. 500.000	60 th	1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
		IV/c	700			 Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan indag paling kurang 2 tahun; Berusia paling tinggi 50 tahun.

Penyuluh Pertanian

1. PER MENPAN : Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 Tanggal 18 Februari 2008

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 Tanggal 7 Nopember 2008

3. PENGERTIAN : Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh PNS yang diberi hak dan kewajiban

secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian,

evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian.

5. PERPRESTUNJANGAN: Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pertanian

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu Hayat

9. LINGKUP BERLAKU: PNS Kementerian Pertanian / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Sekjen Deptan bagi Penyuluh Pertanian Madya (golru IV/byang akan naik ke IV/c)dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi penyuluhan pertanian di Deptan bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Departemen

c. Sekda Provinsi bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Madya (Golru IV/a yg akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Provinsi

d. Sekda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Madya (Golru IV/a yg akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKATAHLI

a. Penyuluh Pertanian Terampil yang memperoleh Ijasah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Penyuluh Pertanian Ahli dgn syarat:

1) tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Pertanian Ahli;

2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Pertanian Ahli;

3) telah lulus diklat fungsional alih kelompok dari jabatan Penyuluh Pertanian Terampil ke Penyuluh Pertanian Ahli;

4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

 b. Penyuluh Pertanian Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Pertanian Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DJV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Pertanian yang tdiberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

	,, ,					
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angk a Kredit	Tunjang an Jabatan	Batas Usla Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SMK bidang
Terampil		II/b	40		58 th	pertanian
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000		2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,
		II/d	80			Golongan Ruang II/a
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	D:: 4F0 000	58th	3. Diklat fungsional tingkat terampil
		III/b	150	Rp. 450.000		Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Penyelia	π/_	200	- Rp. 780.000	58th	
		III/d	300			tel ari III
	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
	retaina	III/b	150			1. Berijazah paling rendahS.1/ D.IV sesuaidgn
	Muda	Ш/с	200	Rp. 960.000	58th	kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
		III/d	300	1		Golongan Ruang III/a:
		IV/a	400		Ţ	3. Diklat fungsional tkt ahli;
Ahli	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling
		IV/c	700	1		kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Utama	IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatanpertama;
		IV/e	1050	Rp. 1.500.000	65th	Memiliki pengalaman di bidang penyuluhan pertanian paling kurang 2 tahun; Berusia paling tinggi 50 tahun; Talah ilut dan luke dildat

Penyuluh Sosial

PERMENPAN : Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 Tanggal 9 April 2008

PERATURAN BERSAMA: Nomor 41/HUK-PPS/2008 dan Nomor 13 Tahun 2008 Tanggal 17 Juni 2008

: Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung 3. PENGERTIAN

> jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh PNS dengan hak dan

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

: Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial. **TUGAS POKOK** : Nomor 11 Tahun 2009, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 PERPRES TUNJANGAN

: PP Nomor 11 Tahun 2017 6. PERATURAN BUP

: Kementerian Sosial 7. INSTANSI PEMBINA

: Ilmu Sosial dan yang berkaitan 8. RUMPUN JABATAN : PNS Kementerian Sosial / Daerah 9. LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Sekjen Depsos bagi Penyuluh Sosial Madya dibantu Tim Penilai Departemen

b. Kapus penyuluhan Sosial bagi Penyuluh Sosial Muda dan Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Sekda Provinsi bagi Penyuluh Sosial Muda dan Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

Sekda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Sosial Muda dan Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan:

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Penyuluh Sosial yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

	Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1
	retaina	Ш/b	150		3041	sesuai dengan kualifikasi. 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a	
		Muda	Ш/с	200	Rp. 450.000	58 th	Lulus Diklat Fungsional Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik
	Ahli		III/d	300			dalam satu tahun terakhir
		Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
			IV/b	550	Rp. 700.000		Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan di bidang pembangunan kesejahteraan
		IV/c	700			paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.	
		1	I		I	1	

Perancang Peraturan Perundang - undangan

1. KEPMENPAN : Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000Tgl 22 Desember 2000 jo Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2016

2. KEPUTUSAN BERSAMA: Nomor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002, Tgl 29 Januari 2002

3. PENGERTIAN : Perancang Perppu adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun

rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya pada

instansi pemerintah

4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan

dan instrumen hukum lainnya.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 43 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Hukum dan HAM

8. RUMPUN JABATAN : Hukum dan peradilan 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Menteri Kehakiman dan HAM atau Pejabat lain yg ditunjuk olehnya bagi Perancang Perppu Utama di lingkngn Dep.Keh dan HAM dan Instansi lainnya diluar Dep.Keh dan HAM dibantu Tim Penilai Pusat.

b. Dirjen Per UU bagi Perancang Perppu Pertama s.d Madya di lingkngan Dep.Keh dan HAM dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal.

c. Pimpinan instansi yg bersangkutan diluar Dep.Kehakiman dan HAM atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perancang Perppu Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama:
		III/b	150	140.025.000	Jour	Berijazah serendah-rendahnya S.1 (Hukum) sesuai dengan kualifikasi
	Muda	Ш/с	200	Rp. 750.000	58 th	pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya
		Ⅲ/d	300	1417501666		Penata Muda, Gol. Ruang III/a; 3. Diklat fungsional Tk. Ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. Syarat Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Telah Mengikuti dan lulus diklat fungsional; 3. Memiliki pengalaman melakukan kegiatan perancang paling kurang 2 (dua) tahun; 4. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
	Madya	IV/a	400		60 th	
		IV/b	550	Rp. 1.200.000		
Ahli		IV/c	700			
7.111	Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65 th	
		IV/e	1050			

Pe rawat

PERMENPAN-RB

: Nomor 25 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014 : Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015, Tanggal 9 Januari 2015 PERATURAN BERSAMA

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tggiawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh PNS

: Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat. 3. TUGAS POKOK

: Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007 PERPRESTUNJANGAN

PERATURAN BUP PP Nomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA** Kementerian Kesehatan 6.

RUMPUNJABATAN : Kesehatan

LINGKUP BERLAKU 8. : PNS Pusat / Daerah

PEJABAT PENETAP PAK:

Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b s.d Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Pelawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pd Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di ling. Kem.Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja. Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi

e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

Direktur Rumah Sakit provinsi bagi: Perawat Terampil, pangkat pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Provinsi

g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan KabupatenIKota, bagi: Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dilingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Muda dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKAT AHLI

- a. Perawat Keterampilan yang memperoleh Ijasah Ners dpt diangkat menjadi Perawat Keahlian dgn syarat:
 - tersedia formasi untuk jabatan Perawat Keahlian;
 - 2) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

b. Perawat Keterampilan yang akan beralih menjadi Perawat Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Ners ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69%dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI

Perawat yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- diberhentikan sementara sebagai PNS;
- menjalani cuti di luar tanggungan Negara; menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Perawat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

				_			
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Terampil/	II/c	60	Rp. 240.000	58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan:	
Keterampilan	Pelaksana	II/d	80		3301	1. berijazah Diploma 亚(D.III) Keperawatan;	
	Mahir/Pel Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58th	2. pangkat paling rendah Pengatur, gol ruang II/ç dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam	
		Ш/ь	150	τμ. 205.000		1 (satu) tahun terakhir.	
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 500.000	58th	1 (Suu) wiidii waanii.	
		III/d	300		36 U1		
	Ahli Pertama	III/a	100			Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian:	
	/ Pertama	Ш/b	150	Rp. 300.000	58 th	1. berijazah paling rendah Ners; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a:dan	
	Ahli Muda/	Ш/с	200	Rp. 600.000	58 th	2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik	
	Muda	III/d	300	ιφ. σοσ.σσσ	36 UI	1 (satu) tahun terakhir.	
Keahlian		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:	
	Ahli Madya/	IV/b	550	Rp. 850.000	60 th	1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;	
	Madya	IV/c	700	- 4 30.000		memiliki pengalaman di bidang pelayanan keperawatan paling kurang 1th terakhir sebelum pengangkatan; 3. usia paling tinggi 50 tahun; dan 4. tersedia formasi untuk Perawat	
	Ahli Utama/ Utama	TV/d	850				
		IV/e	1050		65 th		

Perawat Gigi

PERMENPAN-RB

4. TUGASPOKOK

: Nomor 23 Tahun 2014, Tanggal 24 Juli 2014

: Nomor 4 Tahun 2015 dan Nomor 5 tahun 2015, Tanggal 9 Januari 2015

PERATURAN BERSAMA PENGERTIAN

: Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pd Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yg diduduki PNS. : Melakukan kegiatan pélayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut yg meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan tindakan kolaboratif kesehatan gigi dan mulut, dan pelaksanaan tugas khusus.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

: PP Nomor 11 Tahun 2017 **PERATURAN BUP** : Kementerian Kesehatan **INSTANSI PEMBINA** : Kesehatan **RUMPUNJABATAN**

9. LINGKUPBERLAKU

: PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.

b. Direkturyang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat

Tim Penilai Unit Kerja

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat.

Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi: Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit dilingkungan Rumah Sakit Provinsi; dan Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai UPTDProvinsi.

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi: Perawat Gigi Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a, pada Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota.

Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: Perawat Gigi Terampil, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia; dan Perawat Gigi Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota

10. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

Perawat Gigi Keterampilan yg memperoleh Ijasah D.IV Keperawatan Gigi dpt diangkat menjadi Perawat Gigi Keahlian dgn syarat:

1) tersedia formasi untuk jabatan Perawat Gigi Keahlian;

2) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

Perawat Gigi Keterampilan yang akan beralih menjadi Perawat Gigi Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Keperawatan Gigi ditambah angka kredit kumulatif sebesar &/odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

11. UJI KOMPETENSI:

Perawat Gigi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- diberhentikan sementara sebagai PNS;

- menjalani cuti di luar tanggungan Negara; menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Perawat Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

beriaka						
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjanga n Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Terampil/	II/c	60	Rp. 240.000	58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan:
	Pelaksana	π/н	ก		3301	1. berijazah paling rendah Diploma Ⅲ(DⅢ) Keperawatan Gigi;
Keterampilan	Mahir/Pe I Laniutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	2. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c
		III/b	150	кр. 205.000		3. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)Perawat Gigi
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 500.000	58 th	yang masih berlaku; dan 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
		III/d	300			dalam 1 (satu) táhún terákhir
	Ahli Pertama/ Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian:
		III/b	150			 berijazah paling rendah Diploma IV (D.IV) Keperawatan Gigi; pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; memiliki SIRPerawat Gigi yang masih berlaku;
	Ahli Muda/	Ш/с	200		58th	
Keahlian	Muda	III/d	300			nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi persyaratan yg telah ditentukan 2. memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut paling kurang 1 tahun terakhir sebelum pengangkatan; 3. usia paling tinggi 50 tahun; dan 4. tersedia formasi untuk Perawat Gigi
	Ahli Madya/ Madya	IV/b	550		60 th	
		IV/c	700			

Perekam Medis

PERMENPAN-RB

PERATURAN BERSAMA

: Nomor 30 Tahun 2013 Tanggal 14 Agustus 2013 : Nomor 48 Tahun 2014 dan Nomor 22 Tahun 2014 Tanggal 4 Agustus 2014 : Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tggjawab, dan 3. PENGERTIAN wewenang utk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang diduduki oleh PNS. **TUGAS POKOK** : Melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan,

dan pelaporan dan evaluasi : Nomor 114Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 PERPRESTUNJANGAN

: PP Nomor 11 Tahun 2017 6. **PERATURAN BUP** : Kementerian Kesehatan

INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN 7. 8. : Kesehatan LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

PEJABAT PENETAP PAK:

Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perekam Medis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, bagi Perekam Medis Madya pangkat

Pembiná, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Ŭnit Kerja

Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c s.d Penyelia, dan Perekam Medis Pertama dan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golru III/d di lingkungan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.

Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Perekam Medis Penyelia dan Perekam Medis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Rumah Sakit Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perekam Medis Pertama dan Muda di lingkungan RSProvinsi dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi. f.

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/ Kota bagi Perekam Medis Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Rumah Sakit dan Balai Sanatorium Kabupaten/Kota, Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d g. kesehatan lainnya Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Sanatorium Kabupaten/Kota bagi Perekam Medis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Perekam Medis Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Sanatorium Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota

- 11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI
 a. Perekam Medis Terampil yg memperoleh Ijasah S1/DIVdpt diangkat menjadi Perekam Medis Ahli dgn syarat:
 - Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) rekam medis informasi kesehatan;
 - Memiliki Surat Tanda Regristasi (STR)Perekam Medis yang masih berlaku;
 - Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Perekam Medis Ahli; dan
 - 4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;
 - b. Perekam Medis Terampil yang akan beralih menjadi Perekam Medis Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPĒTENSI:

Perekam Medis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi 13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Perekam Medis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang

berlaku												
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan						
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:						
	relansaria	II/d	80	тфізобіосо	Sout	1. berijazah paling rendah Diploma III(D.III)rekam medis informasi kesehatan;						
Terampil	Pelaksana	III/a	100	Rp. 450.000	58th	2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/ç						
	Lanjutan	Ш/b	150			 Memiliki Surat Tanda Regristasi (STR)Perekam Medis yang masih berlaku; 						
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 780.000	58th	4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir						
		III/d	300			1 (Satu) tanun teraknir						
	Pertama	III/a	100	- Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) rekam medis informasi kesehatan; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. Memiliki Surat Tanda Regristasi (STR)Perekam Medis yang masih berlaku 4. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.						
		Ш/b	150									
	_	Ш/с	200	Rp. 960.000	- 0.1							
Ahli	Muda	III/d	300		58th							
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;						
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60th	Memiliki pengalaman di bidang pelayanan rekam medis informasi kesehatan paling kurang 1 tahun terakhir sebelum pengangkatan; Usia paling tinggi 50 tahun;						
		IV/c	700									

4. Tersedia formasi untuk jabfung Perekam Medis.

Perekayasa

PERMENPAN-RB : Nomor PER/219/M.PAN/7/2008, Tanggal 4 Juli 2008 jo Permenpan-RB Nomor 2 tahun 2016

2. PERKA BKN : Nomor 13 Tahun 2016, Tanggal 27 Mei 2016

3. PENGERTIAN : Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan

wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan kerekayasaan.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 31 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : BPPT

8. RUMPUN JABATAN : Penelitian dan perekayasaan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Kepala Badan BPPTatau pejabat lain yang ditunjuk setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk penetapan angka kredit Perekayasa Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bs.d Perekayasa Utama untuk Perekayasa di lingkungan BPPTdan instansi Pusat/Daerah di luar BPPTdibantu Tim Penilai Pusat
- b. Pejabat yang ditunjuk di lingkungan BPPTyang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan BPPT dibantu Tim Penilai Unit Kerja;
- PPK Pusat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi;
- d. PPK Provinsi yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi; dan
- e. PPKKabupaten/Kota yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang membidangi kepegawaian paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Perekayasa Pertama s.d Perekayasa Madya, pangkat Pembina, golru IV/a untuk Perekayasa di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Perekayasa yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

	keten	<u>tuan yang berk</u>	<u>aku.</u>				
	Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Pertama	Portama	III/a	100	Rp. 325.000	58th	Syarat pengangkatan pertama:	
	reitailia	III/b	150	кр. 323.000	36 U	Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan;	
	Muda	Ш/с	200	Rp. 750.000	ESH	Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a; Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun	
		III/d	300			terakhir.	
	Ahli	Madya	IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang kerekayasaan paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 54th utk menduduki jabatan Perekayasa Pertama dan Muda; 4. Berusia paling tinggi 56th utk menduduki jabatan Perekayasa Madya; 5. Berusia paling tinggi 60th utk menduduki jabatan Perekayasa Utama dan bagi PNSyg telah menduduki JPT;
			IV/b	550			
			IV/c	700			
		Utama	IV/d	850	Rp. 1.400.000	65th	
L		IV/e	1050	147 21 1001000		6. Memiliki penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 tahun terakhir;7. Syarat lain yg ditentukan instansi pembina;	

Perencana

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001, Tanggal 19 Maret 2001

2. KEPUTUSAN BERSAMA: Nomor 1106/Ka/08/2001 dan Nomor 34.A Tahun 2001, Tanggal 3 Agustus 2001

PENGERTIAN : Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan

perencanaan tertentu.

4. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 44 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Kepala Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Utama dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Utama Bappenas atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Bapenas

c. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat diluar Bappenas bagi Perencana Pertama sampai Madya dibantu Tim Penilai Instansi

d. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Perencana Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS:
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Perencana yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dlm jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kete	Retentuali yang benaku.										
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan					
	Pertama	III/a	100	D. 225 222	FOUL	Syarat pengangkatan pertama:					
		III/b	150	Rp. 325.000	58 th	Berijazah serendah-rendahnya S.1 sesuai dengan kualifikasi					
	Muda	Ш/с	200	Rp. 750.000	58th	pendidikan;					
		III/d	300	кр. 730.000	Soul	 Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Gol. Ruang III/a; Diklat fungsional tingkat ahli; Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir. Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan					
	Madya	IV/a	400		60 th						
		IV/b	550	Rp. 1.200.000							
Ahli		IV/c	700								
	Utama	IV/d	850								
		IV/e	1050	Rp. 1.400.000	65 th						

Perisalah Legislatif

PERMENPAN-RB
 Nomor 26 Tahun 2017, Tanggal 4 Oktober 2017
 PERATURAN BKN
 Nomor 20 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah

legislatif

4. TUGASJABATAN : Melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat,

penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan

risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif

5. PERPRESTUNJANGAN : ...

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Sekjen DPR RI 8. RUMPUN JABATAN : Manajemen

9. LINGKUP BERLAKU : Sekjen DPR RI/DPD/DPRD

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Sekjen DPR RI untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Madya di lingkungan Sekjen Badan Keahlian DPR RI, Sekjen MPR RI, Sekretariat DPR RI, dan Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPR di Aceh, Sekretariat DPR di Papua, dan Sekretariat DPR di Papua Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, Sekretariat DPR Kabupaten/Kota di Aceh;
- Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi risalah pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Sekjen MPR RI, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekjen MPR RI, Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, dan Sekretariat DPR RI;
- c. Sekda Provinsi untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
 Papua Rarat: dan
- d. Sekda Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit bagi Perisalah Legislatif Ahli Pertama dan Perisalah Legislatif Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.

11. UJT KOMPETENST:

Perisalah Legislatif yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 12. PEMBERHENTIAN: DARI JABATAN
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP ɗan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- 13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Perisalah Legislatif yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

	ketentuan yang berlaku.									
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;				
		III/b	150		3301	 sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) bidang ekonomi, manajemen, hukum, ilmu administrasi, dan sosial; mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi pembina; nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir 				
	Ahli Muda	Ш/с	200		58th					
		III/d	300							
	Ahli Madya	IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 4 dan 6; 2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV); 3. Memiliki pengalaman pelaksaan tugas di bidang risalah legislatif paling kurang 2 th 4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir 5. Berusia paling tinggi: a. 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; b. 55 th untuk menduduki jenjang Ahli Madya.				
		IV/b	550		60 th					
		IV/c	700							

Polisi Kehutanan

: Nomor 17 Tahun 2011, Tanggal 7 Maret 2011 PERMENDAN-RR

PERATURAN BERSAMA : Nomor NK.14/MENHUT-II/2011dan Nomor 31 Tahun 2011, Tanggal 22 Agustus 2011

3 : JF. Polisi Kehutanan adalah jabatan dlm lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai PENGERTIAN dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang

oleh Kuasa UUdiberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan kionversi sumber daya

alam hayati dan ekosistemnya yg diduduki oleh PNS.

TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan

kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Nomor 18 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **PERPRESTUNJANGAN**

PPNomor 11 Tahun 2017 6. PERATURAN BUP

INSTANSI PEMBINA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RUMPUN JABATAN Penyidik dan detektif 8.

9. LINGKUP BERLAKU PNSKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / Daerah

PEJABAT PENETAP PAK

Dirjen yg membidangi polisi kehutanan bagi Madya, pangkat Pembina TkI,golru IV/bdan Pembina Utama Muda, golru IV/c dilingkungan Kemhut, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat

Sekdirjen yg membidangi polisi kehutanan bagi Pel. Lanjutans.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Kemhut dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

Kepala UPTKemhutbagi Pel. Pemula, s.d Pelaksana dilingkungan Kemhutdibantu Tim Penilai UPT

Ka.Dinas Provinsi yg membidangi kehutanan bagi Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a dilingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

Ka. Dinas Kabupaten/Kota yg membidangi kehutanan bagi Pel. Pemula s.d Penyelia dan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu TimPenilai Kabupaten/Kota

PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKATAHLI

a. Polisi Kehutanan Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D.IVdpt diangkat menjadi Polisi Kehutanan Ahli dgn syarat:

- 1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dibidang kehutanan, pertanian, biologi, perikanan/kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol, dan kualifikasi lain yg ditetapkan instansi pembina; Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional alih tingkat dari Polisi Kehutanan Terampil ke Polisi Kehutanan Ahli;
- 3) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan

4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

Polisi Kehutanan Terampil yang akan beralih menjadi Polisi Kehutanan Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IVyg sesuai kompetensi ditambah angka kredit kumulatif sebesar @/odari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

Polisi Kehutanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi atau dapat mengikuti diklat sesuai dengan jenjang jabatan. Sedangkan Polisi Kehutanan Muda yang akan naik jabatan menjadi Polisi Kehutanan Madya selain mengikuti dan lulus uji kompetensi juga wajib mengikuti dan lulus diklat penjenjangan

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Polici Kebutanan ya diberbentikan karena poin b s.d poin e. dapat diangkat kembali dlm iabatannya sesuai ketentuan ya berlaku.

Polisi Ke	nutanan yg dibe	rnentikan	karena po	oin o s.a poin e, a	apat diangkat i	kembali dim jabatannya sesual ketentuan yg benaku.
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SMK bid.kehutanan/SMA
		II/b	40			sesuai kualifikasi yang ditentukan Menhut;
Terampil	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58th	2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golru II/a;
		II/d	80	1		3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	D E10.000	58th	bernilai baik dalam 1tahunterakhir.
_		Ш/ь	150	Rp. 510.000	36 UI	bernia baik dalam Tunanterakin
	Penyelia	Ш/с	200	D. 040.000	EOH	
		III/d	300	Rp. 840.000	58th	
	Pertama -	III/a	100	- Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendah S1/D.IV dibid.Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Teknik Lingkungan, Hukum, Sospol dan kualifikasi lain yg
		Ш/ь	150			
	Mode	Ш/с	200		E046	ditetapkan menhut; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golru III/a;
Ahli	Muda	Ⅲ/d	300	Rp. 1.140.000	58th	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahunterakhir.
ANII		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dibidang kepolisian kehutanan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 35th utk Tk Terampil dan 40th Tk Ahli; 4. Tersedia formasi jabatan Polisi Kehutanan; 5. Telah lulus Diklat dasar fungsional bidang kepolisian kehutanan.
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.380.000	60th	
		IV/c	700			

Polisi Pamong Praja (Pol PP)

1. PERMENPAN-RB : Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 8 Januari 2014

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Pol PP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

wewenang untuk melakukan keglatan penegakan perda dan penyelenggaraan keteruba ketentraman masyarakat sesuai peraturan-perundang-undangan.

4. TUGAS POKOK : Penegakan perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat..

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 102 Tahun 2017, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017
7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Dalam Negeri : Penyidik dan detektif

9. LINGKUPBERLAKU : PNSDaerah

10. PEJABAT PENETAPPAK :

- a. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pol pp bagi pol PPMadya pangkat Pembina Tingkat Igolru IV/bdan pangkat Pembina utama Muda golru IV/c, di lingkungan Provinsi dan KabupatenlKota dibantu Tim Penilai Pusat.
- Kepala Satpol PP Provinsi bagi Pol PP Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pol PP Pertama s.d Pol PP Madya pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.
- c. Kepala Satpol PPKabupaten IKota bagi Pol PPPelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pol PPPertama s.d pol PPMadya pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI

- a. Pol PPTerampil yg memperoleh Ijasah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pol PPAhli dgn syarat:
 - 1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dibidang pemerintahan, sosiologi, politik, hukum, dan ekonomi dan bidang lain yg ditetapkan instansi pembina;
 - Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pol PP keahlian;
 - 3) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli; dan
 - 4) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang diduduki;
- b. Pol PP kategori keterampilan yang akan beralih menjadi Pol PP kategori keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69%dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI:

Pol PPyang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

13. PEMBÉRHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pol PPyang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

Poi PP yang dibernenukan karena poin b s.u poin e, dapat diangkat kemban dalam jabatannya sesuai ketenuan yang benaku											
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan					
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. berljazah paling rendah SLTA atau yang setingkat					
		II/b	40			dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;					
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58th	2. pangkat paling rendah pengatur Muda, golru II/a;					
Terampil		II/d	80			tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk laki-laki dan 155 sentimeter untuk perempuan;					
	Pelaksana	Ш/а	100	D 4F0 000	58th	4. sehat jasmani dan rohani;					
	Lanjutan	Ш/ь	150	Rp. 450.000		5. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Dasar pol Keterampilan; dan					
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 780,000	58th	6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun Terakhir					
		III/d	300	кр. 780.000	Soul	datam 2 (data) aman radium					
	Pertama	Ш/а	100	Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IVdi bidang Imu Pemerintahan, Sosial, Politik, Hukum,					
		ш/ь	ш/ь 150			Ekonomi dan bidang ilmu lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pimpinan instansi pembina;					
						pangkat paling rendah penata Muda, golru III/a; tinggi badan paling kurang 160 sentimeter untuk					
		Ш/с	200			laki-laki dan 155 sentimeter untukperempuan;					
Ahli	Muda		200	Rp. 960.000	58th	sehat jasmani dan rohani; mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan					
^''''	Muua			. кр. 900.000	3501	Dasar Pol PPJenjang Keahlian; dan					
		III/d	300			nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.					
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional pol pp; 3. memiliki pengalaman di bidang tugas Pol PP paling kurang 2tahun; dan 4. Usia paling tinggi 50 tahun.					
	Madya			- B- 4 300 000	60th						
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	0001						
5		IV/c	700								

Pranata Hubungan Masyarakat

PERMENPAN-RB : Nomor 6 Tahun 2014, Tanggal 10 Januari 2014

PERATURAN BERSAMA: Nomor 39 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014, Tanggal 29 September 2014

: Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan **PENGERTIAN**

TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan

informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta

pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan

PERPRESTUNJANGAN: Nomor 29 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

INSTANSI PEMBINA : Kementerian Komunikasi dan Informatika

RUMPUN JABATAN : Penerangan dan Seni Budaya

LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Pejabat eselon Iyang membidangi informasi dan komunikasi publik Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Tingkat I golru IV/b dan Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kem.Kominfo, Instansi Pusat selain Kem.Kominfo, Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.

b. Pejabat eselon Ilyang membidangi komunikasi publik di lingkungan eselon Ilyang membidangi informasi dan komunikasi publik Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kem.Kominfo dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

c. Pejabat eselon IIyang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan pada Instansi Pusat selain Kem.Kominfo, bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi.

Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Iliyang ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Pranata Humas Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk yang membidangi pelayanan informasi dan kehumasan bagi Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Pranata Humas Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI KATEGORI KETERAMPILAN KE KATEGORI KEAHLIAN

- a. Pranata Humas Keterampilan yg memperoleh Ijasah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Pranata Humas Keahlian dgn syarat:
 - 1) berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan Instansi Pembina;

tersedia formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli;

3) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Tingkat Ahli; dan

4) memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan;

Pranata Humas Keterampilan yang akan beralih menjadi Pranata Humas Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI:

Pranata Humas yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Pranata Humas yang diberhetnikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang

berlaku.					-	
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 240.000	58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan:
	relansaria	II/d	80	тф. 2-10.000		berijazah Diploma IIIbidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri
Keterampilan	Pelaksana	III/a	100	Rp. 265.000	58th	Komunikasi dan Informatika; 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/ç
Receianipilan	Lanjutan	III/b	150	тф. 203.000		3. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pranata Humas Ketrampilan; dan
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 300.000	58th	setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1tahunterakhir
		III/d	300			
	Pertama	III/a	100	- Rp. 270.000	58th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang komunikasi serta kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; 3. mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli; dan 4. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1tahunterakhir
		III/b	150			
	Muda	Ш/с	200	Rp. 400.000	58th	
Keahlian	11000	III/d	300			
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatanpertama;
	Madya	IV/b	550	Rp. 650.000	60th	tersedia formasi untuk jabatan Pranata Humas; memiliki pengalaman di bidang pelayanan
		IV/c	700			informasi dan kehumasan paling sedikit 2 th; 4. usia paling tinggi 50 tahun

Pranata Informasi Diplomatik

: Nomor 14 Tahun 2018, Tanggal 1 Maret 2018 **PER MENPAN-RB**

PERATURAN BKN : Nomor 22 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi

diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung

kegiatan diplomatik dan konsuler.

TUGAS JABATAN : Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi diplomatik, pengolahan data digital

diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kemenlu dan

Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

PERPRES TUNJANGAN

: PP Nomor 11 Tahun 2017

PERATURAN BUP 6. 7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Luar Negeri

8. **RUMPUN JABATAN** : Politik dan Hubungan Luar Negeri LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Luar Negeri

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi PIDAhli Madya dilingkungan Kemenlu dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Pusat;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional untuk Angka Kredit bagi PID Ahli Pertama dan PIDAhli Muda di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. UJI KOMPETENSI

Pranata Informasi Diplomatik yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. Pranata Informasi Diplomatik, diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) mengundurkan diri dari Jabatan;
 - 2) diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - 3) menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - 4) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - 5) ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - 6) tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- b. Selain pemberhentian pada huruf a, Pranata Informasi Diplomatik diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - 1) menduduki Jabatan Negara; dan
 - 2) menduduki Jabatan pada Organisasi Internasional.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pranata Informasi Diplomatik yang diberhentikan karena ketentuan pada huruf a angka 2) s.d angka 5) dan huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku

	dapat diangkat kemban dalam jabatannya sesata ketentaan yang benaku										
	Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
		ALP Bartonia	III/a	100		F0.11	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas vg baik:				
		Ahli Pertama	III/b	150		58 th	 memiliki integritas dan moralitas yg baik; sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) pada bidang komputer, 				
			Ш/с	200		_	informatika, elektro, matematika, statistik, telekomunikasi, dan persandian; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial				
	Keahlian	Ahli Muda	III/d	300		58th	Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan Instansi Pembina; 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.				
		Ahli Madya	IV/a	400		60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 4dan 6; 2. berijazah paling rendah S-1 atau D-4 pada				
							bidang komputer, informatika, elektro, matematika, statistik, telekomunikasi, dan persandian atau bidang lain yg ditentukan Instansi Pembina; 3. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun terakhir				
							4. Memiliki pengalaman pengelolaan informasi diplomatik dan pengolahan data digital diplomatik paling kurang 2 th;				
			IV/c	700			Berusia paling tinggi: a. 53th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55th utk menduduki jenjang Ahli Madya				

Pranata Keuangan APBN

PERMENPAN-RB
 Nomor 54 Tahun 2018, Tanggal 21 September 2018
 PERATURAN BERSAMA
 Nomor 18 Tahun 2019, Tanggal 20 September 2019

3. PENGERTIAN : Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan

peraturan perundang-undangan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN, meliputi:

a. Perikatan dan penyelesaian tagihanb. Pelaksanan perintah pembayaran

c. Kebendaharaan

d. Pengelolaan administrasi belanja pegawai e. Penyiapan analisis laporan keuangan instansi

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP
7. INSTANSI PEMBINA
8. RUMPUN JABATAN
: Kementerian Keuangan
: Akuntan dan Anggaran

9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Pusat dan Instansi Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yg membidangi Perumusan dan Standardisasi Jabatan Profesi Bidang Perbendaharaan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Pranata Keuangan APBN Terampil sampai dengan Pranata Keuangan APBN Penyelia di Instansi Pusat dan Instansi Vertikal

11. KENAIKAN JABATAN

Pranata Keuangan APBN yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan:
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- 13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Pranata Keuangan APBN yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Terampil	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS; 2.memiliki integritas dan moralitas yg baik;
		II/d	80		58 th	3.sehat jasmani dan rohani; 4.berijazah paling rendah D3 bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi,
Ketrampilan	Mahir Penyelia	III/a	100		58 th	hukum, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan ditentukan oleh instansi pembina; 5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/b	150		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama;
		III/c	200		58 th	2.memiliki pengalaman di bidang pengelolaan APBN paling sedikit 2 (dua)
		III/d	300		58 th	tahun; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 4.berusia paling tinggi 53 tahun.

Pranata Komputer

: Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 17 Juli 2003 KEPMENPAN-RB **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 002/BPS-SKB/II/2004dan Nomor 04 Tahun 2004

PENGERTIAN : Pranata Komputer adalah PNS yang diberi tugas, tanggjwb, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. **TUGAS POKOK** : Merencanakan, menganalisi, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau

mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

PERPRES TUNJANGAN Nomor 9 Tahun 2017, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP PPNomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA Badan Pusat Statistik** 7 **RUMPUN JABATAN** : Kekomputeran LINGKUP BERLAKU : PN SPusat /Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala BPSbagi Pranata Komputer Utama dibantu Tim Penilai BPS

- b. Pejabat eselon Idilingkungan BPSbagi Pranata Komputer Madya dibantu Tim Penilai Kantor Pusat BPS
- c. Pejabat paling rendah eselon Ilbagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama -Muda dibantu Tim Penilai BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- d. Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi Pusat
- e. Kepala Pusat yang membidangi teknologi informasi bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
- f. Gubernur bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai
- g. Bupati/Walikota bagi Pranata Komputer Pelaksana s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKAT AHLI

Pranata Komputer Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IVdpt diangkat menjadi Pranata Komputer Ahli, dgn syarat:

- a. Ijasah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Pranata Komputer tingkat ahli;
- b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pranata Komputer tingkat ahli; dan
- c. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

12. PEMBEBASAN SEMENTARA (PEMBERHENTIAN menurut PP Nomor 11 Tahun 2017):

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pranata Komputer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

		_	_						
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan			
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:			
		II/b	40			Berijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi pendidikan			
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 360.000	58 th	2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur			
Terampil		II/d	80			Muda, Golru II/a			
	Pelaksana	III/a	100	Rp. 450.000	58th	Diklat fungsional Tk. Terampil Setiap unsur penilaian dalam DP-3			
	Lanjutan	III/b	150	кр. 430.000	3501	sekurang- kurangnya bernilai baik			
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 780.000	58th	dalam satu tahun terakhir			
	Penyelia	III/d	300	кр. 780.000	3801				
	Pertama			Rp. 540.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:			
		III/b	150			Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan.			
	Muda	Ш/с	200	Rp. 960.000	58th	2. Pangkat serendah-rendahnya Penata			
		III/d	300		3641	 Muda, Gol.Ruang III/a Diklat fungsional tingkat ahli Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang sistem informasi berbasis komputer paling singkat 2th; Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUPdari jabatanterakhir. 			
		IV/a	400						
Ahli	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th				
Anii		IV/c	700						
	I Mariana	IV/d	850		CE No.				
	Utama	IV/e	1050	Rp. 1.500.000	65 th				

Pranata Laboratorium Kemetrologian

1. PER MENPAN-RB : Nomor 34 Tahun 2014, Tanggal 16 Oktober 2014

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 13/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 12 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015

PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan

pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 119 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perdagangan

8. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perdagangan / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Madya, pangkat pembina Tingkat I,golongan ruang IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan dan provinsi dibantu Tim Penilai Pusat
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Metrologi Kementerian Perdagangan bagi pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama, s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan dibantu Tim Penilai Unit Kerja
- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi perdagangan bagi Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

11. UJI KOMPETENSI:

Pranata Laboratorium Kemetrologian yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pranata Laboratorium Kemetrologian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berrjazah paling rendah Sarjana (SI)/
Ahli		Ш/b	150	Rp. 540.000		DIV jurusan teknik atau MIPA; 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
	Muda	Ш/с	200	Rp. 960.000	58 th	mengikuti dan lulus diklat fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian;
		III/d 30	300			telah mengikuti uji kornpetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi; nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
	Madya	IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan
Ĺ		IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	pertama; 2. Memiliki pengalaman pengelolaan standar ukuran dan laboratorium
		IV/c	700			Metrologi Legal paling kurang 2 th; 3. Berusia paling tinggi 52 th.

Pranata Laboratorium Kesehatan

1. PER MENPAN-RB : Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 Tanggal 28 Maret 2006

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006

3. PENGERTIAN : Pranata Labkes adalah PNS yang diberi tugas, tanggjwb, wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yg berwenang utk melakukan kegiatan pelayanan labkes pd labkes.

1. TUGAS POKOK : Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi,

kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia Lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi, molekuler),

biologi dan fisika.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Pranata Labkes Madya dibantu Tim Penilai Departemen

b. Pimpinan unit kerja bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Unit Kerja

 Kepala Dinas Provinsi bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Provinsi.

 d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

e. Pimpinan unit kerja selain Depkes bagi Pranata Labkes Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Pranata Labkes Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKATAHLI

Pranata Labkes Terampil yg memperoleh ijazah S1/DJV dpt diangkat menjadi Pranata Labkes Ahli, dgn syarat:

- a. Ijasah/STTB harus sesuai tugas pokok dan kualifikasi yg ditentukan oleh instansi pembina;
- b. Paling singkat telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir; dan
- d. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pranata Labkes yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah serendah-rendahnya SMAK sesuai
		II/b	40			dgn kualifikasi pendidikan;
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
Terampil		II/d	80	1		Muda, golongan ruang II/a;
	Pelaksana	III/a	100	D= 26E 000	58 th	3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
	Lanjutan	III/b	150	Rp. 265.000		kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 500.000	58 th	
		III/d	300			
		III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendahS.1/ D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Pertama	III/b	150			
	Muda	Ш/с	200	Rp. 600.000	58 th	
Ahli	Fidda	III/d	300	Τφ. σσσ.σσσ	Sour	
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Madya	IV/b	550	Rp. 850.000	60 th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman dalam pelayanan laboratorium kesehatan paling singkat 2 thn; Berusia paling tinggi 50 tahun.
		IV/c	700			

Pranata Laboratorium Pendidikan

PERMENPAN-RB : Nomor 07 Tahun, Tanggal 06 Mei 2019

PERATURAN BERSAMA : Nomor

: Pranata Laboratorium Pendidikan adalah pegawai PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang pengelolaan 3. PENGERTIAN

Laboratorium pendidikan

TUGAS POKOK : melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian

peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian

sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium.

: Nomor 21 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **PERPRESTUNJANGAN**

: PPNomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP

: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7. **INSTANSI PEMBINA**

: Pendidikan lainnva **RUMPUN JABATAN** : PNS Pusat / Daerah LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi sumber daya iptek dan dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber daya iptek dan dikti pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi, dan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan karier sumber daya iptek dan dikti di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiPaling rendah Pejabat Pengawas yang membidangi jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan karier sumber daya iptek dan dikti di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk angka kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratoriun Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- d. Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Perguruan TinggiKepala Laboratorium Perguruan Tinggi/Pimpinan Fakultas/Jurusan pada Perguruan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Perguruan Tinggi;
- e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk Angka Kredit bagi Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil dan Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir, dan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah di luar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

JF Ahli Madya.

- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI

Pranata Laboratorium Pendidikan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai

dengan l	ketentuan yang b	erlaku.	•			,
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Terampil	П/с	60	Rp. 360.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Keterampilan: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
	rerampii	II/d	80	T. T. SOO:000	3601	3. sehat jasmani dan nohani; 4. memiliki jazah paling rendah D-III dengan bidang pendidikan yang relevan
Keterampilan	Mahir	III/a	100	Rp. 450.000	58th	dengan jenis laboratorium yg dikelola; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan
	Manir	III/b	150	140.000	Joui	kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun
	Penyelia	III/c	200	Rp. 780.000	58th	oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu)
		III/d	300	141700000	551	tahun terakhir. Syarat pengangkatan pertama tingkat Keahlian:
	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58th	berstatus PNS; berstatus PNS; memiliki integritas dan moralitas yang baik;
		III/b	150			sehat jasmani dan rohani; memiliki ijazah paling rendah D-III dengan bidang pendidikan
Maakiia.	Ahli	Ш/с	200		58th	yang relevan dengan jenis laboratorium yg dikelola; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatanpertama;
Keahlian	Muda	Ⅲ/d	300	Rp. 960.000		
		IV/a	400			
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan lab paling singkat 2th; Berusia paling tinggi: F3 th basi yang akan menduduki 15 Keterampilan dan 15.
	Mauya	IV/c	700	, i.h. 1.200.000		a. 53 th bagi yang akan menduduki JF Keterampilan dan JF Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki

Pranata Nuklir

: Nomor 2 Tahun 2014, Tanggal 6 Januari 2014 jo PermenpanRB Nomor 28 Tahun 2016, Tgl 20 Des 2016 : Nomor 12 Tahun 2014 dan Nomor 33 Tahun 2014 **PERMENPAN-RB**

PERATURAN BERSAMA

: Jabatan Fungsional Pranata Nuklir adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepranatanukliran. **PENGERTIAN** 3.

: Melaksanakan kegiatan Kepranatanukliran yang meliputi Pemanfaatan iptek nuklir dan mengelolaan **TUGAS POKOK**

Perangkat Nuklir

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 95 Tahun 2015, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017 6. 7. **INSTANSI PEMBINA** : Badan Tenaga Nuklir Nasional : Fisika, kimia dan yang berkaitan 8. **RUMPUN JABATAN**

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAPPAK:

a. Kepala BATAN bagi Pranata Nuklir Madya, pangkat Pembina, golru ruang IV/as.d Pranata Nuklir Utama, pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan BATAN dan Instansi di luar BATAN dibantu Tim Penilai Pusat

b. Sekretaris Utama BATAN, bagi Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, dan Pranata Nuklir Pertama, s.d Pranata Nuklir Muda, di lingkungan BATAN dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat eselon Ilyang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Pusat, bagi Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, dan Pranata Nuklir Pertama, s.d Pranata Nuklir Muda, di lingkungan instansi pusat selain BATAN dibantu Tim Penilai Instansi

d. Pejabat eselon Ilyang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Provinsi bagi Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,golru III/d,dan Pranata Nuklir Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Pranata Nuklir Muda, di lingkungan Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Pejabat eselon Iyang membidangi Kepranatanukliran atau Direktur/Kepala Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Pranata Nuklir Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Pranata Nuklir Penyelia, dan Pranata Nuklir Pertama, s.d Pranata Nuklir Muda, di lingkungan Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPILKE TINGKAT AHLI

- a. Pranata Nuklir Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Pranata Nuklir Ahli dgn svarat:
 - 1) tersedia formasi untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Pranata Nuklir Tingkat Ahli;
 - 3) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Kepranatanukliran Tingkat Ahli; dan
 - 4) memenuhi jumlah Angka kredit kumulatif yang ditentukan;
- b. Pranata Nuklir Terampil yang akan beralih menjadi Pranata Nuklir Ahli diberikan AK dari ijazah S1/DIV ditambah AK kumulatif sebesar 65% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan AK dari unsur penunjang

Pranata Nuklir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI

Pranata Nuklir yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan

ketentua	an yang berlak	u.					
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 350,000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:	
	Pelaksana	II/d	80	кр. 330.000	36 U I	berijazah paling rendah Diploma IIIfisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;	
Terampil	Pelaksana	III/a	100	Rp. 425.000	58th	2. menduduki pangkat paling rendah Pengatur,	
тегаттри	Lanjutan	III/b	150	кр. 425.000	36 U I	golongan ruang II/ç dan 3. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam	
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 500,000	58th	1 (satu) tahun terakhir	
	Periyella	III/d	300	кр. 500.000	36 U I		
	Pertama	III/a	100	Rp. 500.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:	
	1 Cauma	III/b	150	тф. 300.000	3041	berijazah paling rendah Sarjana (SI)/ Diploma IV fisika/kimia atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan nilai prestasi kerja paling kurang bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi persyaratan pengangkatan pertama; memiliki pengalaman di bidang kepranata-nukliran paling singkat selama 2 tahun; berusia paling tinggi: a. 55 th utk menduduki Pranut keterampilan; b. 56 th utk menduduki Pranut Ahli Madya;	
	Muda	Ш/с	200	Rp. 800.000	58th		
		III/d	300				
		IV/a	400	Rp. 1.200.000	60 th		
Ahli	Madya	IV/b	550				
		IV/c	700				
	Uta ma .	IV/d	850	Pp. 1.400.000	65th	d. 60th utk menduduki Pranut Ahli Utama dan bagi JPT yg akan menduduki Pranut Ahli Utama 4. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang kepranatanukliran;	
		IV/e	1050	Rp. 1.400.000	65 W	 nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan tersedia formasi Pranata Nuklir 	

Pranata Siaran

: Nomor 30 Tahun 2018, Tanggal 6 Nopember 2017 **PERMENPAN - RB**

2. PERATURAN BKN : Nomor 27 Tahun 2019, Tanggal ...

: Jabatan Fungsional Pranata Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS yang melakukan 3. **PENGERTIAN**

kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru pada LPPRRIdan LPPTVRI.

: Melakukan kegiatan produksi, penyiaran dan layanan media baru. 4. 5. **TUGAS JABATAN**

PERPRES TUNJANGAN

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kominfo 8. **RUMPUN JABATAN** : Penerangan dan Seni Budaya

LINGKUP BERLAKU : PNSKementerian Kominfo (RRI, TVRI)

PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Kominfo atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan RRIdan TVRIdibantu Tim Penilai Pusat;

b. Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRIdan TVRI untuk angka kredit bagi Pranata Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan RRIdan TVRI dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. PENGANGKATAN DARI JF ASISTEN PRANATA SIARAN KEDALAM JF PRANATA SIARAN

a. Asisten Pranata Siaran yang memperoleh ijasah S1/DIV dapat diangkat ke jabatan Pranata Siaran dgn syarat:

l) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;

- 2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan ya'ng ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pranata Siaran;
- mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 4) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang produksi, penyiaran dan layanan media baru untuk Jabatan
- Fungsional Pranata Siaran;

memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

6) memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

a. Asisten Pranata Siaran yang akan diangkat menjadi Pranata Siaran diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV, ditambah sebesar 69% angka kredit kumulatif dari diklat di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dan unsur penunjang

11. UJI KOMPETENSI

Pranata Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pranata Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
	Ailireitaina	ш/ь	150			 sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina; mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina; dan nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6; Memiliki pengalaman di bidang produksi, penyiaran dan layanan media barpaling singkat 2 tahun. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 thterakhir Berusia paling tinggi: 53 th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda 55 th utk menduduki jenjang Ahli Madya
		Ш/с	200			
Keahlian	Ahli Muda	III/d	300		58 th	
		IV/a	400			
	Ahli Madya	IV/b	550		60 th	
		IV/c	700			

Psikolog Klinis

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/11/M.PAN/5/2008, Tanggal 26 Mei 2008

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1112/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 28 Tahun 2008

3. PENGERTIAN : Psikolog Klinis adalah iabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung

jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis di

sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang

diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

4. TUGAS POKOK : Memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi assesmen, interpretasi hasil

assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikologi klinik pada masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan di bid psikologi klinik pada

komunitas, dan menjadi saksi ahli.

4. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 42 Tahun 2009, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

5. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20176. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

7. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

8. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

9. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Dirjen yang membidangi pelayanan psikologi bagi Psikolog Klinis Madya dibantu Tim Penilai Departemen

b. Pimpinan unit kerja pelayanan psikologi bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pimpinan unit kerja diluar Depkes bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Instansi

d. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Provinsi

e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Psikolog Klinis Pertama s.d Madya dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

10. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

11. PENGANGKATAN KEMBALI:

Psikolog Klinis yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pertama	III/b	150	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya S.1
Ahli	Muda	Ш/с	200	D C00.000	58 th	Psikologi Klinis; 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda TkI,Golru III/b; 3. Telah lulus dan memiliki sertifikat Profesi Psikolog Klinis; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Muua	III/d	300	Rp. 600.000	38 U	
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan
		IV/b	550			pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan psikolog klinis paling
		IV/c	700			singkat 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 50th

Pustakawan

PERMENPAN-RB

Nomor 9 Tahun 2014, Tanggal 13 Januari 2014 Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 PERATURAN BERSAMA

Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. **PENGERTIAN**

 Melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.
 Nomor 71 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 **TUGAS POKOK**

Pelayanan PERPRESTUNJANGAN

PERATURAN BUP PP Nomor 11 Tahun 2017 : Perpustakaan Nasional **INSTANSI PEMBINA**

: Arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan : PNS Pusat / Daerah **RUMPUN JABATAN**

LINGKUP BERLAKU

PEJABAT PENETAP PAK:

a. Kepala Perpusnas RI,bagi Pustakawan Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bs.d Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama, golru IV/e di lingkungan Perpusnas RIdan Instansi di luar Perpusnas RIdibantu Tim Penilai Pusat

Sekretaris Utama Perpusnas Ribagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I,golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Perpusnas Ridibantu Tim Penilai Unit Kerja

c. Pejabat eselon Iatau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon Ilyang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpusnas Ribagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkngan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi d. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk yg membidangi Kepustakawanan bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/b s.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon Ilyang membidangi Kepustakawanan yang ditunjuk bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I,golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

Rektor, Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik bagi Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golru II/bs.d Penyelia, dan Pustakawan Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Perguruan Tinggi dibantu Tim Penilai Perguruan Tinggi

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKAT AHLI

berijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan; atau

- berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia serta telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli;
- 3) memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan

4) tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli;

b. Pustakawan Keterampilan yang akan beralih menjadi Pustakawan Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI:

Pustakawan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, kecuali bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Pustakawan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
ı	Pelaksana	II/c	60	Rp. 350.000	58 th	1. berijazah paling rendah Diploma II(D.II) Ilmu
Keterampilan		II/d	80	1		Perpustakaan; atau 2. berijazah paling rendah Diploma (DII) bidang lain
	Pelaksana	III/a	100	Rp. 420.000	58th	sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh
	Lanjutan	III/b	150	кр. 420.000		Kepala Perpusnas RI; 3. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I,
		III/c	200		58th	golru II/b; dan
	Penyelia	III/d	300	Rp. 700.000		4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilaibaik dalam 1 (satu) tahunterakhir
	Pertama	III/a	100	Rp. 520.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1) Ilmu
		III/b	150		36 U I	berijazah paling rendah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan; atau
	Muda	Ш/с	200	Rp. 800.000	58 th	2. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpusnas RI; 3. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;dan 4. nilai prestasi kerja paling rendah bernilaibaik
		III/d	300			
		IV/a	400		60 th	
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.100.000		
Keahlian		IV/c	700	1		dalam 1 (satu) tahunterakhir
		 				Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
		IV/d	850	Rp. 1.300.000		1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan paling singkat 1 tahun; 3. berusia paling tinggi 53 tahun; 4. tersedia formasi untuk JF. Pustakawan; dan 5. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahunterakhir
	Utama	IV/e	1050		65 th	

Radiografer

PERMENPAN-RB : Nomor 29 Tahun 2013 tanggal 14 Agustus 2013

PERATURAN BERSAMA : Nomor 47 Tahun 2014dan Nomor 21 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014

 Jabatan fungsional Radiografer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada sarana kesehatan yang diduduki PNS
 Melakukan kegiatan pelayanan radiologi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. 3. **PENGERTIAN**

TUGAS POKOK

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 115 Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP PP Nomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan

RUMPUN JABATAN : Kesehatan

LINGKUP BERLAKU PN SPusat / Daerah 10. PEJABAT PENETAP PAK

Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina Tingkat I golru IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat.

Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembiná, golru IV/a di lingkungan Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja.

Direktur Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/cs.d Penyelia dan Radiografer Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Kem. Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat.

d. Pejabat eselon Ilyang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Radiografer Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi.

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi.

Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Radiografer Pertama, dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Provinsi dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi.

g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi Radiografer Madya, pangkat Pembina, golru IV/adi lingkungan Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/cs.d Penyelia, dan Radiografer Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Puskesmas perawatan plus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota.

h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota, bagi Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Radiografer Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kab/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKATAHLI

a. Radiografer Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D.IVdpt diangkat menjadi Radiografer Ahli dgn syarat:

1) Memiliki ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/ Teknik Radioterapi;

Tersedia formasi untuk RadiograferAhli; dan

Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

Radiografer Terampil yang akan beralih menjadi Radiografer Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV ditambah angka kredit kumulatif sebesar & dari diklat, tugas pokok dan bangprof dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

Radiografer yang akan naik jabatan setingkat lebit tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

d. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

tidak memenuhi persyaratan jabatan.

PENGANGKATAN KEMBALI:

Radiografer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan

yang be	yang berlaku.											
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan						
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 360.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:						
	r ciaksai ia	II/d	80	142.500.000		1. Berijazah paling rendah Diploma III(D.III)Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik Rontgen/						
Terampil	Pelaksana	III/a	100	Rp. 450.000	58th	Teknik Radiologi/Teknik Radiodiagnostik/Teknik Radioterapi;						
Terampil	Lanjutan	III/b	150	140.30.000	35 01	Pangkat paling rendah Pengatur, golru II/ç Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)Radiografer yang						
	Domicalia	III/c	200	Rp. 780.000	58th	masih berlaku;						
	Penyelia ·	III/d	300			Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahunterakhir						
Pertama	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:						
	III/b	150	тф. 5-ю.000	3501	Berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi/Teknik							
		III/a	200		58th	 Radiólogi/ Teknik Radiódiagnostik/Teknik Radióterapi; Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)Radiografer yang masih berlaku; Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 						
Ahli Muda	Muda	Ш/ь	300	Rp. 960.000								
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:						
Madya	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60 th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang pelayanan radiologi paling kurang 1 th terakhir sebelum pengangkatan; Usia paling tinggi 50 tahun; Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Radiografer 						
		IV/c	700									

Refraksionis Optisien

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 Tanggal 21 April 2005

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 1368/MENKES/PB/IX/2005dan Nomor 19 Tahun 2005, Tanggal 19 September 2005

3. PENGERTIAN : Refraksionis Optisien adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi,

pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan

pencatatan pelayanan.

PERPRES TUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen

b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

d. Pimpinan Sarana Kesehatan Masyarakat instansi pusat diluar Depkes bagi Refraksionis Optisien Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Refraksionis Optisien yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan		
	Pelaksana	П/с	60	- Rp. 240.000	58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya		
	Pelaksaria	II/d	80	Τφ. 2-10.000		DIIIrefraksi optisi. 2. Pangkat serendah-rendahnya		
	Pelaksana	III/a	100	Rp. 265.000	58th	Pengatur, Gol. Ruang II/c. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP- 3 sekurang- kurangnya bernilai		
Lanjutan	Lanjutan	Ш/b	150	141255555		baik satu tahun terakhir		
Terampil	·	Ш/с	200	Rp. 500.000	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan refraksi optisi paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5th sebelum mencapai BUPjabatan terakhir.		
	Penyelia	Ш/d	300					

Rescuer

1. PERMENPAN-RB : Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 13 Januari 2014

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor PB.01 Tahun 2014 dan Nomor 37 Tahun 2014, Tanggal 12 September 2014

3. PENGERTIAN : Jabatan Fungsional Rescuer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan

I. TUGAS POKOK : Melakukan pencarian dan pertolongan yang meliputi persiapan, kesiapsiagaan

SAR, penyelenggaraan operasi SAR, serta evaluasi dan laporan

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2016, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan SAR Nasional (BASARNAS) 8. RUMPUN JABATAN : Pengawas Kualitas dan Keamanan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Badan SAR Nasional

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekretaris Utama bagi Rescuer Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golru III/as.d Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,golru III/d,yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah dibantu Tim Penilai Pusat

b. Direktur yang membidangi Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR bagi Rescuer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golru II/adan Rescuer Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I,golongan ruang II/d yang bertugas di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan Kantor Badan SAR Nasional di daerah dibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. UJI KOMPETENSI:

Rescuer yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Rescuer yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	_	_	_		_	
Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 460.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berijazah paling rendah SMU,
		II/b	40	Rp. 600.000	58 th	SMK atau yang sederajat;
	Pelaksana	II/c	60			2. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda,
Keterampilan		II/d	80			golongan ruang II/a;dan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Rescuer; 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana Lanjutan	Ш/а	100	Rp. 871.000	58 th	
		Ш/ь	150			
	Penyelia -	III/ c	200	Rp. 1.035.000	58 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang pencarian dan pertolongan paling kurang 2 tahun; 3. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; 4. usia paling tinggi 35 tahun.
		III/d	300			

Sandiman

: Nomor 18 Tahun 2019, Tanggal 02 September 2019 **PERMENPAN-RB**

PERATURAN BKN

PENGERTTAN : Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung

jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan

TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.

PERPRES TUNJANGAN

: Nomor 105 Tahun 2006, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 : PP Nomor 11 Tahun 2017 : Lembaga Sandi Negara : Kekomputeran **PERATURAN BUP INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN**

: PNS Pusat / Daerah **LINGKUP BERLAKU**

10. PEJABAT PENILAI PAK:

a. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk Sandiman Ahli Madya/Madya dan Sandiman Ahli Utama

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawajan pada Instansi Pemerintah untuk Sandiman Kategori Keterampilan, Sandiman Ahli

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI:

Sandiman Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Sandiman Ahli dgn syarat:

Tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian;

Iazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian;

Mengikuti dan lulusan uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina pada jenjang Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki,

Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki; dan

berusia paling tinggi

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan, Jabatan **FungsionI**

Sandiman Ahli Pertama/ Pertama dan Sandiman Ahli Muda/Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Madya/Madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Utama bagi PNS yang menduduki Jabatan

Pimpinan Tinggi.

12. UJI KOMPETENSI DAN DIKLAT:

Sandiman yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

mengundurkan diri dari Jabatan;

diberhentikan sementara sebagai PNS; menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Sandiman yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan

ketentua	n yang berlaku		. с. а рс			
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana	II/c	20	D 407.005	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SMU/SMKdi bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Informatika dan
Terampil Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/d	20	Rp. 197.000	Sour	kualifikasi pendidikan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I,	
		III/a	50	Rp. 264,000	58th	golongan ruang II/b; 3. Telah mengikuti dan lulus diklat pembentukan
		Ш/b	50	кр. 204.000		Sandiman kecuali bagi lulusan DIII bidang persandian;
	Penvelia	III/c	100	Rp. 495.000	58th	 Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional Sandiman; Setiap unsurpenilaian dlm DP-3 paling kurang
	,	III/d	100			bernilai baik dlm 1 tahunterakhir
		Ш/а	50	Rp. 264,000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: Berijazah paling rendah Diploma IV(D.IV)di bidang persandian; atau Berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/ Diploma IV (D.IV)di bid.Matematika, Elektronika, Komputer, Telekomunikasi, Bahasa Asing, Hukum, Administrasi Negara, dan Manajemen serta telah
	Pertama	Ш/b	50			
	Muda	III/c	100	Rp. 660.000	58th	
		III/d	100	·		mengikuti dan lulusdiklat pembentukan Sandiman; 3. Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;
Ahli		IV/a	150			4. Telah mengikuti dan lulus diklat Fungsional Sandiman:
	Madya	IV/b	150	Rp. 957.000	60th	5. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 paling kurang bernilai baik dlm 1 tahun terakhir
		IV/c	150			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:
	Utama	IV/d	200	<u></u>	60th	 Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang persandian paling
Utama	IV/e	200	Rp	60th	singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 tahun.	

Sanitarian

1. KEPMENPAN : Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001, tanggal 8 Mei 2001

S. PENGERTIAN : Sanitarian adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan

pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk

memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lin

: Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk

dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekdirjen Bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Pusat

 Kakanwil Depkes Provinsi /Kadis kesehatan Provinsi bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Propinsi

c. Ka. Kantor Depkes Kabupaten/Kota bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

d. Pimpinan instansi bagi PSanitarian. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu TimPenilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKATAHLI

Sanitarian Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Sanitarian Ahli, dgn syarat:

a. Pendidikan/ljasah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokoknya;

b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan

d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Sanitarian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
Pelaksana Terampil Pelaksana Lanjutan Penyelia		II/b	40			Berijazah paling rendah SLTA/DI bid. kesehatan lingkungan;
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58th	Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
		II/d	80			Muda,Golongan Ruang II/a;
		III/a	100	Rp. 265.000	58th	3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan;
	Lanjutan	III/b	150	кр. 205.000	3501	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500,000	58th	sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	CityCila	III/d	300	тф: 500:000	3541	
	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. Berijazah paling rendahS.1/D.IV bidang
		III/b	150	14.555.555	3501	keséhatan lingkungan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 satu tahun terakhir. Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyehatan lingkungan paling singkat 2th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.
	Muda	Ш/с	200	Rp. 600.000	58th	
Ahli		III/d	300			
		IV/a	400	Rp. 850.000		
	Madya	IV/b	550		60 th	
		IV/c	700			

Statistisi

PERMENPAN-RB

: Nomor 19 Tahun 2013, Tanggal 29 April 2013 : Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014, Tanggal 21 Januari 2014 PERATURAN BERSAMA

3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Statistisi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,

dan wewenang untuk melakukan kegiatan statistik. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan statistik.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 110 Tahun 2016, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

5. 6. 7. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 INSTANSI PEMBINA : Badan Pusat Statistik

RUMPUN JABATAN 8. : Matematika, statistika dan yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah PEJABAT PENETAP PAK

a. Kepala BPSbagi statistisi Madya pangkat pembina utama Muda, golru IV/cs.d Utama di lingkungan BPSdan instansi selain BPSdibantu Tim Penilai Pusat

b. Pejabat eselon Iyang membidangi kegiatan statistik yang ditunjuk oleh Kepala BPSatau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon Ilbagi statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bdi lingkungan BPSPusat dibantu Tim Penilai BPS

c. Kepala BPSProvinsi bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/b di lingkungan BPSProvinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai BPSProvinsi

d. Pejabat eselon Iyang membidangi kegiatan statistik atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II di instansi pusat selain BPS bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c s.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/b di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi

e. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon Ilyang ditunjuk bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya pangkat Pembina TKI, golru IV/b di ling Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi

f. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat eselon Ilyang ditunjuk bagi Statistisi Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan statistisi Pertama s.d Madya pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bdi lingkungan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KETINGKATAHLI

- a. Statistisi Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Statistisi Ahli dgn syarat:
 - 1) Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Statistisi Ahli;
 - 2) Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Statistisi Ahli bagi yg berijazah S1/DJV selain bidang statistik; dan

3) Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

b. Statistisi Terampil yang akan beralih menjadi Statistisi Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. KENAIKAN JABATAN:

Statistisi yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- PENGANGKATAN KEMBALI:

Statistisi yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

		_	_							
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golr	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 360.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:				
I CidiSulla	II/d	80	кр. 300.000	, 36ui	1. berijazah paling rendah Diploma III(DIII)jurusan statistik atau Diploma III(DIII)bidang lain sesuai					
Terampil Pelaksana Lanjutan	Pelaksana	Ш/а	100	Rp. 450.000	58th	dengan kualifikasi yg ditetapkan oleh Kepala BPS;				
	Ш/ь	150	кр. 450.000	Jou i	2. pangkat paling rendah pengatur, golru II/ç 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1					
	Penyelia	Ш/с	200	Rp. 780.000	58th	(satu) tahun terakhir.				
Periyena	Periyella	III/d	300	кр. 780.000	36ui					
Pertama	Pertama	III/a	100	Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: 1. berijazah paling rendah Sarjana (SI)/Diploma IV(DIV)				
	Pertama	III/b	150	тф. 5-ю.000	3501	jurusan Statistik atau Sarjana (S1)/ Diploma IV(DIV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan				
	Muda	Ш/с	200	Rp. 960.000	58th	oleh Kepala BPS; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a;				
Ahli		Ⅲ/d	300	•		3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam				
7		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:				
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60th	Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang statistik paling singkat				
		IV/c	700			2 tahun;				
	Litama	IV/d	850	Pn 1/E0 000	65th	Berusia paling tinggi 50 tahun; Telah ikut dan lulus diklat fungsional statistik kecuali				
Utama	IV/e	1050	Rp. 1.450.000	Wil	bagi yang berijazah DIIIatau S1/D.IV jurusanstatistik					

Surveyor Pemetaan

1. KEPMENPAN-RB : Nomor 134/KEP/M.PAN/12/2002, Tanggal 3 Desember 2002

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor OT.02/60-KA/VII/2003 dan Nomor 26 Tahun 2003, Tanggal 14 Juli 2003

3. PENGERTIAN : Surveyor Pemetaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan;

4. TUGAS POKOK : Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan.

: Nomor 37 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Informasi Geospasial (BIG) 8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insinyurdan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

). PEJABAT PENETAP PAK

PERPRESTUNJANGAN

5.

a. Ka. BAKOSURTANAL bagi Surveyor Pemetaan Madya dibantu Tim Penilai Pusat

- b. Sekretaris Utama BAKŌSURTANAL bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sd Muda dibantu Tim Penilai BAKOSURTANAL
- c. Kepala Dinas Provinsi bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Provinsi
- d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
- e. Pimpinan Instansi bagi Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dan Surveyor Pemetaan Pertama sampai Muda dibantu Tim Penilai Instansi

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKATAHLI

Surveyor Pemetaan Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Surveyor Pemetaan Ahli, dgn syarat:

- a. Pendidikan/ljasah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan kualifikasi lain yg ditentukan instansi pembina;
- b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
- d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

IV/c

700

- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Surveyor Pemetaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil: 1. Berijazah paling rendah SLTAsesuai dengan
		II/b	40	Rp. 240.000	58th	kualifikasi pendidikan;
Terampil 	Pelaksana	II/c	60			2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda,
		II/d	80			Golongan Ruang II/a; 3. Diklat fungsional Tk. Terampil;
	Pelaksana	III/a	100	D 26E 000	58th	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
	Lanjutan	Ш/b	150	Rp. 265.000	58 U1	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	D	Ш/с	200	Rp. 300.000	58th	teraknir.
	Penyelia -	III/d	300		58 th	
	Pertama	III/a	100	- Rp. 270.000	58 th	 Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli: Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan; Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; Diklat fungsional tk ahli; Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Pertama	III/b	150			
	Muda	Ш/с	200	. Rp. 525.000	58th	
Ahli	Pidda	III/d	300	тф. 323.000	354 1	
		IV/a	400	Rp. 920.000		Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan survey dan pemetaan paling singkat 2 th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum
	Madya	IV/b	550		60 th	

mencapai BUPdari iabatan terakhir.

Teknik Jalan dan Jembatan

KEPMENKOWASBANGPAN

: Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999, Tanggal 01 Oktober 1999 : Nomor 02/SKB/M/2000 dan Nomor 157.B Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000 KEPUTUSAN BERSAMA

PENGERTIAN : Teknik Jalan dan Jembatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan dan jembatan serta pengembangan profesi.

TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan

penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan Nomor 36 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 PERPRESTUNJANGAN

PPNomor 11 Tahun 2017 PERATURAN BUP

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat **INSTANSI PEMBINA**

Arsitek, Insinyurdan yang berkaitan **RUMPUN JABATAN**

: PN SPusat / Daerah LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Sekjen Dep. PUbagi Teknik Jalan dan Jembatan Madya sampai Utama dibantu Tim Penilai Pusat

b. Dirjen Bina Marga bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

c. Kakánwil DPU Provinsi bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana s.d Penvelia dibantu Tim Penilai Wilavah

d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

e. Ka. Dinas PU/Dinas PUBina Marga TkIIbagi Teknik Jalan dan Jembatan Pertama s.d Muda dan Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKATAHLI

Teknik Jalan dan Jembatan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Jalan dan Jembatan Ahli, dgn syarat:

- a. Pendidikan/Ijazah/STTByg diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Jalan dan Jembatan Ahli;
- b. sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknik Jalan dan Jembatan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

				_		
tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 240.000	58 th	Berijazah paling rendah DII sesuai dgn kualifikasi pendidikan;
		II/d	80			2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur
	Pelaksana	Ш/а	100	Pn 265 000	58th	Muda TKI,Golongan Ruang II/b; 3. Diklat fungsional tingkat terampil;
	Lanjutan	III/b	150	Rp. 265.000	36 U	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-
	Domiolio	III/c	200	- Rp. 300.000	58th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
	Periyelia	III/d	300		3501	
Pertama	Doutomo	III/a	100	Rp. 275.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
	Pertania	III/b	150			 Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a Diklat fungsional Tk. Ahli Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: Memenuhi syarat pengangkatan pertama; Memiliki pengalaman di bidang teknik jalan dan jembatan paling kurang 2 tahun Berusia paling tinggi 5 th sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir
	Muda	Ш/с	200	Rp. 525.000	58th	
	Muda	III/d	300			
		IV/a	400			
Ahli	Madya	IV/b	550	Rp. 790.000	60 th	
		IV/c	700]		
	Utama	IV/d	850	Rp. 1.050.000	65 th	
	осата -	IV/e	1050	Түл 1.000.000		

Teknik Pengairan

KEPMENKOWASBANGPAN

: Nomor 63/KEP/MK.WASPAN/10/1999, Tanggal 1 Oktober 1999 : Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157-A Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000 KEPUTUSAN BERSAMA

: Teknik Pengairan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional PENGERTIAN

penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai serta pengembangan profesi.

TUGAS POKOK : Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air, irigasi, sungai serta rawa dan pantai.

PERPRESTUNJANGAN : Nomor 36 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007 PERATURAN BUP

: PPNomor 11 Tahun 2017 **INSTANSI PEMBINA** 7. : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insinyurdan yang berkaitan

LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. ΡΕΊΔΒΔΤ ΡΕΝΕΤΔΡ ΡΔΚ

a. Sekdirjen bagi Teknik Pengairan Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat

- b. Dirjen Pengairan bagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
- c. Kakanwil Provinsi bagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Wilayah
- d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Instansi
- e. Kepala Dinas PUbagi Teknik Pengairan Pelaksana s.d Penyelia dan Teknik Pengairan Pertama dan Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKATAHLI

Teknik Pengairan Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Pengairan Ahli, dgn syarat:

- a. Pendidikan/Ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan untuk Teknik Pengairan Ahli;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dlm 1 (satu) tahun terakhir;
- d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal vg ditentukan utk pangkat vg baru berdasarkan pendidikan vg diperoleh

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknik Pengairan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut

Ketentu	ian yang beriak	a.				
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40			Svarat nengangkatan nertama tingkat Terampil
Terampil Pelaksana Lanjutan Penyelia	П/с	60	Rp. 240.000	58 th	Berijazah paling rendah DII sesuai dengan Ingelistrasi mandiditan	
	II/d	80			kualifikasi pendidikan 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI,	
	III/a	100	D 26F 000	FO.H.	Golongan Ruang II/b.	
	III/b	150	Rp. 265.000	58th	Diklat fungsional tingkat terampil Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-	
	III/c	200		58th	kurangnya bernilai baik dalam satu tahun	
	Penyelia	III/d	300	Rp. 300.000	Soul	terakhir
Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:	
	III/b	150			Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan.	
	Manda	Ш/с	200	D ====	58th	 Ruallikasi perididikati. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a Diklat fungsional Tk. Ahli Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun
	Muda	III/d	300	Rp. 525.000	36 U I	
		IV/a	400			
Ahli	Madya	IV/b	550	Rp. 790.000	60 th	
		IV/c	700			terakhir
Utama	LHama	IV/d	850	D 400000	65th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama 2. Memiliki pengalaman di bidang teknik pengairan paling kurang 2 tahun. 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir
	Udilla	IV/e	1050	Rp. 1.050.000	- Gui	

Teknik Penyehatan Lingkungan

1. KEPMENKOWASBANGPAN : Nomor 66/KEP/MK.WASPAN/10/1999, Tanggal 1 Oktober 1999

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 04/SKB/M/2000 dan Nomor 157.D Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000

S. PENGERTIAN : Teknik Penyehatan Lingkungan adalah PNSyang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air minum, air bersih, sampah, drainese serta pengembangan profesi.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan air

drainase

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 36 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah
10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Sekjen Dep. PUbagi Teknik Penyehatan Lingkungan Madya sampai Utama dibantu TimPenilai Pusat

 b. Dirjen Cipta Karya bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

c. Kakanwil Provinsi bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Wilayah

d. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Pelaksana s.d Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

e. Kepala Dinas PU bagi Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama s.d Muda dan Teknik Penyehatan Lingkungan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KETINGKATAHLI

Teknik Penyehatan Linqkungan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Penyehatan Linqkungan Ahli, dgn syarat:

- a. Pendidikan/Ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yg ditentukan utk pangkat yg baru berdasarkan pendidikan yg diperolehnya

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknik Penyehatan Lingkungan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	II/b	40			Syarat pengangkatan pertama tingkat	
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Terampil : 1. Berijazah paling rendah D.II.sesuai dgn
		II/d	80			kualifikasi pendidikan
Terampil Pelaksana Lanjutan	Pelaksana	III/a	100	D= 26E 000	58th	2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI,
	III/b	150	Rp. 265.000	3501	Golongan Ruang II/b. 3. Diklat fungsional tingkat terampil	
	Dames !!-	Ш/с	200	Rp. 300.000	58 th	4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3
Penyel	Penyelia	III/d	300			sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
Doubous	Doutous	III/a	100	Rp. 275.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
	Pertama	III/b	150			Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dgn kualifikasi pendidikan.
	Muda	Ш/с	200 Rp. 525,000	58th	Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a Diklat fungsional Tk. Ahli	
Ahli	11444	III/d	300	. т.р. 323.000	3001	Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam satu tahun terakhir
7		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
	Madya	IV/b	550	Rp. 790.000	60th	
		IV/c	700	1		Memiliki pengalaman di bidang teknik penyehatan lingkungan paling kurang 2 th;
	Utama	IV/d	850			Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir.
		IV/e	1050	Rp. 1.050.000	65th	

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan

1. KEPMENKOWASBANGPAN : Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999, Tanggal 1 Oktober 1999

2. KEPUTUSAN BERSAMA : Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000
3. PENGERTIAN : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungia

: Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan bangunan.

TUGAS POKOK : Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman.

5. PERPRESTUNJANGAN : Nomor 36 Tahun 2007, Perka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PPNomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

8. RUMPUN JABATAN : Arsitek, Insinyurdan yang berkaitan

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Sekjen DPU/Pejabat yang ditunjuk bagi Madya dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat

- b. Dirjen Cipta Karya bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal
- c. Sekjen/Pimpinan LPND bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
- e. Kadin PU/Dinas PUCipta Karya TkIIbagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

11. PENGANGKATAN DARITINGKAT TERAMPILKETINGKATAHLI

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil dpt dipindahkan/diangkat menjadi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli, dgn syarat:

- a. Pendidikan/Ijazah/STTB yang diperoleh sesuai dgn kualifikasi pendidikan yg ditetapkan utk Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan utk pangkat yang baru berdasarkan pendidikan yang diperolehnya.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		II/b	40		58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat
	Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000		Terampil:
Terampil Pelaksana Lanjutan Penyelia		II/d	80			Berijazah paling rendah DIIsesuai dgn kualifikasi pendidikan;
	Pelaksana	III/a	100	D= 26E 000		2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI,Golongan Ruang II/b;
	III/b	150	Rp. 265.000	58th	3. Diklat fungsional tingkat terampil;	
	III/c	200	D 200 000	=	setiap unsurpenilaian dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam	
	III/d	300	Rp. 300.000	58th	satu tahun terakhir.	
ь	Pertama	III/a	100	Rp. 275.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
	Регата	III/b	150	T p 1 =2 51565	33 4.	Berijazah paling rendah S.1/D.IV sesuai dan kualifikasi pendidikan:
	Muda	Ш/с	200	Rp. 525.000	58 th	dgn kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda,
	- Tidda	III/d	300			Golongan Ruang III/a; 3. Diklat fungsional Tk. Ahli; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
		IV/a	400			
Ahli	Madya	IV/b	550	Rp. 790.000	60 th	
Anii		IV/c	700			satu tahun terakhir.
	Utama	IV/d	850			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang teknik tata bangunan paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir
		IV/e	1050	Rp. 1.050.000	65 th	

Teknisi Elektromedis

PERMENPAN-RB

PERATURAN BERSAMA

: Nomor 28 Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013 : Nomor 46 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014 : Jabatan fungsional Teknisi Elektromedis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 3 **PENGERTIAN** jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik pada sarana

kesehatan yang diduduki oleh PNS.

: Melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, **TUGAS POKOK**

dan pelaporan dan evaluási. : PP Nomor 11 Tahun 2017

6. PERATURAN BUP : Kementerian Kesehatan **INSTANSI PEMBINA**

: Kesehatan RUMPUNJABATAN

: PN S Pusat / Daerah **LINGKUP BERLAKU**

10. **PEJABAT PENETAP PAK:**

a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bdan pangkat Pembina Utama Muda, golru IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, instansi pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat. Direktur yang membidangi bina pelayanan keteknisian medik Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat

Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Loka Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja. Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai/Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, bagi Teknisi

Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama dan Muda, di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai/Kantor Kesehatan Pelabuhan Kem. Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat. d. Pejabat eselon IIyang membidangi kesehatan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana,

pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina golru IV/a di lingkungan instansi pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi.

Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Besar/Kepala Balai Provinsi bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/c s.d Penyelia dan Teknisi Elektromedis Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Besar/Balai Provinsi dibantu Tim Penilai

UPTDaerah Provinsi.
Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Madya pangkat Pembina, golru IV/a di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota, Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia, dan Teknisi Elektromedis Pertama s.d Madya, pangkat Pembina, golru IV/a di ling.Puskesmas Kab/Kota dibantu Tim Penilai Kab/Kota Direktur Rumah Sakit/Kepala Balai Kabupaten/Kota bagi Teknisi Elektromedis Pelaksana, pangkat Pengatur, golru II/cs.d Penyelia

dan Teknisi Elektromedis Pertama dan Muda di lingkungan Rumah Sakit/Balai Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten/Kota.

11. PENGANGKATAN DARITINGKATTERAMPILKETINGKAT AHLI

- a. Teknisi Elektromedis Terampil yg memperoleh Ijasah S1/D.IVdpt diangkat menjadi Teknisi Elektromedis Ahli dgn syarat:
 - 1) Memiliki ijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknik elektromedik
 - Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan
- b. Teknisi Elektromedis Terampil yang akan beralih menjadi Teknisi Elektromedis Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 69% dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

12. UJI KOMPETENSI:

Teknisi Elektromedis yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

- 13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:
 - mengundurkan diri dari Jabatan:
 - diberhentikan sementara sebagai PNS; b.
 - menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; d.
 - ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknisi Elektromedis yang diberhentikna karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Teknisi

ЕІЕКТС	medis sesuai d	engan ket	entuan yai	ng beriaku.		
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Dalalasasa	II/c	60	Rp. 360.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:
	Pelaksana	II/d	80	кр. 300.000	36 U i	Berijazah paling rendah Diploma III(D.III)teknik elektromedik;
	Pelaksana	Ш/а	100	Rp. 450.000	58th	Pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c,
	Lanjutan	Ш/ь	150	кр. 430.000	36 U i	Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)Teknisi Elaktromodia yang mercik kerdalari
	Damisalia	Ш/с	200	Rp. 780.000	58th	 Elektromedis yang masih berlaku; Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
	Penyelia	Ш/	300	кр. 780.000	36 U i	dalam 1 (satu) tahun terakhir
	Davidance	d	100	Rp. 540.000	58th	Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:
	Pertama	III/B	150	кр. 5-10.000	36 U i	 Berijazah paling rendah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) teknikelektromedik; Pangkat paling rendah Penata Muda, golru III/a; Memiliki Surat Tanda Registrasi (SIR)Teknisi Elektromedis yang masih berlaku;
	Mode	Ш/с	200	Rp. 960.000	58th	
Ahli	Muda	III/d	300	кр. 900.000	36ui	Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jbtan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
	Madya	IV/b	550	Rp. 1.260.000	60th	Memiliki pengalaman di bidang pelayanan pengelolaan alat elektromedik paling kurang 1
	Mauya	IV/c	700			(satu) tahun terakhir sebelum pengangkatan; 3. Usia paling tinggi 50 tahun; 4. Tersedia formasi jabfung Teknisi Elektromedis.

Teknisi Gigi

1. PER MENPAN-RB : Nomor PER/06/M.PAN/4/2007, Tanggal 30 April 2007

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1148/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 35 Tahun 2007, Tanggal 24 Oktober 2007

3. PENGERTIAN : Teknisi Gigi adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan

dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat,

serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PN SPusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai dibantu Tim Penilai Departemen

b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

d. Pimpinan Instansi bagi Teknisi Gigi Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknisi Gigi yang diberhentikan karena poin b s.d e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjan g Jabata n	Golonga n Ruang	Angk a Kredit	Tunjang an Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Balalassas	II/c	60	D., 240,000	E0.41-	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya	
	Pelaksana	II/d	80	Rp. 240.000	58 th	DIIIsesuai dengan kualifikasi pendidikan	
	D alahaan	III/a	100		Pengatur, Gol. Ruang 3. Setiap unsur penilaia	Pengatur, Gol. Ruang II/c	
Terampil	Pelaksan a Lanjutan	Ш/b	150	Rp. 265.000	58 th	bernilai baik dalam satu tahun terakhir	
		Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;	
<u> </u>	Penyelia	Ш/d	300	Rp. 500.000	58 th	Memiliki pengalaman dalam pelayanan teknik gigi paling singkat 2 tahun; Berusia paling tinggi 50 tahun.	

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

1. KEPMENPAN-RB : Nomor KEP/193/M.PAN/11/2004, Tanggal 9 Nopember 2004

2. KEPUTUSAN BERSAMA: Nomor 190/KA/BPPT/IX/2005 dan Nomor 19A Tahun 2005, Tanggal 31 Oktober

2005

3. PENGERTIAN : Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk

melakukan tugas/kegiatan pelayanan penelitian dan perekayasaan pada

instansi pemerintah.

4. TUGAS POKOK : Melakukan pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 31 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

8. RUMPUN JABATAN : Penelitian dan perekayasaan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Kepala Badan/Pusat Penelitian dan Pengembangan atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon IIpada instansi pusat atau daerah bagi Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi.

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknisi Penelitian dan Perekayasaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat

kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keiiii	<u>yan ualam jab</u>	<u>qtannya sesu</u>	<u>ai uengan i</u>	<u>ketentuan yang</u>	Dellaru.	<u> </u>
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah paling rendah SLTA
		П/ь	40			sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a; 3. Diklat fungsional tingkat terampil; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 250.000	58 th	
		II/d	80			
	Pelaksana	Ш/а	100	Rp. 300.000	58 th	bernilai baik dalam satu tahun terakhir
Terampil	Lanjutan	ш/ь	150	ТФТООССО	354.	
		Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman melakukan
	Penyelia	III/d	300	Rp. 450.000	58 th	pelayanan kegiatan penelitian dan perekayasaan paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir

Teknisi Penerbangan

1. KEPMENPAN : Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004, Tanggal 9 Nopember 2004

2. KEPUTUSAN BERSAMA: Nomor KM. 50 Tahun 2005 dan Nomor 13 Tahun 2005, Tanggal 24 Agustus 2005
3. PENGERTIAN: Teknisi Penerbangan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggungiawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan

tugas/kegiatan pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta

kelancaran lalu lintas Penerbangan.

4. TUGAS POKOK : Pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang meliputi pemanduan

lalulintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika, teknis elektronika penerbangan, teknis listrik penerbangan, pendayagunaan dan perawatan fasilitas bidang landasan serta pengoperasian dan perawatan

penerbangan kalibrasi.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 69 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 20177. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Perhubungan

8. RUMPUN JABATAN : Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Kementerian Perhubungan

10. PEJABAT PENETAP PAK:

Direktur Jenderal Perhubungan udara atau pejabat eselon Ilyang membidangi pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran lalu lintas penerbangan bagi Teknisi Penerbangan Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Direktorat Jenderal

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknisi Penerbangan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jabata	iii ya sesaai ae	ngan kek	intaan yang i	oci iaitai			
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan Dalam Jabatan	
		II/b	40			Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah paling rendah D.II	
	Pelaksana	elaksana II/c	60	Rp. 260.000	58 th	sesuai dengan kualifikasi pendidikan	
		II/d	80	30 Penga	2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda TKI Golongan Ruang II/b.		
	Pelaksana	III/a	100	Rp. 375.000	58 th	 Diklat fungsional tingkat terampil Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Kredit 	
Terampil	Pelaksana Lanjutan	III/b	ш/ь 150				
		Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Membarana: 2. Membarana:	
	Penyelia	III/d	300	Rp. 500.000	58 th	keselamatan pelayaran paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUPdari jabatan terakhir	

Teknisi Perkebunrayaan

1. PERMENPAN-RB : Nomor 31 Tahun 2018, Tanggal 9 Agustus 2018

2 PERATURAN BERSAMA : Nomor 45 Tahun 2019, Tanggal ...

3. PENGERTIAN : Teknisi Perkebunrayaan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan pengelolaan teknis di bidang perkebunrayaan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pengelolaan teknis kebun raya meliputi pembibitan, registrasi

pemeliharaan koleksi, pembuatan herbarium dan bank biji

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017

7. INSTANSI PEMBINA : LIPI

8. RUMPUN JABATAN : Ilmu hayat

9. LINGKUP BERLAKU : Instansi Pusat dan Instansi Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan JF Teknisi, Perkebunrayaan pada LIPI untuk Angka Kredit Teknis Perkebunrayaan Penyelia di lingkungan LIPI, Pemerintah Daerah Prov./Kab./Kota, dan Perguruan Tinggi;

b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kepegawaian pada LIPI untuk Angka Kredit Teknisi Perkebunrayaan Pemula sampai dengan Teknis Perkebunrayaan Mahir di

lingkungan LIPI;

c. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit Teknisi Perkebunrayaan Pemula sampai dengan Teknis Perkebunrayaan Mahir di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

d. Tim Penilai Perguruan Tinggi bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk Angka Kredit Teknisi Perkebunrayaan Pemula s.d. Teknisi Perkebunrayaan Mahir di lingkungan Perguruan Tinggi.

11. KENAIKAN JABATAN

Teknisi Perkebunrayaan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DA RIJABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Teknisi Perkebunrayaan yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	Terampil	II/c	60		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yg baik;
	тегашри	II/d	80		58 th	3. sehat jasmani dan rohani; 4. berijazah paling rendah SLTA bidang IPA, SMK bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, atau
Ketrampilan	Mahir	III/a	100		58 th	sederajat dan paling tinggi D3 bidang kehutanan, pertanian, dan biologi; 5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/b	150		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1. memenuhi syarat pengangkatan
	Penyelia	III/c	200		58 th	pertama; 2. memiliki pengalaman di bidang perkebunrayaan paling sedikit 2 (dua)
		III/d	300		58 th	tahun; 3. berusia paling tinggi 53 tahun.

Teknisi Siaran

PERMENPAN-RB : Nomor 29 Tahun 2017, Tanggal 6 Nopember 2017

2. **PERATURAN BKN** : Nomor 37 Tahun 2019, Tanggal ...

3. **PENGERTIAN** : Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS yang melakukan

kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru pada

LPPRRIdan LPPTVRI.

TUGAS JABATAN Melakukan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru.

5. PERPRES TUNJANGAN

PPNomor 11 Tahun 2017 6. PERATURAN BUP : Kementerian Kominfo 7. **INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN** : Penerangan dan Seni Budaya LINGKUP BERLAKU PNS Kementerian Kominfo (RRI, TVRI)

PEJABAT PENETAP PAK

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Madya pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golru IV/cdi lingkungan RRIdan TVKIdibantu Tim Penilai Pusat;

b. Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRIdan TVRI untuk angka kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Pertama s.d Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,golru IV/bdi lingkungan RRI

dan TVRIdibantu Tim Penilai Unit Kerja

11. PENGANGKATAN DARI JF ASISTENTEKNISISIARAN KEDALAM JF TEKNISI SIARAN

a. Asisten Teknisi Siaran yang memperoleh ijasah S1/DIV dapat diangkat ke jabatan Teknisi Siaran dgn syarat:

l) tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;

2) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;

3) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan

standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 4) telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru untuk

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;

memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan

memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

a. Asisten Teknisi Siaran yang akan diangkat menjadi Teknisi Siaran diberikan angka kredit dari ijazah S1/DIV, ditambah sebesar &/angka kredit kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dgn tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

11. UII KOMPETENSI:

Teknisi Siaran yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi

13. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS:
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

14. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknisi Siaran yang diberhentikan karena point b s.d point e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
	Ahli Pertama	III/a	100		58th	Syarat pengangkatan pertama: 1. berstatus PNS; 2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
	Amirauma	ш/ь	150		3001	sehat jasmani dan rohani; berijazah paling rendah Sarjana (S1)/DIV dengan kualifikasi pendidikan yang
		Ш/с	200			ditentukan oleh Instansi Pembina; 5. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi
Keahlian	Ahli Muda	III/d	300		58 th	sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina; dan 6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
Keaimaii		IV/a	400			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama kecuali angka 6;
	Ahli Madya	IV/b	550		60 th	Memiliki pengalaman di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media barpaling singkat 2 tahun. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 thterakhir
Ļ		IV/c	700			4. Berusia paling tinggi: a. 53th utk menduduki jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda b. 55th utk menduduki jenjang Ahli Madya

Teknisi Transfusi Darah

PERMENPAN-RB : Nomor PER/05/M.PAN/4/2007, Tanggal 30 April 2007

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 1147/MENKES/PB/X/2007 dan Nomor 34 Tahun 2007, Tgl 24 Oktober 2007

E. PENGERTIAN : Teknisi Transfusi Darah adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan kegiatan tranfusi darah yang meliputi rekruitment donor,

seleksi donor, penyadapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan Darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan

lanjutan kasus inkompatibilitas serta pelaporan dan dokumentasi.

5. PERPRES TUNJANGAN: Nomor 34 Tahun 2008, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017 7. INSTANSI PEMBINA : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK :

a. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen

b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

d. Pimpinan Instansi bagi Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Teknisi Transfusi Darah yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golonga n Ruang	Angk a Kredit	Tunjanga n Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya DI	
		II/b	40			Teknologi Transfusi Darah 2. Pangkat serendah-rendahnya	
	Pelaksana	П/с	60	Rp. 240.000	58 th	Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam	
		II/d	80			DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun	
Terampil	Pelaksana	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	terakhir	
i crampii	Lanjutan	III/b	150	кр. 205.000	3501		
		Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;	
	Penyelia	III/d	300	Rp. 500.000	58 th	 Memiliki pengalaman dalam pelayanan transfusi darah paling singkat 2 tahun; Berusia paling tinggi 50 tahun. 	

Terapis Wicara

1. PERMENPAN-RB : Nomor PER/48/M.PAN/4/2005, Tanggal 21 April 2005

2. PERATURAN BERSAMA: Nomor 1367/MENKES/PB/IX/2005 dan Nomor 19 Tahun 2005, Tgl 19 September 2005

3. PENGERTIAN : Terapis Wicara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan

pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.

4. TUGAS POKOK : Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi terciptanya kemampuan komunikasi yang ontimal baik dalam aspek bahasa wicara suara

komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai

individu maupun sebagai anggota masyarakat.

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 34 Tahun 2008

6. PERATURAN BUP7. INSTANSI PEMBINA8 : PP Nomor 11 Tahun 20179 : Kementerian Kesehatan

8. RUMPUN JABATAN : Kesehatan

9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Departemen

b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi

c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan instansi pusat di luar Depkes bagi Terapis Wicara Pelaksana s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Terapis Wicara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
		П/с	60			Syarat pengangkatan pertama: 1. Berijazah serendah-rendahnya DIII
	Pelaksana	II/d	80	Rp. 240.000	58 th	sesuai dengan kualifikasi pendidikan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Golongan Ruang II/c.
	Pelaksana Lanjutan	Ш/а	100		58 th	Tersedianya Formasi Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
Terampil		III/b	150	Rp. 265.000		
		Ш/с	200			Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama;
	Penyelia	III/d	300	Rp. 500.000	58 th	 Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan terapi wicara paling singkat 2 tahun; Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.

Widyaprada

PERMENPAN-RB : Nomor 3 Tahun 2019, Tanggal 21 Februari 2019 : Nomor 21 Tahun 2019, Tanggal 20 Septemebr 2019 **PERATURAN BKN**

PENGERTIAN : Widyaprada adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

melaksanakan kegiatan Pemetaan untuk Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu

Pendidikan.

: melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan TUGAS POKOK

Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan

dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.

Nomor 5. PERPRESTUNJANGAN

: PP Nomor 11 Tahun 2017 6. PERATURAN BUP

: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 7. INSTANSI PEMBINA

: Tenaga Pendidikan Lainnya 8. RUMPUNJABATAN

: Instansi Pusat dan Instansi Daerah LINGKUP BERLAKU

10. PEJABAT PENETAP PAK:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi keskretariatan pada Kementerian Pendidiikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

- b. Pimpinana Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat atau pendidikan dasar dan menengah, atau membidangi penjaminan mutu pendidikan pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Widyaprada Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda di lingkungakan Instansi Pemerintah 11. KENAIKAN JABATAN

Widyaprada yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

12. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

13. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN:

Widyaprada yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
	D	III/a	100		58 th	Syarat pengangkatan pertama: 1.berstatus PNS:
	Pertama	III/b	150		58 th	2.memiliki integritas dan moralitas yg baik; 3.sehat jasmani dan rohani;
Keahlian	Muda	III/c	200		58 th	4.berijazah paling rendah S-1/D-4 di bidang pendidikan, ekonomi, sosial atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan ditetapkan oleh instansi pmebina; 5.mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina; 6.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS
		III/d	300		58 th	Syarat pengangkatan perpindahan jabatan: 1.memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2.berusia paling tinggi:
		IV/a	400		60 th	a.53 tahun untuk JF Penata Widyaprada Ahli Pertama dan Widyaprada Ahli Muda;
	Madya	IV/b	550		60 th	b.55 tahun untuk JF Widyaprada Ahli Madya; c.60 tahun untuk JF Widyaprada Ahli Utama
		IV/c	700		60 th	bagi PNS yang telah menduduki Jabatan
	Utama	IV/d	850		65 th	Pimpinan Tinggi.
	Otalila	IV/e	1050		65 th	

Widyaiswara

1. PERMENPAN-RB : Nomor 22 Tahun 2014, Tanggal 23 Juli 2014

2. PERATURAN BERSAMA : Nomor 1 Tahun 2015 dan Nomor 8 Tahun 2015, Tanggal 30 Januari 2015

3. PENGERTIAN : Jabatan fungsional Widyaiswara adalah jatanan yg mempunyai ruang lingkup tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, evaluasi

dan pengembangan diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.

: Melaksanakan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat

Pemerintah

5. PERPRES TUNJANGAN : Nomor 59 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007

6. PERATURAN BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
 7. INSTANSI PEMBINA : Lembaga Administrasi Negara

8. RUMPUN JABATAN : Pendidikan lainnya 9. LINGKUP BERLAKU : PNS Pusat / Daerah

10. PEJABAT PENETAP PAK

4. TUGAS POKOK

a. Kepala LAN atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan LAN yang membidangi Diklat bagi Widyaiswara Ahli Utama di lingkungan LAN dan instansi lainnya dibantu Tim Penilai Pusat (TPP);

- b. Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan instansi masing-masing dibantu Tim Penilai Instansi (TPI);dan
- c. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Widyaiswara Ahli Pertama sampai dengan Widyaiswara Ahli Madya di lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Daerah (TPD)

11. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

12. PENGANGKATAN KEMBALI:

Widyaiswara yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku.

	,,									
Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan				
	Pertama	Ш/ь	150	Rp. 325.000	58 th	Syarat pengangkatan: 1. berijazah paling rendah Pascasarjana (S2)dari perguruan tinggi yang				
	Muda	Ш/с	200	Rp. 700.000	58 th	terakreditasi 2. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I,golru III/b;				
		III/d	300	•		3. berusia paling tinggi 50 tahun pada saat pengangkatan sebagai Widyaiswara;				
Ahli	Madya	IV/a	400			 memiliki pengalaman di bidang Dikjartih; telah mengikuti dan lulus Diklat Pembentukan Calon Widyaiswara; 				
		IV/b	550	Rp. 1.000.000	60 th	6. telah mendapat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara dan rekomendasi Penetapan Angka Kredit awal dari Instansi Pembina;				
		IV/c	700			7. penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan8. tersedia formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara				
•	Utama	IV/d	850			Selain syarat yang telah ditentukan diatas kecuali angka 3, pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi menjadi Widyaiswara, harus: 1. Sehat jasmani dan rohani;				
Ĺ		IV/e	1050	Rp. 1.400.000	65 th	Lulus uji kompetensi; Memenuhi formasi Widyaiswara untuk pelaksanaan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Diklatpim Tingkat Idan Diklatpim Tingkat II				

RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL

1. Rumpun Fisika, kimia dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan ilmu pengetahuan di bidang ilmu fisika, astronomi, meteorologi, kimia dan geofisika. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Pengawas Radiasi, Pengamat Gunung Api, Pranata Nuklir.

2. Rumpun Matematika, Statistik dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori matematika aktuaria atau konsep statistika dan mengaplikasikannya pada bidang teknik, ilmu pengetahuan alam dan sosial serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional ilmu matematika, statistika dan aktuaria.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Peneliti dan Statistisi.

3. Rumpun ke Komputeran

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan dengan metode operasional serta ilmu pengetahuan di bidana penerapan perencanaan, pengembangan dan peningkatan sistem berbasis vang komputer, pengembangan perangkat lunak, prinsip dan metode operasional, pemeliharaan kamus data dan sistem manajemen, database untuk menjamin integritas dan keamanan data serta membantu pengguna komputer dan perangkat lunak standar, mengontrol dan mengoperasikan komputer dan peralatannya, melaksanakan tugas-tugas pemprograman yang berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Pranata Komputer, Operator SIAK, ADB Kependudukan.

4. Rumpun Arsitek, Insinyur & yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan penelitian, meningkatkan dan mengembangkan konsep, teori dan metode operasional, menerapkan pengetahuan dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penerapan konsep, prinsip dan metode operasional di bidang arsitektur dan teknologi serta efesiensi dalam proses produksi.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Penyelidik Bumi, Penata Ruang, Surveyor Pemetaan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Pengairan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Teknik Penyehatan Lingkungan.

5. Rumpun Penelitian dan Perekayasaan

adalah jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional yang berhubungan dengan bidang penelitian dan perekayasaan dan melakukan kegiatan teknis yang berhubungan dengan penelitian dan perekayasaan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Perekayasa.

6. Rumpun Ilmu Hayat

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya adalah melakukan kegiatannya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang biologi, mikrobiologi, botani, ilmu hewan, ekologi anatomi, bakteorologi, biokimia, fisiologi, genetika, agronomi, Patologi atau farmakologi serta melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, penerapan konsep prinsip dan metode operasional di bidang biologi, ilmu hewan, agronomi dan kehutanan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi antara lain: Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Benih Tanaman, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Bibit Ternak, Analis Pasar Hasil Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengendali Dampak Lingkungan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan, Analis Pasar Hasil Perikanan, Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Ketahanan Pangan, Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, Pengelola Kesehatan Ikan.

7. Rumpun Kesehatan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peningkatan kesehatan, pencegahanpenyakit manusia, pengobatan dan rehabilitasi, kesehatan gigi dan mulut, farmasi serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi seluruh Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan.

8. Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional disiplin ilmu khusus di bidang pendidikan tinggi, melaksanakan tugas mengajar pada pendidikan tinggi disamping penyiapan buku dan tulisan ilmiah. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Dosen.

Rumpun Pendidikan Tingkat TK, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus 9. adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran pada Tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Laniutan dan Sekolah Khusus serta mengajar anak-anak atau orang dewasa yang cacat fisik dan cacat mental atau mempunyai kesulitan belajar pada tingkat pendidikan tertentu. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Guru.

10. Rumpun Pendidikan lainnya

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan dan pelatihan yang tidak berhubungan dengan pengajaran, menelaah serta memeriksa hasil kerja yang telah dicapai oleh guru dalam penerapan kurikulum, memberikan pelatihan penggunaan teknologi tinggi.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Instruktur, Pamong Belajar, Pengawas Sekolah, Penilik, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Pranata Laboratorium Pendidikan, Widyaiswara, Pelatih Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga.

11. Rumpun Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas melakukan pemotretan; mengontrol gambar yang bergerak dan video kamera dan peralatan lain untuk merekam dan menyempurnakan citra dan suara, mengontrol penyiaran dan sistem alat telekomunikasi, mengontrol penggunaan alat untuk keperluan diagnosa medis dan perawatan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pengendali Frekwensi Radio.

12. Rumpun Teknisi & Pengontrol Kapal & Pesawat

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas memberi komando dan menavigasi kapal serta pesawat, melaksanakan fungsi teknis untuk menjamin efesiensi dan keselamatan pelayaran serta penerbangan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Teknisi Penerbangan, Pengawas Keselamatan Pelayaran.

13. Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta memeriksa pengimplementasian peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan pencegahan kebakaran dan bahaya lain, keselamatan kerja, perlindungan kesehatan dan lingkungan, keselamatan proses produksi, barang dan jasa yang dihasilkan dan juga halhal yang berhubungan dengan standar kualitas dan spesifikasi pabrik.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Ketenagakerjaan, Inspektur Tambang, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Penguji Mutu Barang, Penera, Pengawas Farmasi dan Makanan, Pengawas Lingkungan Hidup, Rescuer, Pengamat Tera, Pengawas Kemetrologian, Pranata Laboratorium Kemetrologian, Penguji K3, Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, Penguji Perangkat Telekomunikasi, Analis Kebakaran, Pemadam Kebakaran.

14. Rumpun Akuntan dan Anggaran

adalah jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, penyeliaan atau pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan akuntansi, anggaran dan manajemen keuangan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi Auditor dan Pemeriksa, Analis Keuangan Pusat dan Daerah

15. Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan keuangan dan Penjualan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam analisis kecenderungan pasar di bidang keuangan dan devisa, menaksir nilai komoditi, real estate atau properti lain atau menjual lewat lelang atas nama Pemerintah.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini yaitu Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pelelang.

16. Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas memberlakukan dan menerapkan peraturan perundangan pemerintah yang berhubungan dengan batas negara, pajak-pajak, jaminan sosial, ekspor barang dan impor barang, pembentukan usaha, pendirian gedung serta kegiatan lain yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah. Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pemeriksa Bea dan Cukai, Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Analis Keimigrasian, Pemeriksa Keimigrasian.

17. Rumpun Manajemen

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan di bidang peningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan, pengembalian keputusan dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan sumber daya manajemen.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Analis Kepegawaian, Penerjemah, Auditor Kepegawaian, Assessor SDM Aparatur. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis APBN.

18. Rumpun Hukum dan Peradilan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep. Teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang hukum, perencanaan peraturan perundang-undangan serta pemberian saran dan konsultasi pada para klien tentang aspek hukum penyelidikan kasus, pelaksanaan peradilan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Mediator Hubungan Industrial, Perancang Peraturan Perundang-undangan.

19. Rumpun Hak Cipta, Paten dan Merek

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pemberian saran, pengadministrasian, penyeliaan, serta pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengatalokan, registrasi dari hak cipta, penetapan hak paten, pendaftaran merek dagang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Kataloger, Pemeriksa Desain Industri.

20. Rumpun Penyidik dan Detektif

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang mempunyai tugas menyelidiki fakta yang berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan pihak yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang diduga berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yang mencurigakan di perusahaan, toko ataupun di tempat umum.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Agen, Polisi Kehutanan, Sandiman.

21. Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan benda yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Arsiparis, Pustakawan.

22. Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang kegiatannya berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, pengembangan konsep dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan

filosofi, sosiologi, psikologi dan ilmu sosial lainnya, memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan keluarga dalam masyarakat.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pengantar Kerja, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penggerak Swadaya Masyarakat, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Hukum, Penyuluh Narkoba.

23. Rumpun Penerangan dan Seni Budaya

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, pengamatan, penciptaan, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional di bidang pelaksanaan kegiatan pemeliharaan karya seni, museum, bahasa, sejarah, antropologi dan arkeologi serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pekerjaan penerangan kepada masyarakat, pengamatan dan penciptaan serta pemeliharaan karya seni, benda seni, benda sejarah (museum).

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Pranata Hubungan Masyarakat, Pamong Budaya.

24. Rumpun Keagamaan

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pembinaan rohani dan moral masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Penghulu, Penyuluh Agama, Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

25. Rumpun Politik dan Hubungan Luar Negeri

adalah rumpun jabatan fungsional PNS yang tugasnya berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan perumusan, pengevaluasian, penganalisaan serta penerapan kebijaksanaan di bidang politik, pemerintahan dan hubungan internasional.

Jabatan Fungsional yang termasuk dalam rumpun ini meliputi: Diplomat, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan), Penata Kanselesai, Pranata Informasi Diplomatik.

DAFTAR INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

			KATEGO	ORI
NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	KETERAMPILAN	KEAHLIAN
1.	Kementerian Luar Negeri	1. Diplomat	X	√
		2. Penata Kanselerai	х	√
		3. Pranata Informasi Diplomatik	х	√
2.	Kementerian Perhubungan	1. Pengawas Keselamatan Pelayaran	√	√
		2. Penguji Kendaraan Bermotor	√	X
		3. Teknisi Penerbangan	√	X
3.	Kementerian Hukum dan	1. Analis Keimigrasian	х	√
	HAM	2. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	√	Х
		3. Pembimbing Kemasyarakatan	х	√
		4. Pemeriksa Keimigrasian	√	Х
		5. Pemeriksa Merek	√	√
		6. Pemeriksa Paten	х	√
		7. Perancang Peraturan Perundang- undangan	х	√
		8. Pemeriksa Desain Industri	х	√
		9. Penyuluh Hukum	х	√
4.	Kementerian Keuangan	1. Analis Anggaran	х	√
		2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	х	√
		3. Pelelang	х	√
		4. Pemeriksa Bea dan Cukai	√	√
		5. Pemeriksa Pajak	√	√
		6. Penilai Pemerintah	х	√
		7. Penyuluh Pajak	√	√
		8. Penilai Pajak	х	√
		9. Asisten Penilai Pajak	√	Х
		10. Penata Laksana Barang	√	Х
5.	Kementerian Dalam Negeri	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (Pengawas Pemerintahan)	х	√
		2. Polisi Pamong Praja (Pol PP)	√	√
		3. Administrator Database Kependudukan	x	√
		4. Operator SIAK	√	Х
		5. Analis Kebakaran	x	√
		6. Pemadam Kebakaran	√	X

NO	TAKETANCE DENADENIA	TARATAN FINISTONAL	KATEGO	RI
NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	KETERAMPILAN	KEAHLIAN
6.	Kementerian Perdagangan	1. Penera	√	√
		2. Penguji Mutu Barang	√	√
		3. Pengamat Tera	√	Х
		4. Pengawas Kemetrologian	х	√
		5. Pranata Laboratorium Kemetrologian	х	√
7.	Kementerian Perindustrian	1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	√	√
		2. Asesor Manajemen Mutu Industri	x	√
8.	Kementerian Pertanian	1. Analis Pasar Hasil Pertanian	√	√
		2. Medik Veteriner	х	√
		3. Paramedik Veteriner	√	Х
		4. Pengawas Benih Tanaman	√	√
		5. Pengawas Bibit Temak	√	√
		6. Pengawas Mutu Hasil Pertanian	√	√
		7. Pengawas Mutu Pakan	√	√
		8. Pengendali OPT	√	√
		9. Penyuluh Pertanian	√	√
		10. Pemeriksa PVT	х	√
		11. Analis Ketahanan Pangan	х	√
		12. Analis Perkarantinaan Tumbuhan	х	√
		13. Pemeriksa Karantina Tumbuhan	√	Х
		14. Dokter Hewan Karantina	х	√
		15. Paramedik Karantina Hewan	√	Х
9.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Inspektur Ketenagalistrikan	х	√
	Sumber Daya Milieral	2. Inspektur Minyak dan Gas Bumi	x	√
		3. Inspektur Tambang	х	√
		4. Pengamat Gunung Api	√	Х
		5. Penyelidik Bumi	х	√
10.	Kementerian Pekerjaan	1. Penata Ruang	х	√
	Umum dan Perumahan Rakyat	2. Teknik Jalan dan Jembatan	√	√
	- tanty at	3. Teknik Pengairan	√	√
		4. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	√	√
		5. Teknik Penyehatan Lingkungan	√	√
		6. Pembina Jasa Konstruksi	х	√
11.	Kementerian Pertahanan	1. Kataloger	√	√
		2. Analis Pertahanan Negara	х	√

	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	KATEGORI	
NO			KETERAMPILAN	KEAHLIAN
12.	Kementerian Pendidikan dan	1. Guru	x	√
	Kebudayaan	2. Pamong Belajar	x	√
		3. Pamong Budaya	√	√
		4. Pengawas Sekolah	x	√
		5. Penilik	х	√
		6. Pengembang Teknologi Pembelajaran	х	√
		7. Pranata Laboratorium Pendidikan	√	√
		8. Dosen	х	√
13	Kementerian Kesehatan	1. Administrator Kesehatan	х	√
		2. Apoteker	х	√
		3. Asisten Apoteker	√	Х
		4. Bidan	√	√
		5. Dokter	х	√
		6. Dokter Gigi	х	√
		7. Dokter Pendidik Klinis	х	√
		8. Epidemiolog Kesehatan	√	√
		9. Entomolog Kesehatan	√	√
		10. Fisioterapis	√	√
		11. Fisikawan Medis	х	√
		12. Nutrisionis	√	√
		13. Okupasi Terapis	√	Х
		14. Orthotis Prostetis	√	х
		15. Pembimbing Kesehatan Kerja	х	√
		16. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	√	√
		17. Perawat	√	√
		18. Perawat Gigi	√	√
		19. Perekam Medis	√	√
		20. Pranata Laboratorium Kesehatan	√	√
		21. Psikolog Klinis	х	√
		22. Radiografer	√	√
		23. Refraksionis Optisien	√	х
		24. Sanitarian	√	√
		25. Teknisi Elektromedis	√	√
		26. Teknisi Gigi	√	Х
		27. Teknisi Transfusi Darah	√	Х
		28. Terapis Wicara	√	Х
		29. Asisten Penata Anestesi	√	X
		30. Penata Anestesi	Х	√

NO	INSTANSI PEMBINA	TABATAN TINGGTONAL	KATEGORI	
		JABATAN FUNGSIONAL	KETERAMPILAN	KEAHLIAN
14.	Kementerian Agama	1. Penghulu	х	√
		2 Penyuluh Agama	√	√
		3 Pentashih Mushaf Al-Qur'an	Х	√
15.	Kementerian Ketenagakerjaan	1. Instruktur	√	√
		2. Pengantar Kerja	Х	√
		3. Pengawas Ketenagakerjaan	х	√
		4. Mediator Hubungan Industrial	x	√
		5. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Х	√
16.	Kementerian Desa, PDTdan Transmigrasi	Penggerak Swadaya Masyarakat	√	√
17.	Kementerian Sosial	1. Pekerja Sosial	√	√
		2. Penyuluh Sosial	х	√
18.	Kementerian Sekretariat Kabinet	Penerjemah	x	√
19.	Kementerian Lingkungan	1. Pengendali Ekosistem Hutan	√	√
	Hidup dan Kehutanan	2. Penyuluh Kehutanan	√	√
		3. Polisi Kehutanan	√	√
		4. Pengendali Dampak Lingkungan	√	√
		5. Pengawas Lingkungan Hidup	х	√
20.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Pengawas Perikanan	√	√
		2. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	√	√
		3. Penyuluh Perikanan	√	√
		4. Analis Pasar Hasil Perikanan	√	√
		5. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	х	√
		6. Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	√	Х
		7. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	х	√
		8. Pengelola Kesehatan Ikan	x	√
		9. Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	√	Х
		10. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	√	X
		11. Inspektur Mutu Hasil Perikanan	Х	√
		12. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Х	√
21.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1. Asisten Pranata Siaran	√	Х
		2. Asisten Teknisi Siaran	√	X
		3. Pranata Siaran	Х	√
		4. Pranata Hubungan Masyarakat	√	√
		5. Pengendali Frekuensi Radio	√	√
		6. Teknisi Siaran	X	√
		7. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	√	X
		8. Penguji Perangkat Telekomunikasi	X	√

	INSTANSI PEMBINA		KATEGORI		
NO		JABATAN FUNGSIONAL	KETERAMPILAN	KEAHLIAN	
22.	Kementerian Pemuda dan	1. Pelatih Olahraga	X	√	
	Olahraga	2. Asisten Pelatih Olahraga	√	Х	
23.	Kejaksaan Agung	Jaksa	X	Х	
24.	Lembaga Sandi Negara	Sandiman	√	√	
25.	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Surveyor Pemetaan	√	√	
26.	BKKBN	Penyuluh Keluarga Berencana	√	√	
27.	ВРРТ	1. Perekayasa	X	√	
		2. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	√	х	
28.	ВРКР	Auditor	√	√	
29	Perpustakaan Nasional	Pustakawan	√	√	
30.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Pengawas Radiasi	Х	√	
31.	Badan Kepegawaian Negara	1. Analis Kepegawaian	√	√	
		2. Assessor SDM Aparatur	X	√	
		3. Auditor Kepegawaian	X	√	
32.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	1. Analis Kebijakan	X	√	
		2. Widyaiswara	X	√	
33.	LIPI	Peneliti	Х	√	
34.	Badan Intelejen Negara	Agen	√	√	
35.	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Pranata Nuklir	√	√	
36.	Badan Metereologi dan Geofisika (BMG)	Pengamat Metereologi dan Geofisika	√	√	
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pengawas Farmasi dan Makanan	√	√	
38.	Badan Pusat Statistik (BPS)	1. Pranata Komputer	√	√	
		2. Statistisi	√	√	
39.	BAPPENAS	Perencana	x	√	
40.	Arsip Nasional RI	Arsiparis	√	√	
41.	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksa	X	√	
42.	ЦКРР	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	X	√	
43.	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Rescuer	√	Х	
44.	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1. Penyuluh Narkoba	X	√	
		2. Penyidik BNN	X	√	
45.	Sekjen DPRRI	1. Analis APBN	X	√	
		2. Perisalah Legislatif	X	√	
		3. Asisten Perisalah Legislatif	√	Х	
46.	PPATK	Analis Transaksi Keuangan	X	√	